



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 190 /IV.01/HK/2025

TENTANG

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN BERBASIS RISIKO INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2025

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara efektif, efisien dan terpadu serta mencegah terjadinya pengawasan yang tidak terencana dan lebih terarah, perlu disusun Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Inspektorat Provinsi Lampung Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Deputy Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pedoman Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko Bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Daerah, pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus didasarkan pada Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko yaitu melalui pendekatan sistematis dan terstruktur serta selaras dengan tujuan Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Inspektorat Provinsi Lampung Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025;
8. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Kedudukan Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 37 Tahun 2024;

Memperhatikan : Surat Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor : B/8493/KSP.00/70-73/12/2024, hal Penyampaian Pedoman Indeks Pencegahan Korupsi Daerah Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN BERBASIS RISIKO INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2025.**
- KESATU : Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Inspektorat Provinsi Lampung Tahun 2025 merupakan pedoman pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah di Provinsi Lampung Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Melaksanakan rencana kerja Pengawasan serta menyampaikan laporan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KETIGA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Provinsi Lampung.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Inspektur Provinsi Lampung, dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

1. The first part of the report is devoted to a general description of the work done during the year. It includes a summary of the results of the work done in the various departments of the Institute, and a statement of the progress made in the various projects which are being carried out. The second part of the report is devoted to a detailed description of the work done in the various departments of the Institute. It includes a description of the work done in the various departments of the Institute, and a statement of the progress made in the various projects which are being carried out. The third part of the report is devoted to a detailed description of the work done in the various departments of the Institute. It includes a description of the work done in the various departments of the Institute, and a statement of the progress made in the various projects which are being carried out.

REPORT

REPORT ON THE WORK OF THE INSTITUTE DURING THE YEAR 1955

The first part of the report is devoted to a general description of the work done during the year. It includes a summary of the results of the work done in the various departments of the Institute, and a statement of the progress made in the various projects which are being carried out.

The second part of the report is devoted to a detailed description of the work done in the various departments of the Institute. It includes a description of the work done in the various departments of the Institute, and a statement of the progress made in the various projects which are being carried out.

The third part of the report is devoted to a detailed description of the work done in the various departments of the Institute. It includes a description of the work done in the various departments of the Institute, and a statement of the progress made in the various projects which are being carried out.

The fourth part of the report is devoted to a detailed description of the work done in the various departments of the Institute. It includes a description of the work done in the various departments of the Institute, and a statement of the progress made in the various projects which are being carried out.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 17 - 3 - 2025

GUBERNUR LAMPUNG,



RAHMAT MIRZANI DJAUSAL

Tembusan:

1. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
4. Kepala Perwakilan BPK-RI Lampung di Bandar Lampung;
5. Inspektur Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.

1. The first part of the report is a general introduction to the subject of the study. It discusses the importance of the study and the objectives of the research.

2. The second part of the report is a detailed description of the methodology used in the study. It includes information about the sample, the data collection methods, and the statistical analysis.

3. The third part of the report is a discussion of the results of the study. It compares the findings with the objectives of the research and discusses the implications of the results.

4. The fourth part of the report is a conclusion and a list of references. The conclusion summarizes the main findings of the study and provides recommendations for future research. The references list the sources of information used in the study.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 190 /IV.01/HK/2025
TANGGAL: 17 - 3 - 2025

**PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT) BERBASIS RISIKO
INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2025**

I. PENDAHULUAN

Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) merupakan upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pengawasan dalam rangka mendukung capaian kinerja Inspektorat serta sebagai dasar untuk menilai/mengevaluasi kinerja dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan. Hasil yang diharapkan dari penerapan PKPT adalah informasi hasil pengawasan yang dapat digunakan sebagai umpan balik bagi peningkatan kinerja pelaksanaan kegiatan di lingkup Inspektorat Provinsi Lampung.

Kompleksnya tugas pengawasan dan keterbatasan sumber daya pengawasan membutuhkan adanya skala prioritas pelaksanaan, sehingga merencanakan pengawasannya menggunakan perencanaan pengawasan berbasis risiko.

Kegiatan utama perencanaan pengawasan berbasis risiko adalah mengalokasikan kegiatan pembinaan dan pengawasan ke area yang memiliki risiko lebih tinggi yang dapat menghambat pencapaian tujuan Pembangunan nasional dan daerah. Perencanaan pengawasan berbasis risiko dapat diterapkan pada perencanaan pengawasan terhadap pemeriksaan tertentu, perencanaan kegiatan pengawasan tahunan yang dituangkan dalam PKPT.

Pengawasan internal oleh Inspektorat Provinsi Lampung terhadap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pelaksanaan Implementasi reformasi birokrasi guna meningkatkan kinerja khususnya untuk membangun kapasitas kelembagaan seluruh Perangkat Daerah dan kabupaten/kota dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi yang sesuai dengan tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Titik berat dari pemerintahan yang baik adalah pada upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberantasan korupsi secara terarah, sistematis, dan terpadu. Reformasi birokrasi, mustahil akan terwujud jika tata pemerintahan masih memberikan peluang terhadap praktik-praktik Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN). Sehingga penyelarasan terhadap hasil-hasil pelaksanaan tugas pengawasan Inspektorat Provinsi Lampung diharapkan dapat memberikan keyakinan yang memadai atas pencapaian tujuan, sekaligus dapat mengisi peran memberikan peringatan dini (*Early Warning System*) terhadap potensi penyimpangan/kecurangan yang terjadi, disebabkan kelemahan dalam sistem maupun sebagai akibat dari tindak pelanggaran individu.

Pengawasan Internal terdiri dari audit, reviu, monitoring dan evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Sebagai acuan, sasaran dan prioritas pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2025 **adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025** tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025 yang ditetapkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan yang disusun sesuai dengan prioritas berdasarkan Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko. Proses penyusunan PKPT berdasarkan Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR) dapat diuraikan sebagai berikut:

Tahap pertama adalah menentukan *audit universe* (peta auditan). Kriteria untuk menentukan peta auditan antara lain: kebijakan pengawasan (jakwas); anggaran Perangkat Daerah; dampak ke masyarakat; dan kontribusi terhadap tujuan pemerintah daerah. Selanjutnya dibuat skoring untuk menentukan Perangkat Daerah terpilih yang akan dijadikan sebagai obyek pengawasan.

Tahap kedua adalah menentukan program prioritas yang akan dijadikan sebagai obyek pengawasan. Kriteria yang digunakan untuk menentukan prioritas tersebut berdasarkan faktor risiko antara lain kontribusi terhadap tujuan pemerintah pusat, pemerintah daerah; risiko inheren; anggaran program; signifikansi keberhasilan program; dampak terhadap masyarakat; keahlian personil APIP; pengalaman APIP; dan jumlah SDM. Terhadap pemeriksaan/Audit kinerja, program pengawasan yang dipilih adalah berdasarkan program prioritas Nasional dan Daerah yang memiliki skor "**sangat tinggi/tinggi**" dengan mempertimbangkan audit/Pemeriksaan kinerja dan Audit/Pemeriksaan Ketaatan tahun sebelumnya.

Indikator Pembinaan dan Pengawasan yang menjadi acuan Kinerja Inspektorat berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025 antara lain:

I. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota Sebagai Peran GWPP (Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat) Terdiri dari:

a. **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN UMUM TERHADAP ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan umum dilakukan oleh unit kerja di lingkungan Kementerian Dalam Negeri sesuai dengan fungsi dan kewenangannya ke daerah provinsi dan perangkat gubernur sebagai wakil pemerintah pusat ke daerah kabupaten/kota. Pembinaan dan Pengawasan umum dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri ke daerah provinsi dan inspektorat provinsi selaku perangkat gubernur sebagai wakil pemerintah pusat ke daerah kabupaten/kota. Sasaran serta fokus pembinaan dan pengawasan umum berdasarkan arah kebijakan pembangunan nasional tahun 2025, sebagai berikut:

NO.	URAIAN	SASARAN	FOKUS
1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Tercapainya pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3% – 5,6% (Target Pemerintah Provinsi Lampung sesuai RKPD 2025 4,90 %-5,30 %)	1. Aspek pembangunan daerah: a. memastikan potensi wilayah yang dicantumkan dalam RPJMD telah sesuai dengan potensi yang ada; dan b. memastikan RTRW dan RDTR telah ditetapkan dan berbasis digital. 2. Aspek pelayanan publik memastikan sektor perizinan telah sesuai dengan standar biaya, waktu, dan syarat. 3. Aspek keuangan daerah: a. memastikan pendapatan daerah telah disusun berdasarkan potensi; b. belanja daerah dilakukan secara efektif dan efisien; c. realisasi APBD sesuai dengan target yang ditetapkan; dan d. belanja modal dan belanja barang/jasa diorientasikan untuk belanja padat karya serta belanja modal infrastruktur diarahkan sesuai potensi daerah. 4. Aspek kebijakan daerah terkait pendidikan muatan lokal daerah dan pelatihan tenaga kerja diorientasikan untuk membuka lapangan pekerjaan sesuai dengan potensi wilayah

NO.	URAIAN	SASARAN	FOKUS
2.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Tercapainya target tingkat pengangguran sebesar 4,5% - 5,0% (Target Pemerintah Provinsi Lampung di RKPD 2025 3,86-4,00)	1. Aspek kebijakan daerah: a. keandalan data pengangguran terbuka; dan b. terdapat kemudahan dalam proses perizinan berusaha untuk membuka lapangan pekerjaan. 2. Aspek keuangan daerah: a. ketersediaan anggaran untuk Pelatihan Vokasi untuk angkatan kerja produktif; dan b. terdapat kebijakan pemberian insentif berusaha.
3.	Rasio Gini	Tercapainya target nilai penurunan sebesar 0,379 - 0,382. (Target Pemerintah Provinsi Lampung di RKPD 0,318 - 0,321)	1. Aspek kebijakan daerah terkait pemberian akses masyarakat kecil dan UMKM untuk mendapatkan modal. 2. Aspek keuangan daerah: Pemberian subsidi/BLT tepat sasaran; dan Penerapan pajak progresif.
4.	Indeks Modal Manusia (IMM)	Tercapainya target peningkatan IMM sebesar 0,56 Target Pemerintah Provinsi Lampung di RKPD 2025 0,54)	1. Aspek pembangunan daerah dengan memastikan SPM terintegrasi dalam dokumen perencanaan. 2. Aspek keuangan daerah dengan memastikan anggaran SPM terpenuhi.

NO.	URAIAN	SASARAN	FOKUS
5.	Tingkat Kemiskinan	Tercapainya target tingkat kemiskinan sebesar 7,8% - 8,0% (Target Pemerintah Provinsi Lampung di RKPD 2025 9,5 - 10,00)	- Aspek kebijakan daerah: - keandalan data kemiskinan - membuka lapangan kerja - aspek keuangan daerah - Pemberian subsidi/BLT tepat sasaran - penganggaran daerah yang berfokus pada pada pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem
6.	Penurunan intensitas Emisi GRK	Tercapainya target penurunan intensitas Emisi GRK sebesar 38,6% Target Pemerintah Provinsi Lampung diTKPD 2025 62,79).	- Aspek kebijakan daerah terdapat kebijakan untuk mengurangi Emisi Gas Rumah Kaca. - Aspek keuangan daerah terdapat perencanaan penganggaran untuk mengurangi Emisi Gas Rumah Kaca.
7.	Penguatan Tata Kelola Pemerintah	Menguatnya budaya birokrasi yang bersih, melayani dan responsif.	- Aspek pelayanan publik di daerah terkait kesesuaian layanan dengan standar, biaya, waktu, dan syarat - Aspek keuangan daerah: - memastikan pendapatan daerah telah disusun berdasarkan potensi; - belanja daerah dilakukan secara efektif dan efisien; - realisasi APBD sesuai dengan target yang ditetapkan; - pengelolaan BUMD; - kerjasama BUMN-BUMD; dan - pengawasan e-katalog dan <i>e-procurement</i>.

b. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TEKNIK TERHADAP URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

Pembinaan teknis dilakukan oleh unit kerja di lingkungan kementerian/lembaga teknis sesuai dengan fungsi dan kewenangannya ke daerah provinsi dan perangkat gubernur sebagai wakil pemerintah pusat ke daerah kabupaten/kota. Sementara pengawasan teknis dilakukan oleh Inspektorat Jenderal kementerian/lembaga teknis ke daerah provinsi dan inspektorat provinsi selaku perangkat gubernur sebagai wakil pemerintah pusat ke daerah kabupaten/kota.

Sasaran serta fokus pembinaan dan pengawasan teknis tahun 2025 dilakukan terhadap urusan pemerintahan waji pelayanan dasar, sebagai berikut:

A. Urusan Pendidikan

No.	Sasaran	Fokus	Satuan	Target Provinsi 2025
1.	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan	Jumlah Warga Negara Usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan menengah (APS)	%	100
		Jumlah Warga Negara Usia 4-18 disabilitas yang berpartisipasi dalam Pendidikan khusus (APS)	%	100
		Rata-rata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	70,34
		Rata-rata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	59,96
		Rata-rata kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	66,04
		Rata-rata kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	55,65
		Rata-rata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	68,75
		Rata-rata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	72,07
		Rata-rata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	64,31
		Rata-rata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	55,43

No.	Sasaran	Fokus	Satuan	Target Provinsi 2025
		Nasional		
		Rata-rata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asemen Nasional	Nilai	63,67
		Rata-rata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asemen Nasional	Nilai	58,2
		Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	Nilai	90,18
		Iklim Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	Nilai	82,68
		Iklim keamanan SMA	Nilai	77,76
		Iklim keamanan SMK	Nilai	74,3
		Iklim keamanan SDLB	Nilai	78,74
		Iklim keamanan SMPLB	Nilai	77,49
		Iklim keamanan SMALB	Nilai	76,37
		Iklim kebinekaan SMA	Nilai	82,04
		Iklim kebinekaan SMK	Nilai	77,82
		Iklim kebinekaan SDLB	Nilai	75,44
		Iklim kebinekaan SMPLB	Nilai	71,01
		Iklim kebinekaan SMALB	Nilai	70,77
		Iklim Inklusivitas SMA	Nilai	63,01
		Iklim Inklusivitas SMK	Nilai	58,83
		Iklim Inklusivitas SDLB	Nilai	61,57
		Iklim Inklusivitas SMPLB	Nilai	70,2
		Iklim Inklusivitas SMALB	Nilai	68,87

B. Urusan Kesehatan

No.	Sasaran	Fokus	Satuan	Target Provinsi 2025
1.	Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan	Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	%	100
		Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Orang yang Terdampak dan Beresiko Pada Situasi Kejadian Luar Biasa (KLB)	%	100
2.	Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI)	Angka Kematian Ibu (AKI)	Per 100.000 Kelahiran Hidup	180
3.	Penurunan Prevalensi Stunting (Lintas K/L)	Prevalensi Stunting (pendek/ sangat pendek pada balita)	%	13,5
4.	Rumah Sakit dan Puskesmas dengan jenis tenaga medis dan tenaga kesehatan sesuai standar	Persentase RS Pemerintah dengan jenis tenaga medis sesuai strander.	%	75
5.	Rumah Sakit dan Puskesmas Terakreditasi Paripurna	Persentase Rumah Sakit Terakreditasi Paripurna	%	78
6.	Keberhasilan Pengobatan TBC (TBC Success Rate)	Penemuan Kasus TBC	%	90
7.	Ketersediaan obat esensial dan vaksin rutin	Persentase fasyankes dengan ketersediaan obat esensial dan vaksin rutin	%	95

C. Urusan Pekerjaan Umum

No.	Sasaran	Fokus	Satuan	Target Provinsi 2025
1.	Mewujudkan Ketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan	Rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan (%)	%	28
		Rumah tangga dengan akses air minum aman (%)	%	33
		Luas Layanan Irigasi yang dirhabilitasi dan/atau dimodernisasi	Ha	350.000

No.	Sasaran	Fokus	Satuan	Target Provinsi 2025
		Luas layanan irigasi multikomoditas yang dibangun dan/atau ditingkatkan padi dan non padi	Ha	50.000
		Kapasitas layanan prasarana air baku yang dibangun	M ³ / detik	5
		Panjang dan Jumlah Prasarana Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai yang dibangun	Km	200
		Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi aman (%)	%	12,5
2.	Lingkungan Hidup Berkualitas	Persentase angka BABS di tempat terbuka	%	3
		Persentase timbunan sampah yang terolah di fasilitas pengolahan sampah	%	24
		Jumlah tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli terlatih dan tersertifikasi	Orang	7.925
3.	Terselenggara Jasa Kontruksi di Daerah	Jumlah tenaga kerja konstruksi kualifikasi analisis/teknisi operator terlatih dan tersertifikasi	Orang	45.300
		Persentase Ketersediaan data dan informasi jasa konstruksi	%	70
		Persentase Pengawasa tertib usaha jasa konstruksi	%	60
		Persentase pengawasan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi	%	70
		Persentase pengawasan tertib pemanfaatan jasa konstruksi	%	50
4.	Meningkatnya wilayah konektivitas	Persentase kondisi mantap jalan provinsi	%	75
5.	Terselenggaranya Bangunan Gedung yang Tertib dan Andal	Persentase Kabupaten/Kota yang dilakukan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	%	100

D. Urusan Penataan Ruang

No.	Sasaran	Fokus	Satuan	Target Provinsi 2025
1.	Terselasaikannya rencana tata ruang daerah	Jumlah materi teknis RTRW Kabupaten/Kota yang diberikan rekomendasi dalam rangka persetujuan subtansi	Materi Teknis	106
		Jumlah rancangan Perda RTRW Kabupaten/Kota yang dilakukan evaluasi dalam rangka pentapan Perda	Perda	114
		Jumlah Kasus pelanggaran pemanfaatan ruang yang dikenakan sanksi administratif	Kasus	127
2.	Terlaksanannya pengendalian pemanfaatan ruang	Jumlah laporan kebutuhan PPNS Penataan Ruang di Daerah	Laporan	34

E. Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

No.	Sasaran	Fokus	Satuan	Target Provinsi 2025
1.	Terpenuhinya akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan	Persentase rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan	%	67

F. Urusan Ketentraman, Keteriban Umum, dan Perlindungan

No.	Sasaran	Fokus	Satuan	Target Provinsi 2025
1.	Menigkatnya pelayanan bencana yang terintegrasi	Persentase pendampingan penanganan pasca bencana	%	100
		Persentase pendampingan penanganan tanggap darurat bencana	%	100
		Jumlah personal TRC dan Pusalops Tingkat provinsi yang dikembangkan teknis dan manajerialnya	%	30
		Terverifikasinya data penduduk yang berhak menerima SPM, dan agregat penduduk yang telah menerima KIE, dan data penduduk yang mengikuti pelatihan pencegahan/ gladi Kesiapsiagaan di daerah	Dokumen	1

		rawan bencana tingkat provinsi		
		Terlapornya penyelesaian pelaksanaan SPM sub urusan bencana ke pusat	Dokumen	1
		Persentase penyelesaian dan pendampingan dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	%	100
		Persentase pemenuhan capaian kebutuhan dasar SPM sub urusan bencana	Daerah	100
		Jumlah daerah yang meningkatkan manajemen pengintegrasian dan pengarusutamaan pengurangan risiko bencana	Provinsi	38
2.	Meningkatnya pelayanan tranitibum yang terintegrasi	Jumlah daerah yang meningkatkan Upaya kesiapsiagaan dan melaksanakan pelayanan pemerintah pada saat tanggap darurat dan pasca bencana	Provinsi	38
		Terpenuhinya capaian mutu layanan SPM sub urusan tranitibum	Daerah	552
		Tercapainya indeks penyelenggaraan SPM sub urusan tranitibum	Daerah	552
		Terpenuhinya kebutuhan SPM sub urusan kebakaran yang sesuai standar	Daerah	552

G. Urusan Sosial

No.	Sasaran	Fokus	Satuan	Target Provinsi 2025
1.	Terpenuhinya kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Sosial	Presentase (%) lanjut usia terlarat yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persentase	100
		Persentase (%) korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasar	Persentase	100
		Persentase (%) anak terlarat yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persentase	100
		Persentase (%) gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persentase	100

No.	Sasaran	Fokus	Satuan	Target Provinsi 2025
		Persentase (%) Lembaga kesejahteraan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial sesuai standar	Persentase	100
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan sosial oleh pelaku kesejahteraan sosial	Persentase (%) Lembaga kesejahteraan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial sesuai standar	Persentase	73
		Persentase (%) SDM kesejahteraan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial sesuai standar	Persentase	83
3.	Berkurang beban pengeluaran Masyarakat miskin dan rentan dalam pemenuhan kebutuhan dasar	Persentase (%) KPM yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persentase	100
4.	Meningkatnya pendapatan masyarakat miskin dan rentan	Jumlah penerima manfaat yang meningkat pendapatanya	Orang	100.000
5.	Meningkatnya pemanfaatan DTKS dalam program pengentasan kemiskinan	Persentase (%) daerah yang aktif melakukan penuktahiran data terpadu penanggulangan kemiskinan	Persentase	70

II. Pembinaan dan Pengawasan Kepala Daerah Terhadap Perangkat Daerah, terdiri dari 4 fokus yaitu:

A. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah prioritas daerah.

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan terhadap program, kegiatan, sub kegiatan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan/atau **Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025** Pemerintah Provinsi Lampung dengan Tema “**Sinergi Memperkuat Kapasitas dan Ketahanan Ekonomi Berkelanjutan Serta Kualitas Pembangunan Manusia**” dengan sasaran prioritas daerah yang memiliki risiko dan daya ungkit **Sangat tinggi/tinggi** untuk meningkatkan pertumbuhan daerah seperti:

1. Pengendalian Inflasi
2. Peningkatan Investasi
3. Pelayanan Publik
4. Penanganan Stunting, dan
5. Swasembada Pangan
6. Pengentasan Kemiskinan.
7. Infrastruktur.

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan dalam bentuk:

I. pemeriksaan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat; dan/atau

II. pemeriksaan kinerja.

B. Pengawasan Tata Kelola Pemerintahan melalui pelaksanaan Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) terhadap area prioritas pencegahan Korupsi terintegrasi sebagai Berikut :

1. Area Perencanaan;
2. Area Penganggaran;
3. Area Pengadaan Barang dan Jasa;
4. Area Pelayanan Publik;
5. Area Manajemen ASN;
6. Area Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Area Optimalisasi Penerimaan Daerah;
8. Area Penguatan APIP.

C. Pengawasan rutin yang dilakukan Inspektorat Daerah dengan rincian pelaksanaan Tugas:

1. Reviu Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Rencana Keuangan Daerah dengan mengacu kepada Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018, Surat Inspektur Jenderal Nomor 700.1.2.8/303/IJ tanggal 14 Februari 2023 Hal Pedoman Reviu Rencana Pembangunan Daerah SE 2022 dan Surat Inspektur Jenderal Nomor 700.1.2.8/1137/IJ tanggal 26 April 2024 Hal Modul Reviu RKA berbasis SIPD (e-Reviu);

2. Reviu Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018;
3. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2018;
4. Reviu LPPD dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020;
5. Pengawasan Keuangan Desa mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020; dan
6. Pengawasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kegiatan pengawasan lainnya merupakan kegiatan selain pengawasan di atas dan juga merupakan kegiatan yang mendukung untuk kegiatan peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, peningkatan nilai maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan Layanan Jasa Konsultasi.

Dalam rangka menjabarkan kebijakan yang tertuang dalam Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tersebut dan untuk mewujudkan pengawasan yang efektif, efisien, terarah serta terkoordinasi maka disusunlah Program Kerja Pengawasan Tahun (PKPT) Inspektorat Provinsi Lampung Tahun 2025, yang akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan pengawasan di lingkungan Inspektorat Provinsi Lampung agar dapat berjalan selaras dengan sasaran dan tujuan, pelaksanaan tugas dan fungsi serta pencapaian visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung. PKPT Inspektorat Provinsi Lampung Tahun 2025 juga mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. PKPT Inspektorat Provinsi Lampung Tahun 2025 mencakup seluruh kegiatan Pengawasan Intern terdiri dari Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan dan Kegiatan Pengawasan Lainnya. Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III, IV dan V menyusun rencana kegiatan pengawasan sesuai dengan lingkup kewenangan serta tugas dan fungsinya. Sedangkan Sekretariat Inspektorat Provinsi Lampung mempunyai peran sebagai penunjang kegiatan pengawasan dengan melaksanakan dukungan teknis, dan administratif serta pelaksanaan reviu yang ditentukan demi kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pengawasan.

D. Peningkatan kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah.

- 1) Kapabilitas aparat pengawas intern pemerintah level 3.
- 2) Meningkatkan Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah;
- 3) Meningkatnya Penerapan Manajemen Risiko; dan
- 4) Terselenggaranya Pendidikan Profesional Berkelanjutan Minimal 120 (seratus dua puluh) jam per tahun.

II. DEFINISI

Dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Lampung;
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Lampung;
3. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung;
4. Gubernur adalah Gubernur Lampung;
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
6. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Lampung;
7. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
8. Aparat Pengawas Internal Pemerintah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal/Inspektorat/Unit Pengawasan Intern pada Kementerian/Kementerian Negara, Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat/ Unit Pengawasan Intern pada Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara, Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota, dan Unit Pengawasan Intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang undangan;
9. Auditor adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga dan/atau pihak lain yang di dalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang;
10. Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (JFP2UPD) adalah Jabatan Fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren.
11. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan ditujukan untuk mewujudkan tercapainya

tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;

12. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
13. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah;
14. Auditi adalah orang/instansi pemerintah atau kegiatan, program, atau fungsi tertentu suatu entitas sebagai obyek penugasan Pemeriksaan intern oleh APIP;
15. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil/prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan;
16. Monitoring adalah suatu kegiatan mengamati secara seksama suatu keadaan atau kondisi, termasuk juga perilaku atau kegiatan tertentu, dengan tujuan agar semua data masukan atau informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan tersebut dapat menjadi landasan dalam mengambil keputusan tindakan selanjutnya yang diperlukan;
17. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan;
18. Pemeriksaan Kinerja adalah Audit atas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah yang terdiri atas audit aspek ekonomi, efisiensi, dan audit aspek efektivitas, serta ketaatan pada peraturan;
19. Pemeriksaan ketaatan adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui apakah suatu instansi telah mentaati peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan yang berlaku, baik yang ditetapkan oleh pihak intern instansi maupun pihak ekstern instansi tersebut;
20. Probit audit adalah pemeriksaan yang diberikan oleh APIP untuk melakukan pengawasan independen terhadap suatu proses pengadaan barang/jasa dan memberikan pendapat atau simpulan yang obyektif mengenai apakah proses pengadaan barang/jasa telah sesuai dengan persyaratan kejujuran, yakni telah mematuhi prosedur pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan perundangan yang berlaku, serta prinsip-prinsip dan etika pengadaan barang/jasa. Probit audit juga merupakan upaya untuk memperkuat pengendalian intern dan manajemen risiko pengadaan barang/jasa melalui peran APIP;

21. Audit Dengan Tujuan Tertentu adalah audit yang dilakukan dengan tujuan khusus di luar audit keuangan dan audit kinerja. Termasuk dalam kategori ini antara lain Audit Khusus/Investigatif/Tindak Pidana Korupsi dan Audit untuk Tujuan Tertentu Lainnya terhadap masalah yang menjadi fokus perhatian pimpinan organisasi (auditi) atau yang bersifat khas;
22. Audit Investigatif adalah proses mencari, menemukan, dan mengumpulkan bukti secara sistematis yang bertujuan mengungkapkan terjadi atau tidaknya suatu perbuatan dan pelakunya guna dilakukan tindakan hukum selanjutnya.

III. TUJUAN DAN SASARAN

Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) pada Inspektorat Provinsi Lampung tahun 2025 bertujuan:

1. Sebagai pedoman dalam melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah provinsi Lampung;
2. Mensinergikan rencana kegiatan pengawasan APIP, sehingga seluruh penugasan dapat terakomodir seluruhnya dan mencegah tumpang tindih pemeriksaan dengan pengawas eksternal.

Sasaran yang ingin diwujudkan dari PKPT Inspektorat Provinsi Lampung Tahun 2025 ini adalah:

1. Sebagai pedoman dalam melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah provinsi Lampung;
2. Mensinergikan rencana kegiatan pengawasan APIP, sehingga seluruh penugasan dapat terakomodir seluruhnya dan mencegah tumpang tindih pemeriksaan dengan pengawas eksternal.

Sasaran yang ingin diwujudkan dari PKPT Inspektorat Provinsi Lampung Tahun 2025 ini adalah:

1. Terlaksananya pengawasan termasuk didalamnya kegiatan penguatan pengawasan, secara efisien, efektif dan ekonomis;
2. Meningkatnya kepatuhan terhadap peraturan perundangan pengelolaan keuangan negara.

IV. MEKANISME PELAKSANAAN PENGAWASAN

1. Ketentuan Umum

- a. Program Pemeriksaan dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pelaporan dilakukan secara efisien dan efektif.
- b. Penugasan APIP dihindarkan dari konflik kepentingan (*conflict of interest*)
- c. Setiap pelaksanaan pemeriksaan/audit berpedoman pada Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan.

2. Kriteria Penetapan Pelaksanaan pengawasan

- a. Penetapan hari pemeriksaan ditetapkan berdasarkan jenis kegiatan.
- b. Susunan Tim pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terdiri dari :

No	Peran	Keterangan
1.	Penanggung Jawab	Inspektur
2.	Pembantu/Wakil Penanggung Jawab	Inspektur Pembantu
3.	Pengendali Teknis	Pejabat Fungsional Auditor/PPUPD Madya.
4.	Ketua Tim	Auditor/PPUPD Madya, Muda.
5.	Anggota Tim	Auditor/PPUPD Madya, Muda. Auditor/PPUPD Pertama, Auditor Trampil, dan Pelaksana Bersertifikat

Dasar Penyusunan Tim mempertimbangkan:

- 1. Kompetensi dan kapabilitas
- 2. Pengalamam.
- 3. Ruang lingkup pembinaan dan pengawasan.
- 4. Keseimbangan tim
- 5. Risiko pembinaan dan pengawasan.
- 6. Jarak dan lokasi pembinaan dan pengawasan.

V. ANGGARAN

Anggaran Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Inspektorat Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	48.209.479.613,00
2	Program Penyelenggaraan Pengawasan	2.259.933.100,00
3	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi.	178.243.800,00
TOTAL		50.647.656.513,00

VI. PENUTUP

Demikian Program kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Berbasis Risiko Inspektorat Provinsi Lampung Tahun 2025 disusun untuk menjadi Pedoman/panduan dalam pelaksanaan tugas-tugas pembinaan dan pengawasan di Provinsi Lampung.

GUBERNUR LAMPUNG,



RAHMAT MIRZANI DJAUSAL

C. Pengawasan Rutin yang dilakukan Inspektorat Daerah antara lain:

1 Reviu Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Rencana Keuangan Daerah dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018, Surat Inspektur Jenderal Nomor 700.1.2.8/303/U tanggal 14 Februari 2023 Hal Pedoman Reviu Rencana Pembangunan Daerah SE 2022 dan Surat Inspektur Jenderal Nomor 700.1.2.8/1137/UJ tanggal 26 April 2024 Hal Modul Reviu RKA berbasis SIPD (e-Reviu);

No.	KEGIATAN BINWAS	PERANGKAT DAERAH/KABUPATEN/KOTA	FOKUS DAN SASARAN	Jadwal (M.B.T)		Hari Penugasan						Anggaran	Laporan	SARPPRAS	KET
				RMP	RPL	PJ	WK/PJ	PT	KT	AT	Jmlh				
-1	-2	-3	-4	-5		-6						-7	-8	-9	-10
A. REVU RKKPD 2026															
1	Revu RKKPD 2026	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Melakukan Revu RKKPD mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018	01.07.25	14.07.25		3	3	3	9	18	2.700.000	1 Laporan	komputer LCD Printer	PPUPD
B. REVU RKKPD PERUBAHAN 2025															
1	REVU RKKPD PERUBAHAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Melakukan Revu RKKPD Perubahan dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018	07.04.25	14.04.25		3	3	3	9	18	2.700.000	1 Laporan	komputer LCD Printer	PPUPD
C. REVU RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2026															
1	REVU Rencana Kerja Perangkat Daerah 2026	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan	Melakukan Revu RENJA PD mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018	02.06.25	15.06.25		2	2	2	6	12	Tentatif APBD-P	1 Laporan	komputer LCD Printer	PPUPD
2	REVU Rencana Kerja Perangkat Daerah 2026	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Melakukan Revu RENJA PD mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018	02.06.25	15.06.25		2	2	2	6	12	Tentatif APBD-P	1 Laporan	komputer LCD Printer	PPUPD
3	REVU Rencana Kerja Perangkat Daerah 2026	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Melakukan Revu RENJA PD mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018	02.06.25	15.06.25		2	2	2	6	12	Tentatif APBD-P	1 Laporan	komputer LCD Printer	PPUPD
4	REVU Rencana Kerja Perangkat Daerah 2026	Badan Pendapatan Daerah	Melakukan Revu RENJA PD mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018	02.06.25	15.06.25		2	2	2	6	12	Tentatif APBD-P	1 Laporan	komputer LCD Printer	PPUPD
5	REVU Rencana Kerja Perangkat Daerah 2026	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Melakukan Revu RENJA PD mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018	02.06.25	15.06.25		2	2	2	6	12	Tentatif APBD-P	1 Laporan	komputer LCD Printer	PPUPD
6	REVU Rencana Kerja Perangkat Daerah 2026	Dinas Kelautan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	Melakukan Revu RENJA PD mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018	02.06.25	15.06.25		2	2	2	6	12	Tentatif APBD-P	1 Laporan	komputer LCD Printer	PPUPD
7	REVU Rencana Kerja Perangkat Daerah 2026	Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Melakukan Revu RENJA PD mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018	02.06.25	15.06.25		2	2	2	6	12	Tentatif APBD-P	1 Laporan	komputer LCD Printer	PPUPD

No.	KEGIATAN BINWAS	PERANGKAT DAERAH/KABUPATEN/ KOTA	FOKUS DAN SASARAN	Jadwal (M.B.T)		Hari Penugasan							Anggaran	Laporan	SARPRAS	KET
				RMP	RPL	PJ	Wk/ PJ	PT	KT	AT	Jmlh					
8	REVIU Rencana Kerja Perangkat Daerah 2026	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	Melakukan Revu RENJA PD mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018	02.06.25	15.06.25		2	2	2	6	12	Tentatif APBD-P	1 Laporan	komputer LCD Printer	PPUPD	
9	REVIU Rencana Kerja Perangkat Daerah 2026	Dinas Perkebunan	Melakukan Revu RENJA PD mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018	02.06.25	15.06.25		2	2	2	6	12	Tentatif APBD-P	1 Laporan	komputer LCD Printer	PPUPD	
10	REVIU Rencana Kerja Perangkat Daerah 2026	Biro Perekonomian	Melakukan Revu RENJA PD mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018	02.06.25	15.06.25		2	2	2	6	12	Tentatif APBD-P	1 Laporan	komputer LCD Printer	PPUPD	
11	REVIU Rencana Kerja Perangkat Daerah 2026	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	Melakukan Revu RENJA PD mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018	15.09.25	26.09.25		3	3	3	9	18	Tentatif APBD-P	1 Laporan	komputer LCD Printer	PPUPD	
12	REVIU Rencana Kerja Perangkat Daerah 2026	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Melakukan Revu RENJA PD mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018	15.09.25	26.09.25		3	3	3	9	18	Tentatif APBD-P	1 Laporan	komputer LCD Printer	PPUPD	
13	REVIU Rencana Kerja Perangkat Daerah 2026	Dinas Kelautan dan Perikanan	Melakukan Revu RENJA PD mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018	15.09.25	26.09.25		3	3	3	9	18	Tentatif APBD-P	1 Laporan	komputer LCD Printer	PPUPD	
14	REVIU Rencana Kerja Perangkat Daerah 2026	Rumah Sakit Jiwa	Melakukan Revu RENJA PD mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018	09.06.25	09.06.25			1	1	1	3	450.000	1 Laporan	komputer LCD Printer	PPUPD	
15	REVIU Rencana Kerja Perangkat Daerah 2026	Dinas Sosial	Melakukan Revu RENJA PD mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018	09.06.25	09.06.25			1	1	1	3	450.000	1 Laporan	komputer LCD Printer	PPUPD	
16	REVIU Rencana Kerja Perangkat Daerah 2026	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdul Moeloe	Melakukan Revu RENJA PD mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018	16.06.25	16.06.25			1	1	1	3	450.000	1 Laporan	komputer LCD Printer	PPUPD	
17	REVIU Rencana Kerja Perangkat Daerah 2026	Dinas Pemuda dan Olahraga	Melakukan Revu RENJA PD mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018	09.6.25	09.6.25			1	1	1	3	450.000	1 Laporan	komputer LCD Printer	PPUPD	
18	REVIU Rencana Kerja Perangkat Daerah 2026	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	Melakukan Revu RENJA PD mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018	02.06.25	13.06.25			1	1	1	3	1.800.000	1 Laporan	komputer LCD Printer	PPUPD	
19	REVIU Rencana Kerja Perangkat Daerah 2026	Dinas Lingkungan Hidup	Melakukan Revu RENJA PD mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018	02.06.25	13.06.25								1 Laporan	komputer LCD Printer	PPUPD	

No.	KEGIATAN BINWAS	PERANGKAT DAERAH/KABUPATEN/ KOTA	FOKUS DAN SASARAN	Jadwal (M.B.T)		Hari Penugasan						Anggaran	Laporan	SARPPRAS	KET
				RMP	RPL	PJ	WK/ PJ	PT	KT	AT	Jmlh				
20	REVIU Rencana Kerja Perangkat Daerah 2026	Dinas Kehutanan	Melakukan Reviu RENJA PD mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018	02.06.25	13.06.25								1 Laporan	komputer LCD Printer	PPUPD
21	REVIU Rencana Kerja Perangkat Daerah 2026	Biro Administrasi Pembangunan	Melakukan Reviu RENJA PD mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018	02.06.25	13.06.25								1 Laporan	komputer LCD Printer	PPUPD
22	REVIU Rencana Kerja Perangkat Daerah 2026	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	Melakukan Reviu RENJA PD mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018	02.06.25	06.06.25				1	1	2	1.350.000	1 Laporan	komputer LCD Printer	PPUPD
23	REVIU Rencana Kerja Perangkat Daerah 2026	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Melakukan Reviu RENJA PD mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018	02.06.25	06.06.25								1 Laporan	komputer LCD Printer	PPUPD
24	REVIU Rencana Kerja Perangkat Daerah 2026	Dinas Perhubungan	Melakukan Reviu RENJA PD mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018	02.06.25	06.06.25								1 Laporan	komputer LCD Printer	PPUPD
25	REVIU Rencana Kerja Perangkat Daerah 2026	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi	Melakukan Reviu RENJA PD mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018	18.08.25	22.08.25	1	1	1	1	1	3	1.350.000	1 laporan	komputer LCD Printer	PPUPD
26	REVIU Rencana Kerja Perangkat Daerah 2026	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Melakukan Reviu RENJA PD mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018										1 laporan	komputer LCD Printer	PPUPD
27	REVIU Rencana Kerja Perangkat Daerah 2026	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Melakukan Reviu RENJA PD mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018										1 laporan	komputer LCD Printer	PPUPD
28	REVIU Rencana Kerja Perangkat Daerah 2026	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	Melakukan Reviu RENJA PD mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018	02.06.25	20.06.25		1	1	1	3	6	900.000	1 Laporan	komputer LCD Printer	PPUPD
29	REVIU Rencana Kerja Perangkat Daerah 2026	Badan Kepegawaian Daerah	Melakukan Reviu RENJA PD mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018	02.06.25	20.06.25								1 Laporan	komputer LCD Printer	PPUPD
30	REVIU Rencana Kerja Perangkat Daerah 2026	Biro Tata Pemerintahan dan OTDA	Melakukan Reviu RENJA PD mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018	02.06.25	20.06.25								1 Laporan	komputer LCD Printer	PPUPD
31	REVIU Rencana Kerja Perangkat Daerah 2026	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Melakukan Reviu RENJA PD mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018	02.06.25	20.06.25		1	1	1	3	6	900.000	1 Laporan	komputer LCD Printer	PPUPD

No.	KEGIATAN BINWAS	PERANGKAT DAERAH/KABUPATEN/ KOTA	FOKUS DAN SASARAN	Jadwal (M.B.T)		Hari Penugasan							Anggaran	Laporan	SARPRAS	KET
				RMP	RPL	PJ	WK/ PJ	PT	KT	AT	Jmlh					
32	REVIU Rencana Kerja Perangkat Daerah 2026	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Melakukan Revu RENJA PD mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018	02.06.25	20.06.25									1 Laporan	komputer LCD Printer	PPUPD
33	REVIU Rencana Kerja Perangkat Daerah 2026	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Melakukan Revu RENJA PD mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018	02.06.25	20.06.25									1 Laporan	komputer LCD Printer	PPUPD
34	REVIU Rencana Kerja Perangkat Daerah 2026	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi	Melakukan Revu RENJA PD mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018	02.06.25	20.06.25		1	1	1	3	6	900.000	1 Laporan	komputer LCD Printer		PPUPD
35	REVIU Rencana Kerja Perangkat Daerah 2026	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah	Melakukan Revu RENJA PD mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018	02.06.25	20.06.25									1 Laporan	komputer LCD Printer	PPUPD
36	REVIU Rencana Kerja Perangkat Daerah 2026	Biro Hukum	Melakukan Revu RENJA PD mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018	02.06.25	20.06.25									1 Laporan	komputer LCD Printer	PPUPD
37	REVIU Rencana Kerja Perangkat Daerah 2026	Sekretariat DPRD	Melakukan Revu RENJA PD mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018	02.06.25	20.06.25		1	1	1	3	6	900.000	1 Laporan	komputer LCD Printer		PPUPD
38	REVIU Rencana Kerja Perangkat Daerah 2026	Satuan Polisi Pamong Praja	Melakukan Revu RENJA PD mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018	02.06.25	20.06.25									1 Laporan	komputer LCD Printer	PPUPD
39	REVIU Rencana Kerja Perangkat Daerah 2026	Biro Organisasi	Melakukan Revu RENJA PD mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018	02.06.25	20.06.25									1 Laporan	komputer LCD Printer	PPUPD
D. REVIU RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH 2025																
1	Reviu Renja Perubahan Perangkat Daerah 2025	Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Melakukan Revu RENJA Perubahan PD sesuai dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018	02.03.25	09.03.25		2	2	2	6	12	300.000	1 Laporan	komputer LCD Printer		PPUPD
2	Reviu Renja Perubahan Perangkat Daerah 2025	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	Melakukan Revu RENJA Perubahan PD sesuai dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018	02.03.25	09.03.25		2	2	2	6	12	300.000	1 Laporan	komputer LCD Printer		PPUPD
3	Reviu Renja Perubahan Perangkat Daerah 2025	Dinas Kebudayaan	Melakukan Revu RENJA Perubahan PD sesuai dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018	02.03.25	09.03.25		2	2	2	6	12	300.000	1 Laporan	komputer LCD Printer		PPUPD

No.	KEGIATAN BINWAS	PERANGKAT DAERAH/KABUPATEN/ KOTA	FOKUS DAN SASARAN	Jadwal (M.B.T)		Hari Penugasan							Anggaran	Laporan	SARPRAS	KET
				RMP	RPL	PJ	WK/ PJ	PT	KT	AT	Jmlh					
4	Revisi Renja Perubahan Perangkat Daerah 2025	Biro Perekonomian	Melakukan Revisi RENJA Perubahan PD sesuai dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018	02.03.25	09.03.25		2	2	2	6	12	300.000	1 Laporan	komputer LCD Printer	PPUPD	
5	Revisi Renja Perubahan Perangkat Daerah 2025	Badan Pendapatan Daerah	Melakukan Revisi RENJA Perubahan PD sesuai dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018	02.03.25	09.03.25		2	2	2	6	12	300.000	1 Laporan	komputer LCD Printer	PPUPD	
6	Revisi Renja Perubahan Perangkat Daerah 2025	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Melakukan Revisi RENJA Perubahan PD sesuai dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018	02.03.25	09.03.25		2	2	2	6	12	300.000	1 Laporan	komputer LCD Printer	PPUPD	
7	Revisi Renja Perubahan Perangkat Daerah 2025	Dinas Kelautanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	Melakukan Revisi RENJA Perubahan PD sesuai dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018	02.03.25	09.03.25		2	2	2	6	12	300.000	1 Laporan	komputer LCD Printer	PPUPD	
8	Revisi Renja Perubahan Perangkat Daerah 2025	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	Melakukan Revisi RENJA Perubahan PD sesuai dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018	17.03.25	28.03.25		2	2	2	6	12	300.000	1 Laporan	komputer LCD Printer	PPUPD	
9	Revisi Renja Perubahan Perangkat Daerah 2025	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Melakukan Revisi RENJA Perubahan PD sesuai dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018	17.03.25	28.03.25		2	2	2	6	12	300.000	1 Laporan	komputer LCD Printer	PPUPD	
10	Revisi Renja Perubahan Perangkat Daerah 2025	Dinas Kelautan dan Perikanan	Melakukan Revisi RENJA Perubahan PD sesuai dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018	17.03.25	28.03.25		2	2	2	6	12	300.000	1 Laporan	komputer LCD Printer	PPUPD	
11	Revisi Renja Perubahan Perangkat Daerah 2025	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan	Melakukan Revisi RENJA Perubahan PD sesuai dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018	02.03.25	09.03.25		2	2	2	6	12	300.000	1 Laporan	komputer LCD Printer	PPUPD	
12	Revisi Renja Perubahan Perangkat Daerah 2025	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Melakukan Revisi RENJA Perubahan PD sesuai dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018	02.03.25	09.03.25		2	2	2	6	12	300.000	1 Laporan	komputer LCD Printer	PPUPD	
13	Revisi Renja Perubahan Perangkat Daerah 2025	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Melakukan Revisi RENJA Perubahan PD sesuai dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018	02.03.25	09.03.25		2	2	2	6	12	300.000	1 Laporan	komputer LCD Printer	PPUPD	

No.	KEGIATAN BINWAS	PERANGKAT DAERAH/KABUPATEN/ KOTA	FOKUS DAN SASARAN	Jadwal (M.B.T)		Hari Penugasan						Anggaran	Laporan	SARPRAS	KET
				RMP	RPL	PJ	WK/ PJ	PT	KT	AT	Jmlh				
14	REVIU Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah 2025	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	Melakukan Reviu RENJA-P PD mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018	02.05.25	15.05.25			1	1	1	3	1.800.000	1 Laporan	komputer LCD Printer	PPUPD
15	REVIU Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah 2025	Dinas Lingkungan Hidup	Melakukan Reviu RENJA-P PD mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018	02.05.25	15.05.25								1 Laporan	komputer LCD Printer	PPUPD
16	REVIU Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah 2025	Dinas Kehutanan	Melakukan Reviu RENJA-P PD mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018	02.05.25	15.05.25								1 Laporan	komputer LCD Printer	PPUPD
17	REVIU Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah 2025	Biro Administrasi Pembangunan	Melakukan Reviu RENJA-P PD mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018	02.05.25	15.05.25								1 Laporan	komputer LCD Printer	PPUPD
18	REVIU Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah 2025	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	Melakukan Reviu RENJA-P PD mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018	05.05.25	09.05.25				1	1	2	1.350.000	1 Laporan	komputer LCD Printer	PPUPD
19	REVIU Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah 2025	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Melakukan Reviu RENJA-P PD mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018	05.05.25	09.05.25								1 Laporan	komputer LCD Printer	PPUPD
20	REVIU Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah 2025	Dinas Perhubungan	Melakukan Reviu RENJA-P PD mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018	05.05.25	09.05.25								1 Laporan	komputer LCD Printer	PPUPD
21	REVIU Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah 2025	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi	Melakukan Reviu RENJA-P PD mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018	04.08.25	08.08.25	1	1	1	1	1	3	1.350.000	1 laporan	komputer LCD Printer	PPUPD
22	REVIU Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah 2025	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Melakukan Reviu RENJA-P PD mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018	04.08.25	08.08.25								1 laporan	komputer LCD Printer	PPUPD
23	REVIU Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah 2025	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Melakukan Reviu RENJA-P PD mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018	04.08.25	08.08.25								1 laporan	komputer LCD Printer	PPUPD
24	REVIU Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah 2025	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	Melakukan Reviu RENJA-P PD mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018	05.05.25	23.05.25		1	1	1	3	6	900.000	1 laporan	komputer LCD Printer	PPUPD
25	REVIU Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah 2025	Badan Kepegawaian Daerah	Melakukan Reviu RENJA-P PD mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018										1 laporan	komputer LCD Printer	PPUPD

No.	KEGIATAN BINWAS	PERANGKAT DAERAH/KABUPATEN/ KOTA	FOKUS DAN SASARAN	Jadwal (M.B.T)			Hari Penugasan						Anggaran	Laporan	SARPRAS	KET
				RMP	RPL	PJ	WK/ PJ	PT	KT	AT	Jmlh					
26	REVIU Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah 2025	Biro Tata Pemerintahan dan OTDA	Melakukan Reviu RENJA-P PD mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018				1	1	1	3	6	900.000	1 laporan	komputer LCD Printer	PPUPD	
27	REVIU Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah 2025	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Melakukan Reviu RENJA-P PD mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018	05.05.25	23.05.25		1	1	1	3	6	900.000	1 laporan	komputer LCD Printer	PPUPD	
28	REVIU Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah 2025	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Melakukan Reviu RENJA-P PD mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018										1 laporan	komputer LCD Printer	PPUPD	
29	REVIU Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah 2025	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Melakukan Reviu RENJA-P PD mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018										1 laporan	komputer LCD Printer	PPUPD	
30	REVIU Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah 2025	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi	Melakukan Reviu RENJA-P PD mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018	05.05.25	23.05.25		1	1	1	3	6	900.000	1 laporan	komputer LCD Printer	PPUPD	
31	REVIU Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah 2025	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah	Melakukan Reviu RENJA-P PD mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018										1 laporan	komputer LCD Printer	PPUPD	
32	REVIU Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah 2025	Biro Hukum	Melakukan Reviu RENJA-P PD mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018										1 laporan	komputer LCD Printer	PPUPD	
33	REVIU Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah 2025	Sekretariat DPRD	Melakukan Reviu RENJA-P PD mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018	05.05.25	23.05.25		1	1	1	3	6	900.000	1 laporan	komputer LCD Printer	PPUPD	
34	REVIU Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah 2025	Satuan Polisi Pamong Praja	Melakukan Reviu RENJA-P PD mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018										1 laporan	komputer LCD Printer	PPUPD	
35	REVIU Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah 2025	Biro Organisasi	Melakukan Reviu RENJA-P PD mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018										1 laporan	komputer LCD Printer	PPUPD	
E. REVIU KUA-PPAS 2026																
1	REVIU KUA-PPAS 2026	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	Melakukan Reviu KUA-PPAS Perubahan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018	14.07.25	21.07.25	0	5	5	5	15	30	2.250.000	1 laporan	komputer LCD Printer	Auditor dan PPUPD	

F. REVIU KUA-PPAS PERUBAHAN 2025.

No.	KEGIATAN BINWAS	PERANGKAT DAERAH/KABUPATEN/ KOTA	FOKUS DAN SASARAN	Jadwal (M.B.T)		Hari Penugasan						Anggaran	Laporan	SARPRAS	KET
				RMP	RPL	PJ	WK/ PJ	PT	KT	AT	Jmlh				
1	REVIU KUA-PPAS PERUBAHAN	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	Melakukan Reviu KUA-PPAS kepada Perubahan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri	28.04.25	05.05.25		5	5	5	15	30	2.250.000	1 Laporan	komputer LCD Printer	Auditor dan PPUPD
G. Reviu Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah 2026															
1	REVIU Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah 2026	Badan Pendapatan Daerah	Melakukan Reviu RKA mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 dan Surat Inspektur Jenderal Nomor 700.1.2.8/1137/LJ tanggal 26 April 2024 Hal Modul Reviu RKA berbasis SIPD (e-Reviu);	17.06.25	30.06.25		1	1	1	3	6	Tentatif APBD-P	1 Laporan	komputer LCD Printer	Auditor dan PPUPD
2	REVIU Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah 2026	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Melakukan Reviu RKA mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 dan Surat Inspektur Jenderal Nomor 700.1.2.8/1137/LJ tanggal 26 April 2024 Hal Modul Reviu RKA berbasis SIPD (e-Reviu);	17.06.25	30.06.25		1	1	1	3	6	Tentatif APBD-P	1 Laporan	komputer LCD Printer	Auditor dan PPUPD
3	REVIU Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah 2026	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	Melakukan Reviu RKA mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 dan Surat Inspektur Jenderal Nomor 700.1.2.8/1137/LJ tanggal 26 April 2024 Hal Modul Reviu RKA berbasis SIPD (e-Reviu);	17.06.25	30.06.25		1	1	1	3	6	Tentatif APBD-P	1 Laporan	komputer LCD Printer	Auditor dan PPUPD
4	REVIU Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah 2026	Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Melakukan Reviu RKA mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 dan Surat Inspektur Jenderal Nomor 700.1.2.8/1137/LJ tanggal 26 April 2024 Hal Modul Reviu RKA berbasis SIPD (e-Reviu);	17.06.25	30.06.25		1	1	1	3	6	Tentatif APBD-P	1 Laporan	komputer LCD Printer	Auditor dan PPUPD
5	REVIU Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah 2026	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	Melakukan Reviu RKA mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 dan Surat Inspektur Jenderal Nomor 700.1.2.8/1137/LJ tanggal 26 April 2024 Hal Modul Reviu RKA berbasis SIPD (e-Reviu);	17.06.25	30.06.25		1	1	1	3	6	Tentatif APBD-P	1 Laporan	komputer LCD Printer	Auditor dan PPUPD

No.	KEGIATAN BINWAS	PERANGKAT DAERAH/KABUPATEN/ KOTA	FOKUS DAN SASARAN	Jadwal (M.B.T)		Hari Penugasan						Anggaran	Laporan	SARPRAS	KET
				RMP	RPL	PJ	WK/ PJ	PT	KT	AT	Jmlh				
6	REVIU Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah 2026	Dinas Perkebunan	Melakukan Reviu RKA mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 dan Surat Inspektur Jenderal Nomor 700.1.2.8/1137/IJ tanggal 26 April 2024 Hal Modul Reviu RKA berbasis SIPD (e-Reviu);	17.06.25	30.06.25		1	1	1	3	6	Tentatif APBD-P	1 Laporan	komputer LCD Printer	Auditor dan PPUPD
7	REVIU Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah 2026	Biro Perekonomian	Melakukan Reviu RKA mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 dan Surat Inspektur Jenderal Nomor 700.1.2.8/1137/IJ tanggal 26 April 2024 Hal Modul Reviu RKA berbasis SIPD (e-Reviu);	17.06.25	30.06.25		1	1	1	3	6	Tentatif APBD-P	1 Laporan	komputer LCD Printer	Auditor dan PPUPD
8	REVIU Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah 2026	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan	Melakukan Reviu RKA mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 dan Surat Inspektur Jenderal Nomor 700.1.2.8/1137/IJ tanggal 26 April 2024 Hal Modul Reviu RKA berbasis SIPD (e-Reviu);	17.06.25	30.06.25		1	1	1	3	6	Tentatif APBD-P	1 Laporan	komputer LCD Printer	Auditor dan PPUPD
9	REVIU Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah 2026	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Melakukan Reviu RKA mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 dan Surat Inspektur Jenderal Nomor 700.1.2.8/1137/IJ tanggal 26 April 2024 Hal Modul Reviu RKA berbasis SIPD (e-Reviu);	17.06.25	30.06.25		1	1	1	3	6	Tentatif APBD-P	1 Laporan	komputer LCD Printer	Auditor dan PPUPD
10	REVIU Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah 2026	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Melakukan Reviu RKA mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 dan Surat Inspektur Jenderal Nomor 700.1.2.8/1137/IJ tanggal 26 April 2024 Hal Modul Reviu RKA berbasis SIPD (e-Reviu);	17.06.25	30.06.25		1	1	1	3	6	Tentatif APBD-P	1 Laporan	komputer LCD Printer	Auditor dan PPUPD
11	REVIU Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah 2026	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	Melakukan Reviu RKA mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 dan Surat Inspektur Jenderal Nomor 700.1.2.8/1137/IJ tanggal 26 April 2024 Hal Modul Reviu RKA berbasis SIPD (e-Reviu);	27.10.25	10.11.25		1	1	1	3	6	Tentatif APBD-P	1 Laporan	komputer LCD Printer	Auditor dan PPUPD

No.	KEGIATAN BINWAS	PERANGKAT DAERAH/KABUPATEN/KOTA	FOKUS DAN SASARAN	Jadwal (M.B.T)		Hari Penugasan						Anggaran	Laporan	SARPRAS	KET
				RMP	RPL	PJ	WK/PJ	PT	KT	AT	Jmlh				
12	REVIU Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah 2026	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Melakukan Reviu RKA mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 dan Surat Inspektur Jenderal Nomor 700.1.2.8/1137/IJ tanggal 26 April 2024 Hal Modul Reviu RKA berbasis SIPD (e-Reviu);	27.10.25	10.11.25		1	1	1	3	6	Tentatif APBD-P	1 Laporan	komputer LCD Printer	Auditor dan PPUPD
13	REVIU Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah 2026	Dinas Kelautan dan Perikanan	Melakukan Reviu RKA mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 dan Surat Inspektur Jenderal Nomor 700.1.2.8/1137/IJ tanggal 26 April 2024 Hal Modul Reviu RKA berbasis SIPD (e-Reviu);	27.10.25	10.11.25		1	1	1	3	6	Tentatif APBD-P	1 Laporan	komputer LCD Printer	Auditor dan PPUPD
14	REVIU Rencana Kerja Anggaran 2026	Rumah Sakit Jiwa	Melakukan Reviu RKA mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 dan Surat Inspektur Jenderal Nomor 700.1.2.8/1137/IJ tanggal 26 April 2024 Hal Modul Reviu RKA berbasis SIPD (e-Reviu);	10.06.25	10.06.25			1	1	1	3	150.000,00	1 Laporan	komputer LCD Printer	PPUPD
15	REVIU Rencana Kerja Anggaran 2026	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Melakukan Reviu RKA mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 dan Surat Inspektur Jenderal Nomor 700.1.2.8/1137/IJ tanggal 26 April 2024 Hal Modul Reviu RKA berbasis SIPD (e-Reviu);	10.06.25	10.06.25			1	1	1	3	150.000,00	1 Laporan	komputer LCD Printer	PPUPD
16	REVIU Rencana Kerja Anggaran 2026	Biro Administrasi Pimpinan	Melakukan Reviu RKA mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 dan Surat Inspektur Jenderal Nomor 700.1.2.8/1137/IJ tanggal 26 April 2024 Hal Modul Reviu RKA berbasis SIPD (e-Reviu);	10.06.25	10.06.25			1	1	1	3	150.000,00	1 Laporan	komputer LCD Printer	PPUPD
17	REVIU Rencana Kerja Anggaran 2026	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdul Moeloe	Melakukan Reviu RKA mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 dan Surat Inspektur Jenderal Nomor 700.1.2.8/1137/IJ tanggal 26 April 2024 Hal Modul Reviu RKA berbasis SIPD (e-Reviu);	11.06.25	11.06.25			1	1	1	3	150.000,00	1 Laporan	komputer LCD Printer	PPUPD

No.	KEGIATAN BINWAS	PERANGKAT DAERAH/KABUPATEN/KOTA	FOKUS DAN SASARAN	Jadwal (M.B.T)		Hari Penugasan						Anggaran	Laporan	SARPRAS	KET
				RMP	RPL	PJ	WK/PJ	PT	KT	AT	Jmlh				
18	REVIU Rencana Kerja Anggaran 2026	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Melakukan Reviu RKA mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 dan Surat Inspektur Jenderal Nomor 700.1.2.8/1137/IJ tanggal 26 April 2024 Hal Modul Reviu RKA berbasis SIPD (e-Reviu);	12.06.25	12.06.25			1	1	1	3	150.000,00	1 Laporan	komputer LCD Printer	PPUPD
19	REVIU Rencana Kerja Anggaran 2026	Biro Umum	Melakukan Reviu RKA mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 dan Surat Inspektur Jenderal Nomor 700.1.2.8/1137/IJ tanggal 26 April 2024 Hal Modul Reviu RKA berbasis SIPD (e-Reviu);	13.06.25	13.06.25			1	1	1	3	150.000,00	1 Laporan	komputer LCD Printer	PPUPD
20	REVIU Rencana Kerja Anggaran 2026	Dinas Sosial	Melakukan Reviu RKA mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 dan Surat Inspektur Jenderal Nomor 700.1.2.8/1137/IJ tanggal 26 April 2024 Hal Modul Reviu RKA berbasis SIPD (e-Reviu);	13.06.25	13.06.25			1	1	1	3	150.000,00	1 Laporan	komputer LCD Printer	PPUPD
21	REVIU Rencana Kerja Anggaran 2026	Dinas Kesehatan	Melakukan Reviu RKA mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 dan Surat Inspektur Jenderal Nomor 700.1.2.8/1137/IJ tanggal 26 April 2024 Hal Modul Reviu RKA berbasis SIPD (e-Reviu);	13.06.25	13.06.25			1	1	1	3	150.000,00	1 Laporan	komputer LCD Printer	PPUPD
22	REVIU Rencana Kerja Anggaran 2026	Dinas Tenaga Kerja	Melakukan Reviu RKA mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 dan Surat Inspektur Jenderal Nomor 700.1.2.8/1137/IJ tanggal 26 April 2024 Hal Modul Reviu RKA berbasis SIPD (e-Reviu);	13.06.25	13.06.25			1	1	1	3	150.000,00	1 Laporan	komputer LCD Printer	Auditor dan PPUPD
23	REVIU Rencana Kerja Anggaran 2026	Dinas Pemuda dan Olahraga	Melakukan Reviu RKA mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 dan Surat Inspektur Jenderal Nomor 700.1.2.8/1137/IJ tanggal 26 April 2024 Hal Modul Reviu RKA berbasis SIPD (e-Reviu);	10.06.25	10.06.25			1	1	1	3	150.000,00	1 Laporan	komputer LCD Printer	Auditor dan PPUPD

No.	KEGIATAN BINWAS	PERANGKAT DAERAH/KABUPATEN/KOTA	FOKUS DAN SASARAN	Jadwal (M.B.T)		Hari Penugasan						Anggaran	Laporan	SARPRAS	KET
				RMP	RPL	PJ	WK/PJ	PT	KT	AT	Jmlh				
24	REVIU Rencana Kerja Anggaran 2026	Badan Penghubung	Melakukan Reviu RKA mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 dan Surat Inspektur Jenderal Nomor 700.1.2.8/1137/IJ tanggal 26 April 2024 Hal Modul Reviu RKA berbasis SIPD (e-Reviu);	10.06.25	10.06.25								1 Laporan	komputer LCD Printer	Auditor dan PPUPD
25	REVIU Rencana Kerja Anggaran 2026	Biro Kesejahteraan Rakyat	Melakukan Reviu RKA mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 dan Surat Inspektur Jenderal Nomor 700.1.2.8/1137/IJ tanggal 26 April 2024 Hal Modul Reviu RKA berbasis SIPD (e-Reviu);	10.06.25	10.06.25			1	1	1	3	150.000,00	1 Laporan	komputer LCD Printer	Auditor dan PPUPD
26	REVIU Rencana Kerja Anggaran 2026	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	Melakukan Reviu RKA mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 dan Surat Inspektur Jenderal Nomor 700.1.2.8/1137/IJ tanggal 26 April 2024 Hal Modul Reviu RKA berbasis SIPD (e-Reviu);	27.05.25	05.06.25		1	1	1	1	4	600.000	1 laporan	komputer LCD Printer	Auditor dan PPUPD
27	REVIU Rencana Kerja Anggaran 2026	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Melakukan Reviu RKA mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 dan Surat Inspektur Jenderal Nomor 700.1.2.8/1137/IJ tanggal 26 April 2024 Hal Modul Reviu RKA berbasis SIPD (e-Reviu);	28.05.25	05.06.25			1	1	1	3	450.000	1 laporan	komputer LCD Printer	Auditor dan PPUPD
28	REVIU Rencana Kerja Anggaran 2026	Dinas Perhubungan	Melakukan Reviu RKA mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 dan Surat Inspektur Jenderal Nomor 700.1.2.8/1137/IJ tanggal 26 April 2024 Hal Modul Reviu RKA berbasis SIPD (e-Reviu);	30.05.25	05.06.25			1	1	1	3	450.000	1 laporan	komputer LCD Printer	Auditor dan PPUPD
29	REVIU Rencana Kerja Anggaran 2026	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	Melakukan Reviu RKA mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 dan Surat Inspektur Jenderal Nomor 700.1.2.8/1137/IJ tanggal 26 April 2024 Hal Modul Reviu RKA berbasis SIPD (e-Reviu);	16.06.25	18.06.25			3	3	6	12	600.000	1 Laporan	komputer LCD Printer	Auditor dan PPUPD

No.	KEGIATAN BINWAS	PERANGKAT DAERAH/KABUPATEN/ KOTA	FOKUS DAN SASARAN	Jadwal (M.B.T)		Hari Penugasan						Anggaran	Laporan	SARPRAS	KET
				RMP	RPL	PJ	WK/ PJ	PT	KT	AT	Jmlh				
30	REVIU Rencana Kerja Anggaran 2026	Dinas Kehutanan	Melakukan Reviu RKA mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 dan Surat Inspektur Jenderal Nomor 700.1.2.8/1137/IJ tanggal 26 April 2024 Hal Modul Reviu RKA berbasis SIPD (e-Reviu);	19.06.25	20.06.25			2	2	4	8	600.000	1 Laporan	komputer LCD Printer	Auditor dan PPUPD
31	REVIU Rencana Kerja Anggaran 2026	Dinas Lingkungan Hidup	Melakukan Reviu RKA mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 dan Surat Inspektur Jenderal Nomor 700.1.2.8/1137/IJ tanggal 26 April 2024 Hal Modul Reviu RKA berbasis SIPD (e-Reviu);	16.06.25	18.06.25			3	3	3	9	450.000	1 Laporan	komputer LCD Printer	Auditor dan PPUPD
32	REVIU Rencana Kerja Anggaran 2026	Biro Administrasi Pembangunan	Melakukan Reviu RKA mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 dan Surat Inspektur Jenderal Nomor 700.1.2.8/1137/IJ tanggal 26 April 2024 Hal Modul Reviu RKA berbasis SIPD (e-Reviu);	19.06.25	20.06.25			2	2	2	6	450.000	1 Laporan	komputer LCD Printer	Auditor dan PPUPD
33	REVIU Rencana Kerja Anggaran 2026	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi	Melakukan Reviu RKA mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 dan Surat Inspektur Jenderal Nomor 700.1.2.8/1137/IJ tanggal 26 April 2024 Hal Modul Reviu RKA berbasis SIPD (e-Reviu);	11.08.25	15.08.25	1	1	1	1	1	3	450.000	1 Laporan	komputer LCD Printer	Auditor dan PPUPD
34	REVIU Rencana Kerja Anggaran 2026	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Melakukan Reviu RKA mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 dan Surat Inspektur Jenderal Nomor 700.1.2.8/1137/IJ tanggal 26 April 2024 Hal Modul Reviu RKA berbasis SIPD (e-Reviu);	11.08.25	15.08.25	1	1	1	1	1	3	450.000	1 Laporan	komputer LCD Printer	Auditor dan PPUPD
35	REVIU Rencana Kerja Anggaran 2026	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Melakukan Reviu RKA mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 dan Surat Inspektur Jenderal Nomor 700.1.2.8/1137/IJ tanggal 26 April 2024 Hal Modul Reviu RKA berbasis SIPD (e-Reviu);	11.08.25	15.08.25	1	1	1	1	1	3	450.000	1 Laporan	komputer LCD Printer	Auditor dan PPUPD

No.	KEGIATAN BINWAS	PERANGKAT DAERAH/KABUPATEN/KOTA	FOKUS DAN SASARAN	Jadwal (M.B.T)		Hari Penugasan						Anggaran	Laporan	SARPRAS	KET
				RMP	RPL	PJ	WK/PJ	PT	KT	AT	Jmlh				
36	REVIU Rencana Kerja Anggaran 2026	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	Melakukan Reviu RKA mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 dan Surat Inspektur Jenderal Nomor 700.1.2.8/1137/IJ tanggal 26 April 2024 Hal Modul Reviu RKA berbasis SIPD (e-Reviu);	16.06.25	30.06.25		1	1	1	3	6	900.000	1 Laporan	komputer LCD Printer	Auditor dan PPUPD
37	REVIU Rencana Kerja Anggaran 2026	Badan Kepegawaian Daerah	Melakukan Reviu RKA mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 dan Surat Inspektur Jenderal Nomor 700.1.2.8/1137/IJ tanggal 26 April 2024 Hal Modul Reviu RKA berbasis SIPD (e-Reviu);	16.06.25	30.06.25								1 Laporan	komputer LCD Printer	Auditor dan PPUPD
38	REVIU Rencana Kerja Anggaran 2026	Biro Tata Pemerintahan dan OTDA	Melakukan Reviu RKA mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 dan Surat Inspektur Jenderal Nomor 700.1.2.8/1137/IJ tanggal 26 April 2024 Hal Modul Reviu RKA berbasis SIPD (e-Reviu);	16.06.25	30.06.25								1 Laporan	komputer LCD Printer	Auditor dan PPUPD
39	REVIU Rencana Kerja Anggaran 2026	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Melakukan Reviu RKA mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 dan Surat Inspektur Jenderal Nomor 700.1.2.8/1137/IJ tanggal 26 April 2024 Hal Modul Reviu RKA berbasis SIPD (e-Reviu);	16.06.25	30.06.25		1	1	1	3	6	900.000	1 Laporan	komputer LCD Printer	Auditor dan PPUPD
40	REVIU Rencana Kerja Anggaran 2026	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Melakukan Reviu RKA mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 dan Surat Inspektur Jenderal Nomor 700.1.2.8/1137/IJ tanggal 26 April 2024 Hal Modul Reviu RKA berbasis SIPD (e-Reviu);	16.06.25	30.06.25								1 Laporan	komputer LCD Printer	Auditor dan PPUPD
41	REVIU Rencana Kerja Anggaran 2026	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Melakukan Reviu RKA mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 dan Surat Inspektur Jenderal Nomor 700.1.2.8/1137/IJ tanggal 26 April 2024 Hal Modul Reviu RKA berbasis SIPD (e-Reviu);	16.06.25	30.06.25								1 Laporan	komputer LCD Printer	Auditor dan PPUPD

No.	KEGIATAN BINWAS	PERANGKAT DAERAH/KABUPATEN/KOTA	FOKUS DAN SASARAN	Jadwal (M.B.T)		Hari Penugasan						Anggaran	Laporan	SARPRAS	KET
				RMP	RPL	PJ	WK/PJ	PT	KT	AT	Jmlh				
42	REVIU Rencana Kerja Anggaran 2026	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi	Melakukan Reviu RKA mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 dan Surat Inspektur Jenderal Nomor 700.1.2.8/1137/LJ tanggal 26 April 2024 Hal Modul Reviu RKA berbasis SIPD (e-Reviu);	16.06.25	30.06.25		1	1	1	3	6	900.000	1 Laporan	komputer LCD Printer	Auditor dan PPUPD
43	REVIU Rencana Kerja Anggaran 2026	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah	Melakukan Reviu RKA mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 dan Surat Inspektur Jenderal Nomor 700.1.2.8/1137/LJ tanggal 26 April 2024 Hal Modul Reviu RKA berbasis SIPD (e-Reviu);	16.06.25	30.06.25								1 Laporan	komputer LCD Printer	Auditor dan PPUPD
44	REVIU Rencana Kerja Anggaran 2026	Biro Hukum	Melakukan Reviu RKA mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 dan Surat Inspektur Jenderal Nomor 700.1.2.8/1137/LJ tanggal 26 April 2024 Hal Modul Reviu RKA berbasis SIPD (e-Reviu);	16.06.25	30.06.25								1 Laporan	komputer LCD Printer	Auditor dan PPUPD
45	REVIU Rencana Kerja Anggaran 2026	Sekretariat DPRD	Melakukan Reviu RKA mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 dan Surat Inspektur Jenderal Nomor 700.1.2.8/1137/LJ tanggal 26 April 2024 Hal Modul Reviu RKA berbasis SIPD (e-Reviu);	16.06.25	30.06.25		1	1	1	3	6	900.000	1 Laporan	komputer LCD Printer	Auditor dan PPUPD
46	REVIU Rencana Kerja Anggaran 2026	Satuan Polisi Pamong Praja	Melakukan Reviu RKA mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 dan Surat Inspektur Jenderal Nomor 700.1.2.8/1137/LJ tanggal 26 April 2024 Hal Modul Reviu RKA berbasis SIPD (e-Reviu);	16.06.25	30.06.25								1 Laporan	komputer LCD Printer	Auditor dan PPUPD
47	REVIU Rencana Kerja Anggaran 2026	Biro Organisasi	Melakukan Reviu RKA mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 dan Surat Inspektur Jenderal Nomor 700.1.2.8/1137/LJ tanggal 26 April 2024 Hal Modul Reviu RKA berbasis SIPD (e-Reviu);	16.06.25	30.06.25								1 Laporan	komputer LCD Printer	Auditor dan PPUPD

No.	KEGIATAN BINWAS	PERANGKAT DAERAH/KABUPATEN/ KOTA	FOKUS DAN SASARAN	Jadwal (M.B.T)		PJ	WK/ PJ	Hari Penugasan				Anggaran	Laporan	SARPRAS	KET
				RMP	RPL			PT	KT	AT	Jmlh				
1	Reviu Rencana Kerja Anggaran Perubahan Perangkat Daerah 2025	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	Melakukan Reviu RKA-P mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 dan Surat Inspektur Jenderal Nomor 700.1.2.8/1137/IJ tanggal 26 April 2024 Hal Modul Reviu RKA berbasis SIPD (e-Reviu);	05.05.25	16.05.25		1	1	1	3	6	1.250.000	1 Laporan	komputer LCD Printer	Auditor dan PPUPD
2	Reviu Rencana Kerja Anggaran Perubahan Perangkat Daerah 2025	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Melakukan Reviu RKA-P mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 dan Surat Inspektur Jenderal Nomor 700.1.2.8/1137/IJ tanggal 26 April 2024 Hal Modul Reviu RKA berbasis SIPD (e-Reviu);	05.05.25	16.05.25		1	1	1	3	6		1 Laporan	komputer LCD Printer	Auditor dan PPUPD
3	Reviu Rencana Kerja Anggaran Perubahan Perangkat Daerah 2025	Dinas Kelautan dan Perikanan	Melakukan Reviu RKA-P mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 dan Surat Inspektur Jenderal Nomor 700.1.2.8/1137/IJ tanggal 26 April 2024 Hal Modul Reviu RKA berbasis SIPD (e-Reviu);	05.05.25	16.05.25		1	1	1	3	6		1 Laporan	komputer LCD Printer	Auditor dan PPUPD
4	Reviu Rencana Kerja Anggaran Perubahan Perangkat Daerah 2025	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan	Melakukan Reviu RKA-P mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 dan Surat Inspektur Jenderal Nomor 700.1.2.8/1137/IJ tanggal 26 April 2024 Hal Modul Reviu RKA berbasis SIPD (e-Reviu);	19.05.25	28.05.25		1	1	1	3	6	1.250.000	1 Laporan	komputer LCD Printer	Auditor dan PPUPD
5	Reviu Rencana Kerja Anggaran Perubahan Perangkat Daerah 2025	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Melakukan Reviu RKA-P mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 dan Surat Inspektur Jenderal Nomor 700.1.2.8/1137/IJ tanggal 26 April 2024 Hal Modul Reviu RKA berbasis SIPD (e-Reviu);	19.05.25	28.05.25		1	1	1	3	6		1 Laporan	komputer LCD Printer	Auditor dan PPUPD
6	Reviu Rencana Kerja Anggaran Perubahan Perangkat Daerah 2025	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Melakukan Reviu RKA-P mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 dan Surat Inspektur Jenderal Nomor 700.1.2.8/1137/IJ tanggal 26 April 2024 Hal Modul Reviu RKA berbasis SIPD (e-Reviu);	19.05.25	28.05.25		1	1	1	3	6		1 Laporan	komputer LCD Printer	Auditor dan PPUPD

No.	KEGIATAN BINWAS	PERANGKAT DAERAH/KABUPATEN/KOTA	FOKUS DAN SASARAN	Jadwal (M.B.T)		Hari Penugasan						Anggaran	Laporan	SARPRAS	KET	
				RMP	RPL	PJ	WK/PJ	PT	KT	AT	Jmlh					
7	Reviu Rencana Kerja Anggaran Perubahan Perangkat Daerah 2025	Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Melakukan Reviu RKA-P mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 dan Surat Inspektur Jenderal Nomor 700.1.2.8/1137/IJ tanggal 26 April 2024 Hal Modul Reviu RKA berbasis SIPD (e-Reviu);	19.05.25	28.05.25		1	1	1	1	3	6	1.600.000	1 Laporan	komputer LCD Printer	Auditor dan PPUPD
8	Reviu Rencana Kerja Anggaran Perubahan Perangkat Daerah 2025	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	Melakukan Reviu RKA-P mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 dan Surat Inspektur Jenderal Nomor 700.1.2.8/1137/IJ tanggal 26 April 2024 Hal Modul Reviu RKA berbasis SIPD (e-Reviu);	19.05.25	28.05.25		1	1	1	1	3	6		1 Laporan	komputer LCD Printer	Auditor dan PPUPD
9	Reviu Rencana Kerja Anggaran Perubahan Perangkat Daerah 2025	Dinas Perkebunan	Melakukan Reviu RKA-P mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 dan Surat Inspektur Jenderal Nomor 700.1.2.8/1137/IJ tanggal 26 April 2024 Hal Modul Reviu RKA berbasis SIPD (e-Reviu);	19.05.25	28.05.25		1	1	1	1	3	6		1 Laporan	komputer LCD Printer	Auditor dan PPUPD
10	Reviu Rencana Kerja Anggaran Perubahan Perangkat Daerah 2025	Biro Perekonomian	Melakukan Reviu RKA-P mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 dan Surat Inspektur Jenderal Nomor 700.1.2.8/1137/IJ tanggal 26 April 2024 Hal Modul Reviu RKA berbasis SIPD (e-Reviu);	19.05.25	28.05.25		1	1	1	1	3	6		1 Laporan	komputer LCD Printer	Auditor dan PPUPD
11	REVIU Rencana Kerja Anggaran Perubahan 2025	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	Melakukan Reviu RKA-P mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 dan Surat Inspektur Jenderal Nomor 700.1.2.8/1137/IJ tanggal 26 April 2024 Hal Modul Reviu RKA berbasis SIPD (e-Reviu);	21.05.25	23.05.25			3	3	6	12		600.000	1 laporan	komputer LCD Printer	Auditor dan PPUPD
12	REVIU Rencana Kerja Anggaran Perubahan 2025	Dinas Kchutanan	Melakukan Reviu RKA-P mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 dan Surat Inspektur Jenderal Nomor 700.1.2.8/1137/IJ tanggal 26 April 2024 Hal Modul Reviu RKA berbasis SIPD (e-Reviu);	21.05.25	23.05.25			3	3	3	9		450.000	1 laporan	komputer LCD Printer	Auditor dan PPUPD

No.	KEGIATAN BINWAS	PERANGKAT DAERAH/KABUPATEN/KOTA	FOKUS DAN SASARAN	Jadwal (M.B.T)		Hari Penugasan						Anggaran	Laporan	SARPRAS	KET
				RMP	RPL	PJ	WK/PJ	PT	KT	AT	Jmlh				
13	REVIU Rencana Kerja Anggaran Perubahan 2025	Dinas Lingkungan Hidup	Melakukan Reviu RKA-P mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 dan Surat Inspektur Jenderal Nomor 700.1.2.8/1137/IJ tanggal 26 April 2024 Hal Modul Reviu RKA berbasis SIPD (e-Reviu);	26.05.25	28.05.25			3	3	6	12	600.000	1 laporan	komputer LCD Printer	Auditor dan PPUPD
14	REVIU Rencana Kerja Anggaran Perubahan 2025	Biro Administrasi Pemerintahan	Melakukan Reviu RKA-P mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 dan Surat Inspektur Jenderal Nomor 700.1.2.8/1137/IJ tanggal 26 April 2024 Hal Modul Reviu RKA berbasis SIPD (e-Reviu);	26.05.25	28.05.25			3	3	3	9	450.000	1 laporan	komputer LCD Printer	Auditor dan PPUPD
15	REVIU Rencana Kerja Anggaran Perubahan 2025	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	Melakukan Reviu RKA-P mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 dan Surat Inspektur Jenderal Nomor 700.1.2.8/1137/IJ tanggal 26 April 2024 Hal Modul Reviu RKA berbasis SIPD (e-Reviu);	27.05.25	05.06.25	1		1	1	1	4	600.000	1 laporan	komputer LCD Printer	Auditor dan PPUPD
16	REVIU Rencana Kerja Anggaran Perubahan 2025	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Melakukan Reviu RKA-P mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 dan Surat Inspektur Jenderal Nomor 700.1.2.8/1137/IJ tanggal 26 April 2024 Hal Modul Reviu RKA berbasis SIPD (e-Reviu);	30.05.25	05.06.25			1	1	1	3	450.000	1 laporan	komputer LCD Printer	Auditor dan PPUPD
17	REVIU Rencana Kerja Anggaran Perubahan 2025	Dinas Perhubungan	Melakukan Reviu RKA-P mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 dan Surat Inspektur Jenderal Nomor 700.1.2.8/1137/IJ tanggal 26 April 2024 Hal Modul Reviu RKA berbasis SIPD (e-Reviu);	28.05.25	05.06.25			1	1	1	3	450.000	1 laporan	komputer LCD Printer	Auditor dan PPUPD
18	REVIU Rencana Kerja Anggaran Perubahan 2025	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi	Melakukan Reviu RKA-P mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 dan Surat Inspektur Jenderal Nomor 700.1.2.8/1137/IJ tanggal 26 April 2024 Hal Modul Reviu RKA berbasis SIPD (e-Reviu);	28.07.25	01.08.25	1	1	1	1	1	3	450.000	1 laporan	komputer LCD Printer	Auditor dan PPUPD

No.	KEGIATAN BINWAS	PERANGKAT DAERAH/KABUPATEN/ KOTA	FOKUS DAN SASARAN	Jadwal (M.B.T)		Hari Penugasan						Anggaran	Laporan	SARPRAS	KET
				RMP	RPL	PJ	WK/ PJ	PT	KT	AT	Jmlh				
19	REVIU Rencana Kerja Anggaran Perubahan 2025	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Melakukan Reviu RKA-P mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 dan Surat Inspektur Jenderal Nomor 700.1.2.8/1137/IJ tanggal 26 April 2024 Hal Modul Reviu RKA berbasis SIPD (e-Reviu);	28.07.25	01.08.25	1	1	1	1	1	3	450.000	1 laporan	komputer LCD Printer	Auditor dan PPUPD
20	REVIU Rencana Kerja Anggaran Perubahan 2025	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Melakukan Reviu RKA-P mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 dan Surat Inspektur Jenderal Nomor 700.1.2.8/1137/IJ tanggal 26 April 2024 Hal Modul Reviu RKA berbasis SIPD (e-Reviu);	28.07.25	01.08.25	1	1	1	1	1	3	450.000	1 laporan	komputer LCD Printer	Auditor dan PPUPD
21	Reviu Rencana Kerja Anggaran Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2025	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	Melakukan Reviu RKA-P mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 dan Surat Inspektur Jenderal Nomor 700.1.2.8/1137/IJ tanggal 26 April 2024 Hal Modul Reviu RKA berbasis SIPD (e-Reviu);	19.05.25	06.06.25		1	1	1	3	6	900.000	1 laporan	komputer LCD Printer	Auditor dan PPUPD
22	Reviu Rencana Kerja Anggaran Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2025	Badan Kepegawaian Daerah	Melakukan Reviu RKA-P mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 dan Surat Inspektur Jenderal Nomor 700.1.2.8/1137/IJ tanggal 26 April 2024 Hal Modul Reviu RKA berbasis SIPD (e-Reviu);	19.05.25	06.06.25								1 laporan	komputer LCD Printer	Auditor dan PPUPD
23	Reviu Rencana Kerja Anggaran Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2025	Biro Tata Pemerintahan dan OTDA	Melakukan Reviu RKA-P mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 dan Surat Inspektur Jenderal Nomor 700.1.2.8/1137/IJ tanggal 26 April 2024 Hal Modul Reviu RKA berbasis SIPD (e-Reviu);	19.05.25	06.06.25								1 laporan	komputer LCD Printer	Auditor dan PPUPD
24	Reviu Rencana Kerja Anggaran Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2025	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Melakukan Reviu RKA-P mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 dan Surat Inspektur Jenderal Nomor 700.1.2.8/1137/IJ tanggal 26 April 2024 Hal Modul Reviu RKA berbasis SIPD (e-Reviu);	19.05.25	06.06.25		1	1	1	3	6	900.000	1 laporan	komputer LCD Printer	Auditor dan PPUPD

No.	KEGIATAN BINWAS	PERANGKAT DAERAH/KABUPATEN/ KOTA	FOKUS DAN SASARAN	Jadwal (M.B.T)		Hari Penugasan						Anggaran	Laporan	SARPRAS	KET
				RMP	RPL	PJ	WK/ PJ	PT	KT	AT	Jmlh				
25	Reviu Rencana Kerja Anggaran Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2025	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Melakukan Reviu RKA-P mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 dan Surat Inspektur Jenderal Nomor 700.1.2.8/1137/IJ tanggal 26 April 2024 Hal Modul Reviu RKA berbasis SIPD (e-Reviu);	19.05.25	06.06.25								1 laporan	komputer LCD Printer	Auditor dan PPUPD
26	Reviu Rencana Kerja Anggaran Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2025	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Melakukan Reviu RKA-P mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 dan Surat Inspektur Jenderal Nomor 700.1.2.8/1137/IJ tanggal 26 April 2024 Hal Modul Reviu RKA berbasis SIPD (e-Reviu);	19.05.25	06.06.25								1 laporan	komputer LCD Printer	Auditor dan PPUPD
27	Reviu Rencana Kerja Anggaran Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2025	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi	Melakukan Reviu RKA-P mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 dan Surat Inspektur Jenderal Nomor 700.1.2.8/1137/IJ tanggal 26 April 2024 Hal Modul Reviu RKA berbasis SIPD (e-Reviu);	19.05.25	06.06.25	1	1	1	1	3	6	900.000	1 laporan	komputer LCD Printer	Auditor dan PPUPD
28	Reviu Rencana Kerja Anggaran Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2025	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah	Melakukan Reviu RKA-P mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 dan Surat Inspektur Jenderal Nomor 700.1.2.8/1137/IJ tanggal 26 April 2024 Hal Modul Reviu RKA berbasis SIPD (e-Reviu);	19.05.25	06.06.25								1 laporan	komputer LCD Printer	Auditor dan PPUPD
29	Reviu Rencana Kerja Anggaran Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2025	Biro Hukum	Melakukan Reviu RKA-P mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 dan Surat Inspektur Jenderal Nomor 700.1.2.8/1137/IJ tanggal 26 April 2024 Hal Modul Reviu RKA berbasis SIPD (e-Reviu);	19.05.25	06.06.25								1 laporan	komputer LCD Printer	Auditor dan PPUPD
30	Reviu Rencana Kerja Anggaran Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2025	Sekretariat DPRD	Melakukan Reviu RKA-P mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 dan Surat Inspektur Jenderal Nomor 700.1.2.8/1137/IJ tanggal 26 April 2024 Hal Modul Reviu RKA berbasis SIPD (e-Reviu);	19.05.25	06.06.25	1	1	1	1	3	6	900.000	1 laporan	komputer LCD Printer	Auditor dan PPUPD

No.	KEGIATAN BINWAS	PERANGKAT DAERAH/KABUPATEN/KOTA	FOKUS DAN SASARAN	Jadwal (M.B.T)		Hari Penugasan						Anggaran	Laporan	SARPRAS	KET
				RMP	RPL	PJ	WK/PJ	PT	KT	AT	Jmlh				
7	REVIU Rencana Strategis Perangkat Daerah	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	Melakukan Reviu Renstra Perangkat Daerah mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018;	01.07.25	11.07.25	3		3	3	9	18	Tentatif APBD-P	1 Laporan	komputer LCD Printer	PPUPD
				01.07.25	11.07.25	3		3	3	9	18	Tentatif APBD-P	1 Laporan	komputer LCD Printer	PPUPD
8	REVIU Rencana Strategis Perangkat Daerah	Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Melakukan Reviu Renstra Perangkat Daerah mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018;	01.07.25	11.07.25	3		3	3	9	18	Tentatif APBD-P	1 Laporan	komputer LCD Printer	PPUPD
				01.07.25	11.07.25	3		3	3	9	18	Tentatif APBD-P	1 Laporan	komputer LCD Printer	PPUPD
9	REVIU Rencana Strategis Perangkat Daerah	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	Melakukan Reviu Renstra Perangkat Daerah mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018;	01.07.25	11.07.25	3		3	3	9	18	Tentatif APBD-P	1 Laporan	komputer LCD Printer	PPUPD
				01.07.25	11.07.25	3		3	3	9	18	Tentatif APBD-P	1 Laporan	komputer LCD Printer	PPUPD
10	REVIU Rencana Strategis Perangkat Daerah	Dinas Perkebunan	Melakukan Reviu Renstra Perangkat Daerah mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018;	01.07.25	11.07.25	3		3	3	9	18	Tentatif APBD-P	1 Laporan	komputer LCD Printer	PPUPD
				01.07.25	11.07.25	3		3	3	9	18	Tentatif APBD-P	1 Laporan	komputer LCD Printer	PPUPD
11	REVIU Rencana Strategis Perangkat Daerah	Biro Perekonomian	Melakukan Reviu Renstra Perangkat Daerah mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018;	01.07.25	11.07.25	3		3	3	9	18	Tentatif APBD-P	1 Laporan	komputer LCD Printer	PPUPD
				01.07.25	11.07.25	3		3	3	9	18	Tentatif APBD-P	1 Laporan	komputer LCD Printer	PPUPD
12	REVIU Rencana Strategis Perangkat Daerah	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan	Melakukan Reviu Renstra Perangkat Daerah mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018;	01.07.25	11.07.25	3		3	3	9	18	Tentatif APBD-P	1 Laporan	komputer LCD Printer	PPUPD
				01.07.25	11.07.25	3		3	3	9	18	Tentatif APBD-P	1 Laporan	komputer LCD Printer	PPUPD
13	REVIU Rencana Strategis Perangkat Daerah	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Melakukan Reviu Renstra Perangkat Daerah mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018;	01.07.25	11.07.25	3		3	3	9	18	Tentatif APBD-P	1 Laporan	komputer LCD Printer	PPUPD
				01.07.25	11.07.25	3		3	3	9	18	Tentatif APBD-P	1 Laporan	komputer LCD Printer	PPUPD
14	REVIU Rencana Strategis Perangkat Daerah	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Melakukan Reviu Renstra Perangkat Daerah mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018;	01.07.25	11.07.25	3		3	3	9	18	Tentatif APBD-P	1 Laporan	komputer LCD Printer	PPUPD
				01.07.25	11.07.25	3		3	3	9	18	Tentatif APBD-P	1 Laporan	komputer LCD Printer	PPUPD

3. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2018;

1	REVIU Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	Melakukan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2018;	10.03.25	17.03.25	6		6	6	24	42	6.300.000	1 Laporan	komputer LCD Printer	AUDITOR
---	---	--	--	----------	----------	---	--	---	---	----	----	-----------	-----------	----------------------	---------

4. Reviu LPPD dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020.

No.	KEGIATAN BINWAS	PERANGKAT DAERAH/KABUPATEN/KOTA	FOKUS DAN SASARAN	Jadwal (M.B.T)		Hari Penugasan						Anggaran	Laporan	SARPRAS	KET
				RMP	RPL	PJ	WK/PJ	PT	KT	AT	Jmlh				
1	REVIU dan Asistensi LPPD	Biro Tata Pemerintahan dan OTDA	melakukan Reviu LPPD dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020	10.03.25	25.03.25		3	3	3	6	15	2.250.000	1 laporan	komputer LCD Printer	ppUPD

No.	KEGIATAN BINWAS	PERANGKAT DAERAH/KABUPATEN/ KOTA	FOKUS DAN SASARAN	Jadwal (M.B.T)		Hari Penugasan					Anggaran	Laporan	SARPRAS	KET
				RMP	RPL	PJ	WK/ PJ	PT	KT	AT				

5 Pengawasan Keuangan Desa mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020

1	Pengawasan Keuangan Desa	Kabupaten Mesuji	Melakukan Pengawasan Keuangan Desa pada Pemerintah Kabupaten Mengacu Kepada PERMENDAGRI Nomor 73 Tahun 2020	11.08.25	18.08.25		3	3	3	9	18	7.000.000	1 Laporan	komputer LCD Printer	Auditor dan PPUPD
2	Pengawasan Keuangan Desa	Kabupaten Lampung Utara	Melakukan Pengawasan Keuangan Desa pada Pemerintah Kabupaten Mengacu Kepada PERMENDAGRI Nomor 73 Tahun 2020	04.08.25	08.08.25		3	3	3	9	18	7.000.000	1 Laporan	komputer LCD Printer	Auditor dan PPUPD
3	Pengawasan Keuangan Desa	Kabupaten Tulang Bawang Barat	Melakukan Pengawasan Keuangan Desa pada Pemerintah Kabupaten Mengacu Kepada PERMENDAGRI Nomor 73 Tahun 2020	04.08.25	08.08.25		3	3	3	9	18	7.000.000	1 Laporan	komputer LCD Printer	Auditor dan PPUPD
4	Pengawasan Keuangan Desa	Kabupaten Tulang Bawang	Melakukan Pengawasan Keuangan Desa pada Pemerintah Kabupaten Mengacu Kepada PERMENDAGRI Nomor 73 Tahun 2020	04.08.25	08.08.25		3	3	3	9	18	7.000.000	1 Laporan	komputer LCD Printer	Auditor dan PPUPD
5	Pengawasan Keuangan Desa	Kabupaten Tanggamus	Melakukan Pengawasan Keuangan Desa pada Pemerintah Kabupaten Mengacu Kepada PERMENDAGRI Nomor 73 Tahun 2020	14.07.25	16.07.25		2	3	3	9	17	7.000.000	1 Laporan	komputer LCD Printer	Auditor dan PPUPD
6	Pengawasan Keuangan Desa	Kabupaten Pesawaran	Melakukan Pengawasan Keuangan Desa pada Pemerintah Kabupaten Mengacu Kepada PERMENDAGRI Nomor 73 Tahun 2020	28.07.25	30.07.25		2	3	3	9	17	7.000.000	1 Laporan	komputer LCD Printer	Auditor dan PPUPD
7	Pengawasan Keuangan Desa	Kabupaten Pringsewu	Melakukan Pengawasan Keuangan Desa pada Pemerintah Kabupaten Mengacu Kepada PERMENDAGRI Nomor 73 Tahun 2020	14.07.25	16.07.25		2	3	3	9	9	7.000.000	1 Laporan	komputer LCD Printer	Auditor dan PPUPD

No.	KEGIATAN BINWAS	PERANGKAT DAERAH/KABUPATEN/KOTA	FOKUS DAN SASARAN	Jadwal (M.B.T)		Hari Penugasan							Anggaran	Laporan	SARPRAS	KET
				RMP	RPL	PJ	WK/PJ	PT	KT	AT	Jmlh					
1	Pengawasan SPM pada Pemprov Lampung	Seluruh PD pengampu SPM	melakukan Pengawasan SPM pada Perangkat Daerah Pemprov Lampung	21.09.25	12.12.25	1	1	1	1	7	11	10.200.000	1 laporan	komputer LCD Printer	PPUPD	
E. EVALUASI PENGELOLAAN RISIKO																
1	Evaluasi Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	Melakukan Evaluasi Pengelolaan Resiko Berdasarkan Perdep BPKP NOMOR4 Tahun 2029 dan Pergub Lampung Nomor 36 Tahun 2023	01.12.25	08.12.25		3	3	3	9	18	450.000,00	1 laporan	komputer LCD Printer	Auditor dan PPUPD	
2	Evaluasi Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Melakukan Evaluasi Pengelolaan Resiko Berdasarkan Perdep BPKP NOMOR4 Tahun 2029 dan Pergub Lampung Nomor 36 Tahun 2023	01.12.25	08.12.25		3	3	3	9	18	450.000,00	1 laporan	komputer LCD Printer	Auditor dan PPUPD	
3	Evaluasi Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah	Dinas Kelautan dan Perikanan	Melakukan Evaluasi Pengelolaan Resiko Berdasarkan Perdep BPKP NOMOR4 Tahun 2029 dan Pergub Lampung Nomor 36 Tahun 2023	01.12.25	08.12.25		3	3	3	9	18	450.000,00	1 laporan	komputer LCD Printer	Auditor dan PPUPD	
4	Evaluasi Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah	Badan Pendapatan Daerah	Melakukan Evaluasi Pengelolaan Resiko Berdasarkan Perdep BPKP NOMOR4 Tahun 2029 dan Pergub Lampung Nomor 36 Tahun 2023	01.12.25	08.12.25		3	3	3	9	18	450.000,00	1 laporan	komputer LCD Printer	Auditor dan PPUPD	
5	Evaluasi Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Melakukan Evaluasi Pengelolaan Resiko Berdasarkan Perdep BPKP NOMOR4 Tahun 2029 dan Pergub Lampung Nomor 36 Tahun 2023	01.12.25	08.12.25		3	3	3	9	18	450.000,00	1 laporan	komputer LCD Printer	Auditor dan PPUPD	
6	Evaluasi Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	Melakukan Evaluasi Pengelolaan Resiko Berdasarkan Perdep BPKP NOMOR4 Tahun 2029 dan Pergub Lampung Nomor 36 Tahun 2023	01.12.25	08.12.25		3	3	3	9	18	450.000,00	1 laporan	komputer LCD Printer	Auditor dan PPUPD	
7	Evaluasi Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah	Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Melakukan Evaluasi Pengelolaan Resiko Berdasarkan Perdep BPKP NOMOR4 Tahun 2029 dan Pergub Lampung Nomor 36 Tahun 2023	01.12.25	08.12.25		3	3	3	9	18	450.000,00	1 laporan	komputer LCD Printer	Auditor dan PPUPD	

No.	KEGIATAN BINWAS	PERANGKAT DAERAH/KABUPATEN/KOTA	FOKUS DAN SASARAN	Jadwal (M.B.T)		PJ	WK/PJ	PT	KT	AT	Jmlh	Anggaran	Laporan	SARPRAS	KET
				RMP	RPL										
8	Evaluasi Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	Melakukan Evaluasi Pengelolaan Risiko Berdasarkan Perdep BPKP NOMOR4 Tahun 2029 dan Pergub Lampung Nomor 36 Tahun 2023	01.12.25	08.12.25		3	3	3	9	18	450.000,00	1 laporan	komputer LCD Printer	Auditor dan PPUPD
9	Evaluasi Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah	Dinas Perkebunan	Melakukan Evaluasi Pengelolaan Risiko Berdasarkan Perdep BPKP NOMOR4 Tahun 2029 dan Pergub Lampung Nomor 36 Tahun 2023	01.12.25	08.12.25		3	3	3	9	18	450.000,00	1 laporan	komputer LCD Printer	Auditor dan PPUPD
10	Evaluasi Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah	Biro Perekonomian	Melakukan Evaluasi Pengelolaan Risiko Berdasarkan Perdep BPKP NOMOR4 Tahun 2029 dan Pergub Lampung Nomor 36 Tahun 2023	01.12.25	08.12.25		3	3	3	9	18	450.000,00	1 laporan	komputer LCD Printer	Auditor dan PPUPD
11	Evaluasi Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan	Melakukan Evaluasi Pengelolaan Risiko Berdasarkan Perdep BPKP NOMOR4 Tahun 2029 dan Pergub Lampung Nomor 36 Tahun 2023	01.12.25	08.12.25		3	3	3	9	18	450.000,00	1 laporan	komputer LCD Printer	Auditor dan PPUPD
12	Evaluasi Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Melakukan Evaluasi Pengelolaan Risiko Berdasarkan Perdep BPKP NOMOR4 Tahun 2029 dan Pergub Lampung Nomor 36 Tahun 2023	01.12.25	08.12.25		3	3	3	9	18	450.000,00	1 laporan	komputer LCD Printer	Auditor dan PPUPD
13	Evaluasi Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Melakukan Evaluasi Pengelolaan Risiko Berdasarkan Perdep BPKP NOMOR4 Tahun 2029 dan Pergub Lampung Nomor 36 Tahun 2023	01.12.25	08.12.25		3	3	3	9	18	450.000,00	1 laporan	komputer LCD Printer	Auditor dan PPUPD
14	Evaluasi Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah	Rumah Sakit Jiwa	Melakukan Evaluasi Pengelolaan Risiko Berdasarkan Perdep BPKP NOMOR4 Tahun 2029 dan Pergub Lampung Nomor 36 Tahun 2023	17.11.25	19.11.25		1	1	1	3	6	900.000,00	1 laporan	komputer LCD Printer	Auditor dan PPUPD
15	Evaluasi Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Melakukan Evaluasi Pengelolaan Risiko Berdasarkan Perdep BPKP NOMOR4 Tahun 2029 dan Pergub Lampung Nomor 36 Tahun 2023	17.11.25	19.11.25			1	1	3	5	750.000,00	1 laporan	komputer LCD Printer	Auditor dan PPUPD

No.	KEGIATAN BINWAS	PERANGKAT DAERAH/KABUPATEN/KOTA	FOKUS DAN SASARAN	Jadwal (M.B.T)		Hari Penugasan						Anggaran	Laporan	SARPRAS	KET
				RMP	RPL	PJ	WK/PJ	PT	KT	AT	Jmlh				
16	Evaluasi Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah	Biro Administrasi Pimpinan	Melakukan Evaluasi Pengelolaan Risiko Berdasarkan Perdep BPKP NOMOR4 Tahun 2029 dan Pergub Lampung Nomor 36 Tahun 2023	17.11.25	19.11.25			1	1	3	5	750.000,00	1 laporan	komputer LCD Printer	Auditor dan PPUPD
17	Evaluasi Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah	Dinas Sosial	Melakukan Evaluasi Pengelolaan Risiko Berdasarkan Perdep BPKP NOMOR4 Tahun 2029 dan Pergub Lampung Nomor 36 Tahun 2023	17.11.25	19.11.25		1	1	1	3	6	900.000,00	1 laporan	komputer LCD Printer	Auditor dan PPUPD
18	Evaluasi Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah	Dinas Kesehatan	Melakukan Evaluasi Pengelolaan Risiko Berdasarkan Perdep BPKP NOMOR4 Tahun 2029 dan Pergub Lampung Nomor 36 Tahun 2023	17.11.25	19.11.25			1	1	3	5	750.000,00	1 laporan	komputer LCD Printer	Auditor dan PPUPD
19	Evaluasi Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah	Dinas Tenaga Kerja	Melakukan Evaluasi Pengelolaan Risiko Berdasarkan Perdep BPKP NOMOR4 Tahun 2029 dan Pergub Lampung Nomor 36 Tahun 2023	17.11.25	19.11.25			1	1	3	5	750.000,00	1 laporan	komputer LCD Printer	Auditor dan PPUPD
20	Evaluasi Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdul Moelek	Melakukan Evaluasi Pengelolaan Risiko Berdasarkan Perdep BPKP NOMOR4 Tahun 2029 dan Pergub Lampung Nomor 36 Tahun 2023	17.11.25	19.11.25		1	1	1	3	6	900.000,00	1 laporan	komputer LCD Printer	Auditor dan PPUPD
21	Evaluasi Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Melakukan Evaluasi Pengelolaan Risiko Berdasarkan Perdep BPKP NOMOR4 Tahun 2029 dan Pergub Lampung Nomor 36 Tahun 2023	17.11.25	19.11.25			1	1	3	5	750.000,00	1 laporan	komputer LCD Printer	Auditor dan PPUPD
22	Evaluasi Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah	Biro Umum	Melakukan Evaluasi Pengelolaan Risiko Berdasarkan Perdep BPKP NOMOR4 Tahun 2029 dan Pergub Lampung Nomor 36 Tahun 2023	17.11.25	19.11.25			1	1	3	5	750.000,00	1 laporan	komputer LCD Printer	Auditor dan PPUPD
23	Evaluasi Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah	Dinas Pemuda dan Olahraga	Melakukan Evaluasi Pengelolaan Risiko Berdasarkan Perdep BPKP NOMOR4 Tahun 2029 dan Pergub Lampung Nomor 36 Tahun 2023	17.11.25	19.11.25		1	2	2	6	11	1.650.000,00	1 laporan	komputer LCD Printer	Auditor dan PPUPD

No.	KEGIATAN BINWAS	PERANGKAT DAERAH/KABUPATEN/ KOTA	FOKUS DAN SASARAN	Jadwal (M.B.T)		PJ	WK/ PJ	PT	Hari Penugasan				Anggaran	Laporan	SARPRAS	KET
				RMP	RPL				PJ	KT	AT	Jmlh				
24	Evaluasi Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah	Badan Penghubung	Melakukan Evaluasi Pengelolaan Risiko Berdasarkan Perdep BPKP NOMOR4 Tahun 2029 dan Pergub Lampung Nomor 36 Tahun 2023	17.11.25	19.11.25			1		1	3	5		1 laporan	komputer LCD Printer	Auditor dan PPUPD
25	Evaluasi Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah	Biro Kesra	Melakukan Evaluasi Pengelolaan Risiko Berdasarkan Perdep BPKP NOMOR4 Tahun 2029 dan Pergub Lampung Nomor 36 Tahun 2023	17.11.25	19.11.25			1		1	3	5	750.000,00	1 laporan	komputer LCD Printer	Auditor dan PPUPD
26	Evaluasi Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	Melakukan Evaluasi Pengelolaan Risiko Berdasarkan Perdep BPKP NOMOR4 Tahun 2029 dan Pergub Lampung Nomor 36 Tahun 2023	22.11.25	24.12.25			1		1	1	3	1.350.000	1 laporan	komputer LCD Printer	Auditor dan PPUPD
27	Evaluasi Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah	Dinas Kehutanan	Melakukan Evaluasi Pengelolaan Risiko Berdasarkan Perdep BPKP NOMOR4 Tahun 2029 dan Pergub Lampung Nomor 36 Tahun 2023	12.11.25	14.11.25			1		1	1	3	1.350.000	1 laporan	komputer LCD Printer	Auditor dan PPUPD
28	Evaluasi Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah	Dinas Lingkungan Hidup	Melakukan Evaluasi Pengelolaan Risiko Berdasarkan Perdep BPKP NOMOR4 Tahun 2029 dan Pergub Lampung Nomor 36 Tahun 2023	17.12.25	19.12.25			1		1	1	3	1.350.000	1 laporan	komputer LCD Printer	Auditor dan PPUPD
29	Evaluasi Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah	Biro Administrasi Pembangunan.	Melakukan Evaluasi Pengelolaan Risiko Berdasarkan Perdep BPKP NOMOR4 Tahun 2029 dan Pergub Lampung Nomor 36 Tahun 2023	19.11.25	21.11.25			1		1	1	3	900.000	1 laporan	komputer LCD Printer	Auditor dan PPUPD
30	Evaluasi Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	Melakukan Evaluasi Pengelolaan Risiko Berdasarkan Perdep BPKP NOMOR4 Tahun 2029 dan Pergub Lampung Nomor 36 Tahun 2023	05.11.25	19.11.25			1		1	4	6	900.000	1 laporan	komputer LCD Printer	Auditor dan PPUPD
31	Evaluasi Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Melakukan Evaluasi Pengelolaan Risiko Berdasarkan Perdep BPKP NOMOR4 Tahun 2029 dan Pergub Lampung Nomor 36 Tahun 2023	05.11.25	14.11.25			1		1	3	5	750.000	1 laporan	komputer LCD Printer	Auditor dan PPUPD

No.	KEGIATAN BINWAS	PERANGKAT DAERAH/KABUPATEN/ KOTA	FOKUS DAN SASARAN	Jadwal (M.B.T)		Hari Penugasan						Anggaran	Laporan	SARPRAS	KET
				RMP	RPL	PJ	WK/ PJ	PT	KT	AT	Jmlh				
32	Evaluasi Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah	Dinas Perhubungan	Melakukan Evaluasi Pengelolaan Risiko Berdasarkan Perdep BPKP NOMOR4 Tahun 2029 dan Pergub Lampung Nomor 36 Tahun 2023	05.11.25	14.11.25			1	1	3	5	750.000	1 laporan	komputer LCD Printer	Auditor dan PPUPD
33	Evaluasi Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi	Melakukan Evaluasi Pengelolaan Risiko Berdasarkan Perdep BPKP NOMOR4 Tahun 2029 dan Pergub Lampung Nomor 36 Tahun 2023	08.12.25	12.12.25	1	1	1	1	1	3	450.000	1 laporan	komputer LCD Printer	Auditor dan PPUPD
34	Evaluasi Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Melakukan Evaluasi Pengelolaan Risiko Berdasarkan Perdep BPKP NOMOR4 Tahun 2029 dan Pergub Lampung Nomor 36 Tahun 2023	08.12.25	12.12.25	1	1	1	1	1	3	450.000	1 laporan	komputer LCD Printer	Auditor dan PPUPD
35	Evaluasi Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Melakukan Evaluasi Pengelolaan Risiko Berdasarkan Perdep BPKP NOMOR4 Tahun 2029 dan Pergub Lampung Nomor 36 Tahun 2023	08.12.25	12.12.25	1	1	1	1	1	3	450.000	1 laporan	komputer LCD Printer	Auditor dan PPUPD
36	Evaluasi Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Melakukan Evaluasi Pengelolaan Risiko Berdasarkan Perdep BPKP NOMOR4 Tahun 2029 dan Pergub Lampung Nomor 36 Tahun 2023	17.11.25	08.12.25			3	3	6	12	1.800.000	1 laporan	komputer LCD Printer	Auditor dan PPUPD
37	Evaluasi Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Melakukan Evaluasi Pengelolaan Risiko Berdasarkan Perdep BPKP NOMOR4 Tahun 2029 dan Pergub Lampung Nomor 36 Tahun 2023	17.11.25	08.12.25								1 laporan	komputer LCD Printer	Auditor dan PPUPD
38	Evaluasi Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Melakukan Evaluasi Pengelolaan Risiko Berdasarkan Perdep BPKP NOMOR4 Tahun 2029 dan Pergub Lampung Nomor 36 Tahun 2023	17.11.25	08.12.25								1 laporan	komputer LCD Printer	Auditor dan PPUPD
39	Evaluasi Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	Melakukan Evaluasi Pengelolaan Risiko Berdasarkan Perdep BPKP NOMOR4 Tahun 2029 dan Pergub Lampung Nomor 36 Tahun 2023	17.11.25	08.12.25			3	3	6	15	2.250.000	1 laporan	komputer LCD Printer	Auditor dan PPUPD

No.	KEGIATAN BINWAS	PERANGKAT DAERAH/KABUPATEN/ KOTA	FOKUS DAN SASARAN	Jadwal (M.B.T)		Hari Penugasan					Anggaran	Laporan	SARPRAS	KET	
				RMP	RPL	PJ	WK/ PJ	PT	KT	AT					Jmlh
40	Evaluasi Pengelolaan Resiko Perangkat Daerah	Badan Kepegawaian Daerah	Melakukan Evaluasi Pengelolaan Resiko Berdasarkan Perdep BPKP NOMOR4 Tahun 2029 dan Pergub Lampung Nomor 36 Tahun 2023									1 laporan	komputer LCD Printer	Auditor dan PPUPD	
41	Evaluasi Pengelolaan Resiko Perangkat Daerah	Biro Tata Pemerintahan dan OTDA	Melakukan Evaluasi Pengelolaan Resiko Berdasarkan Perdep BPKP NOMOR4 Tahun 2029 dan Pergub Lampung Nomor 36 Tahun 2023									1 laporan	komputer LCD Printer	Auditor dan PPUPD	
42	Evaluasi Pengelolaan Resiko Perangkat Daerah	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi	Melakukan Evaluasi Pengelolaan Resiko Berdasarkan Perdep BPKP NOMOR4 Tahun 2029 dan Pergub Lampung Nomor 36 Tahun 2023	17.11.25	08.12.25	3		3	3	6	15	2.250.000	1 laporan	komputer LCD Printer	Auditor dan PPUPD
43	Evaluasi Pengelolaan Resiko Perangkat Daerah	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah	Melakukan Evaluasi Pengelolaan Resiko Berdasarkan Perdep BPKP NOMOR4 Tahun 2029 dan Pergub Lampung Nomor 36 Tahun 2023									1 laporan	komputer LCD Printer	Auditor dan PPUPD	
44	Evaluasi Pengelolaan Resiko Perangkat Daerah	Biro Hukum	Melakukan Evaluasi Pengelolaan Resiko Berdasarkan Perdep BPKP NOMOR4 Tahun 2029 dan Pergub Lampung Nomor 36 Tahun 2023									1 laporan	komputer LCD Printer	Auditor dan PPUPD	
45	Evaluasi Pengelolaan Resiko Perangkat Daerah	Sekretariat DPRD	Melakukan Evaluasi Pengelolaan Resiko Berdasarkan Perdep BPKP NOMOR4 Tahun 2029 dan Pergub Lampung Nomor 36 Tahun 2023	17.11.25	08.12.25	3		3	3	6	15	2.250.000	1 laporan	komputer LCD Printer	Auditor dan PPUPD
46	Evaluasi Pengelolaan Resiko Perangkat Daerah	Satuan Polisi Pamong Praja	Melakukan Evaluasi Pengelolaan Resiko Berdasarkan Perdep BPKP NOMOR4 Tahun 2029 dan Pergub Lampung Nomor 36 Tahun 2023									1 laporan	komputer LCD Printer	Auditor dan PPUPD	
47	Evaluasi Pengelolaan Resiko Perangkat Daerah	Biro Organisasi	Melakukan Evaluasi Pengelolaan Resiko Berdasarkan Perdep BPKP NOMOR4 Tahun 2029 dan Pergub Lampung Nomor 36 Tahun 2023									1 laporan	komputer LCD Printer	Auditor dan PPUPD	

No.	KEGIATAN BINWAS	PERANGKAT DAERAH/KABUPATEN/ KOTA	FOKUS DAN SASARAN	Jadwal (M.B.T)		Hari Penugasan						Anggaran	Laporan	SARPRAS	KET
				RMP	RPL	PJ	WK/ PJ	PT	KT	AT	Jmlh				
G. EVALUASI PENGELOLAAN RISIKO Pemerintah Provinsi Lampung															
1	Evaluasi Pengelolaan Resiko Tingkat Pemerintah Provinsi	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Melakukan Evaluasi Pengelolaan Resiko Berdasarkan Perdep BPKP NOMOR4 Tahun 2029 dan Pergub Lampung Nomor 36 Tahun 2023	24.11.25	28.11.25	0	3	3	3	9	18	2.700.000,00	1 laporan	komputer LCD Printer	Auditor dan PPUPD
H. EVALUASI LPPD KABUPATEN/ KOTA															
1	Evaluasi LPPD Kabupaten/Kota	Kab Mesuji	Melakukan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah mengacu kepada Permendagri nomor 19 Tahun 2024	19.05.25	22.05.25		3	3	3	9	18	2.850.000	1 Laporan	komputer LCD Printer	PPUPD
2	Evaluasi LPPD Kabupaten/Kota	Kab Lampung Utara	Melakukan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah mengacu kepada Permendagri nomor 19 Tahun 2024	19.05.25	22.05.25		3	3	3	9	18	2.850.000	1 Laporan	komputer LCD Printer	PPUPD
3	Evaluasi LPPD Kabupaten/Kota	Tulang Bawang Barat	Melakukan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah mengacu kepada Permendagri nomor 19 Tahun 2024	19.05.25	22.05.25		3	3	3	9	18	2.850.000	1 Laporan	komputer LCD Printer	PPUPD
4	Evaluasi LPPD Kabupaten/Kota	Tulang Bawang	Melakukan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah mengacu kepada Permendagri nomor 19 Tahun 2024	19.05.25	22.05.25		3	3	3	9	18	2.850.000	1 Laporan	komputer LCD Printer	PPUPD
5	Evaluasi LPPD Kabupaten/Kota	Kabupaten Tanggamus	Melakukan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah mengacu kepada Permendagri nomor 19 Tahun 2024	28.04.25	28.04.25		1	1	1	3	6	2.850.000	1 Laporan	komputer LCD Printer	PPUPD
6	Evaluasi LPPD Kabupaten/Kota	Kabupaten Pringsewu	Melakukan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah mengacu kepada Permendagri nomor 19 Tahun 2024	28.04.25	28.04.25		1	1	1	3	6	2.850.000	1 Laporan	komputer LCD Printer	PPUPD
7	Evaluasi LPPD Kabupaten/Kota	Kabupaten Pesawaran	Melakukan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah mengacu kepada Permendagri nomor 19 Tahun 2024	05.05.25	06.05.25		1	1	1	3	6	2.850.000	1 Laporan	komputer LCD Printer	PPUPD
8	Evaluasi LPPD Kabupaten/Kota	Kota Bandar Lampung	Melakukan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah mengacu kepada Permendagri nomor 19 Tahun 2024				1	1	1	3	6	2.850.000	1 Laporan	komputer LCD Printer	PPUPD

No.	KEGIATAN BINWAS	PERANGKAT DAERAH/KABUPATEN/KOTA	FOKUS DAN SASARAN	Jadwal (M.B.T)		Hari Penugasan						Anggaran	Laporan	SARPRAS	KET
				RMP	RPL	PJ	WK/PJ	PT	KT	AT	Jmlh				
9	Evaluasi LPPD Kabupaten/Kota	Kabupaten Way Kanan	Melakukan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah mengacu kepada Permendagri nomor 19 Tahun 2024	05.05.25	07.05.25		1	1	1	3	6	2.850.000	1 Laporan	komputer LCD Printer	PPUPD
10	Evaluasi LPPD Kabupaten/Kota	Kabupaten Pesisir Barat	Melakukan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah mengacu kepada Permendagri nomor 19 Tahun 2024	07.05.25	09.05.25		1	1	1	3	6	2.850.000	1 Laporan	komputer LCD Printer	PPUPD
11	Evaluasi LPPD Kabupaten/Kota	Kabupaten Lampung Barat	Melakukan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah mengacu kepada Permendagri nomor 19 Tahun 2024	26.05.25	28.05.25		1	1	1	3	6	2.850.000	1 Laporan	komputer LCD Printer	PPUPD
12	Evaluasi LPPD Kabupaten/Kota	Kabupaten Lampung Selatan	Melakukan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah mengacu kepada Permendagri nomor 19 Tahun 2024	07.04.25	21.04.25		1	1	1	3	6	2.850.000	1 Laporan	komputer LCD Printer	PPUPD
13	Evaluasi LPPD Kabupaten/Kota	Kabupaten Lampung Tengah	Melakukan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah mengacu kepada Permendagri nomor 19 Tahun 2024	07.04.25	21.04.25		1	1	1	3	6	2.850.000	1 Laporan	komputer LCD Printer	PPUPD
14	Evaluasi LPPD Kabupaten/Kota	Kabupaten Lampung Timur	Melakukan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah mengacu kepada Permendagri nomor 19 Tahun 2024	07.04.25	21.04.25		1	1	1	3	6	2.850.000	1 Laporan	komputer LCD Printer	PPUPD
15	Evaluasi LPPD Kabupaten/Kota	Kota Metro	Melakukan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah mengacu kepada Permendagri nomor 19 Tahun 2024	07.04.25	21.04.25		1	1	1	3	6	2.850.000	1 Laporan	komputer LCD Printer	PPUPD
I. E-AUDIT PBJ (E PURCHASING).															
1	Pelaksanaan E-AUDIT (E PURCHASING)	Seluruh OPD di Lingkungan Pemerintah	Melakukan E-Audit (E PURCHASING) melalui Sistem LKPP.	05.05.25	28.05.25		5	5	5	10	25	3.750.000	1 laporan	komputer LCD Printer	Auditor
2	Pelaksanaan E-AUDIT (E PURCHASING)	Seluruh OPD di Lingkungan Pemerintah	Melakukan E-Audit (E PURCHASING) melalui Sistem LKPP.	04.08.25	04.09.25			5	5	10	20	3.000.000	1 laporan	komputer LCD	Auditor
J. Reviu LKJ Pemerintah Daerah															
1	Reviu Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Biro Organisasi	Melakukan Reviu Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Lampung tahun 2024.	05.02.25	17.02.25		1	1	3	3	8	1.200.000	1 laporan	komputer LCD Printer	Auditor dan PPUPD
K. REVIU LKJ PERANGKAT DAERAH															
1	Reviu LKJ Perangkat Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset	Melakukan Reviu LKJ Perangkat Daerah Hasil Tindak Lanjut	17.03.25	08.04.25		3	3	3	9	18	450.000	1 laporan	komputer LCD	Auditor dan PPUPD

No.	KEGIATAN BINWAS	PERANGKAT DAERAH/KABUPATEN/ KOTA	FOKUS DAN SASARAN	Jadwal (M.B.T)		Hari Penugasan					Anggaran	Laporan	SARPRAS	KET
				RMP	RPL	PJ	WK/ PJ	PT	KT	AT	Jmlh			
2	Reviu LKJ Perangkat Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Melakukan Reviu LKJ Perangkat Daerah Hasil Tindak Lanjut	17.03.25	08.04.25	3		3	3	9	18	1 laporan	komputer LCD	Auditor dan PPUPD
3	Reviu LKJ Perangkat Daerah	Dinas Kelautan dan Perikanan	Melakukan Reviu LKJ Perangkat Daerah Hasil Tindak Lanjut	17.03.25	08.04.25	3		3	3	9	18	1 laporan	komputer LCD	Auditor dan PPUPD
4	Reviu LKJ Perangkat Daerah	Badan Pendapatan Daerah	Melakukan Reviu LKJ Perangkat Daerah Hasil Tindak Lanjut	17.03.25	08.04.25	3		3	3	9	18	1 laporan	komputer LCD	Auditor dan PPUPD
5	Reviu LKJ Perangkat Daerah	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	Melakukan Reviu LKJ Perangkat Daerah Hasil Tindak Lanjut	17.03.25	08.04.25	3		3	3	9	18	1 laporan	komputer LCD	Auditor dan PPUPD
6	Reviu LKJ Perangkat Daerah	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman	Melakukan Reviu LKJ Perangkat Daerah Hasil Tindak Lanjut	17.03.25	08.04.25	3		3	3	9	18	1 laporan	komputer LCD	Auditor dan PPUPD
7	Reviu LKJ Perangkat Daerah	Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Melakukan Reviu LKJ Perangkat Daerah Hasil Tindak Lanjut	17.03.25	08.04.25	3		3	3	9	18	1 laporan	komputer LCD	Auditor dan PPUPD
8	Reviu LKJ Perangkat Daerah	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	Melakukan Reviu LKJ Perangkat Daerah Hasil Tindak Lanjut	17.03.25	08.04.25	3		3	3	9	18	1 laporan	komputer LCD	Auditor dan PPUPD
9	Reviu LKJ Perangkat Daerah	Dinas Perkebunan	Melakukan Reviu LKJ Perangkat Daerah Hasil Tindak Lanjut	17.03.25	08.04.25	3		3	3	9	18	1 laporan	komputer LCD	Auditor dan PPUPD
10	Reviu LKJ Perangkat Daerah	Biro Perekonomian	Melakukan Reviu LKJ Perangkat Daerah Hasil Tindak Lanjut	17.03.25	08.04.25	3		3	3	9	18	1 laporan	komputer LCD	Auditor dan PPUPD
11	Reviu LKJ Perangkat Daerah	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan	Melakukan Reviu LKJ Perangkat Daerah Hasil Tindak Lanjut	17.03.25	08.04.25	3		3	3	9	18	1 laporan	komputer LCD	Auditor dan PPUPD
12	Reviu LKJ Perangkat Daerah	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Melakukan Reviu LKJ Perangkat Daerah Hasil Tindak Lanjut	17.03.25	08.04.25	3		3	3	9	18	1 laporan	komputer LCD	Auditor dan PPUPD
13	Reviu LKJ Perangkat Daerah	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Melakukan Reviu LKJ Perangkat Daerah Hasil Tindak Lanjut	17.03.25	08.04.25	3		3	3	9	18	1 laporan	komputer LCD	Auditor dan PPUPD
14	Reviu LKJ Perangkat Daerah	Rumah Sakit Jiwa	Melakukan Reviu LKJ Perangkat Daerah Hasil Tindak Lanjut	17.03.25	19.03.25	1		1	1	6	9	1 laporan	komputer LCD	Auditor dan PPUPD
15	Reviu LKJ Perangkat Daerah	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan	Melakukan Reviu LKJ Perangkat Daerah Hasil Tindak Lanjut	17.03.25	19.03.25							1 laporan	komputer LCD	Auditor dan PPUPD
16	Reviu LKJ Perangkat Daerah	Biro Administrasi Pimpinan	Melakukan Reviu LKJ Perangkat Daerah Hasil Tindak Lanjut	17.03.25	19.03.25							1 laporan	komputer LCD	Auditor dan PPUPD
17	Reviu LKJ Perangkat Daerah	Dinas Sosial	Melakukan Reviu LKJ Perangkat Daerah Hasil Tindak Lanjut	17.03.25	19.03.25	1		1	1	6	9	1 laporan	komputer LCD	Auditor dan PPUPD
18	Reviu LKJ Perangkat Daerah	Dinas Kesehatan	Melakukan Reviu LKJ Perangkat Daerah Hasil Tindak Lanjut	17.03.25	19.03.25							1 laporan	komputer LCD	Auditor dan PPUPD
19	Reviu LKJ Perangkat Daerah	Dinas Tenaga Kerja	Melakukan Reviu LKJ Perangkat Daerah Hasil Tindak Lanjut	17.03.25	19.03.25							1 laporan	komputer LCD	Auditor dan PPUPD
20	Reviu LKJ Perangkat Daerah	Rumah Sakit Umum	Melakukan Reviu LKJ Perangkat Daerah Hasil Tindak Lanjut	17.03.25	19.03.25	1		1	1	6	9	1 laporan	komputer LCD	Auditor dan PPUPD
21	Reviu LKJ Perangkat Daerah	Daerah dr. Abdul Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Melakukan Reviu LKJ Perangkat Daerah Hasil Tindak Lanjut	17.03.25	19.03.25							1 laporan	komputer LCD	Auditor dan PPUPD
22	Reviu LKJ Perangkat Daerah	Biro Umum	Melakukan Reviu LKJ Perangkat Daerah Hasil Tindak Lanjut	17.03.25	19.03.25							1 laporan	komputer LCD	Auditor dan PPUPD
23	Reviu LKJ Perangkat Daerah	Dinas Pemuda dan Olahraga	Melakukan Reviu LKJ Perangkat Daerah Hasil Tindak Lanjut	17.03.25	19.03.25	1		1	1	6	9	1 laporan	komputer LCD	Auditor dan PPUPD
24	Reviu LKJ Perangkat Daerah	Badan Penghubung	Melakukan Reviu LKJ Perangkat Daerah Hasil Tindak Lanjut	17.03.25	19.03.25							1 laporan	komputer LCD	Auditor dan PPUPD
25	Reviu LKJ Perangkat Daerah	Biro Kesra	Melakukan Reviu LKJ Perangkat Daerah Hasil Tindak Lanjut	17.03.25	19.03.25							1 laporan	komputer LCD	Auditor dan PPUPD
26	Reviu LKJ Perangkat Daerah	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	Melakukan Reviu LKJ Perangkat Daerah Hasil Tindak Lanjut	19.03.25	21.03.25			3	3	3	9	1 laporan	komputer LCD	Auditor dan PPUPD
27	Reviu LKJ Perangkat Daerah	Dinas Kehutanan	Melakukan Reviu LKJ Perangkat Daerah Hasil Tindak Lanjut	19.03.25	21.03.25			3	3	3	9	1 laporan	komputer LCD	Auditor dan PPUPD
28	Reviu LKJ Perangkat Daerah	Dinas Lingkungan Hidup	Melakukan Reviu LKJ Perangkat Daerah Hasil Tindak Lanjut	24.03.25	25.03.25			3	3	3	9	1 laporan	komputer LCD	Auditor dan PPUPD

No.	KEGIATAN BINWAS	PERANGKAT DAERAH/KABUPATEN/ KOTA	FOKUS DAN SASARAN	Jadwal (M.B.T)		Hari Penugasan					Anggaran	Laporan	SARPRAS	KET	
				RMP	RPL	PJ	WK/ PJ	PT	KT	AT					Jmlh
29	Reviu LKJ Perangkat Daerah	Biro Abang	Melakukan Reviu LKJ Perangkat Daerah Hasil Tindak Lanjut	17.03.25	18.03.25			3	3	3	9	1 laporan	komputer LCD	Auditor dan PPUPD	
30	Reviu LKJ Perangkat Daerah	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman	Melakukan Reviu LKJ Perangkat Daerah Hasil Tindak Lanjut	19.03.25	21.03.25			3	3	3	9	1 laporan	komputer LCD	Auditor dan PPUPD	
31	Reviu LKJ Perangkat Daerah	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Melakukan Reviu LKJ Perangkat Daerah Hasil Tindak Lanjut	19.03.25	21.03.25			3	3	3	9	1 laporan	komputer LCD	Auditor dan PPUPD	
32	Reviu LKJ Perangkat Daerah	Dinas Perhubungan	Melakukan Reviu LKJ Perangkat Daerah Hasil Tindak Lanjut	19.03.25	21.03.25			3	3	3	9	1 laporan	komputer LCD	Auditor dan PPUPD	
33	Reviu LKJ Perangkat Daerah	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi	Melakukan Reviu LKJ Perangkat Daerah Hasil Tindak Lanjut	19.03.25	21.03.25	1	1	1	1	1	3	1 laporan	komputer LCD	Auditor dan PPUPD	
34	Reviu LKJ Perangkat Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Melakukan Reviu LKJ Perangkat Daerah Hasil Tindak Lanjut	19.03.25	21.03.25	1	1	1	1	1	3	1 laporan	komputer LCD	Auditor dan PPUPD	
35	Reviu LKJ Perangkat Daerah	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Melakukan Reviu LKJ Perangkat Daerah Hasil Tindak Lanjut	19.03.25	21.03.25	1	1	1	1	1	3	1 laporan	komputer LCD	Auditor dan PPUPD	
36	Reviu LKJ Perangkat Daerah	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Melakukan Reviu LKJ Perangkat Daerah Hasil Tindak Lanjut	17.03.25	18.03.25			3	3	3	9	1 laporan	komputer LCD	Auditor dan PPUPD	
37	Reviu LKJ Perangkat Daerah	Badan Kepegawaian Daerah	Melakukan Reviu LKJ Perangkat Daerah Hasil Tindak Lanjut	17.03.25	18.03.25			3	3	3	9	1 laporan	komputer LCD	Auditor dan PPUPD	
38	Reviu LKJ Perangkat Daerah	Biro Tata Pemerintahan dan OTDA	Melakukan Reviu LKJ Perangkat Daerah Hasil Tindak Lanjut	17.03.25	18.03.25			3	3	3	9	1 laporan	komputer LCD	Auditor dan PPUPD	
39	Reviu LKJ Perangkat Daerah	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Melakukan Reviu LKJ Perangkat Daerah Hasil Tindak Lanjut	17.03.25	18.03.25			3	3	3	9	1 laporan	komputer LCD	Auditor dan PPUPD	
40	Reviu LKJ Perangkat Daerah	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Melakukan Reviu LKJ Perangkat Daerah Hasil Tindak Lanjut	17.03.25	18.03.25			3	3	3	9	1 laporan	komputer LCD	Auditor dan PPUPD	
41	Reviu LKJ Perangkat Daerah	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Melakukan Reviu LKJ Perangkat Daerah Hasil Tindak Lanjut	17.03.25	18.03.25			3	3	3	9	1 laporan	komputer LCD	Auditor dan PPUPD	
42	Reviu LKJ Perangkat Daerah	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan	Melakukan Reviu LKJ Perangkat Daerah Hasil Tindak Lanjut	17.03.25	18.03.25			3	3	3	9	1 laporan	komputer LCD	Auditor dan PPUPD	
43	Reviu LKJ Perangkat Daerah	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah	Melakukan Reviu LKJ Perangkat Daerah Hasil Tindak Lanjut	17.03.25	18.03.25			3	3	3	9	1 laporan	komputer LCD	Auditor dan PPUPD	
44	Reviu LKJ Perangkat Daerah	Biro Hukum	Melakukan Reviu LKJ Perangkat Daerah Hasil Tindak Lanjut	17.03.25	18.03.25			3	3	3	9	1 laporan	komputer LCD	Auditor dan PPUPD	
45	Reviu LKJ Perangkat Daerah	Sekretariat DPRD	Melakukan Reviu LKJ Perangkat Daerah Hasil Tindak Lanjut	17.03.25	18.03.25			3	3	3	9	1 laporan	komputer LCD	Auditor dan PPUPD	
46	Reviu LKJ Perangkat Daerah	Satuan Polisi Pamong Praja	Melakukan Reviu LKJ Perangkat Daerah Hasil Tindak Lanjut	17.03.25	18.03.25			3	3	3	9	1 laporan	komputer LCD	Auditor dan PPUPD	
47	Reviu LKJ Perangkat Daerah	Biro Organisasi	Melakukan Reviu LKJ Perangkat Daerah Hasil Tindak Lanjut	17.03.25	18.03.25			3	3	3	9	1 laporan	komputer LCD	Auditor dan PPUPD	
L. Evaluasi E-SAKIP Perangkat Daerah															
1	Evaluasi E-SAKIP Perangkat Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	Melakukan Evaluasi AKIP Perangkat Daerah Berdasarkan Permenpan Nomor 88 Tahun 2021 dan PERGUB LAMPUNG NOMOR 39 Tahun 2022	26.05.25	28.05.25		3	3	3	9	18	450.000	1 laporan	komputer LCD Printer	Auditor dan PPUPD
2	Evaluasi E-SAKIP Perangkat Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Melakukan Evaluasi AKIP Perangkat Daerah Berdasarkan Permenpan Nomor 88 Tahun 2021 dan PERGUB LAMPUNG NOMOR 39 Tahun 2022	26.05.25	28.05.25		3	3	3	9	18	450.000	1 laporan	komputer LCD Printer	Auditor dan PPUPD

No.	KEGIATAN BINWAS	PERANGKAT DAERAH/KABUPATEN/KOTA	FOKUS DAN SASARAN	Jadwal (M.B.T)		Hari Penugasan						Anggaran	Laporan	SARPRAS	KET
				RMP	RPL	PJ	WK/PJ	PT	KT	AT	Jmlh				
3	Evaluasi E-SAKIP Perangkat Daerah	Dinas Kelautan dan Perikanan	Melakukan Evaluasi AKIP Perangkat Daerah Berdasarkan Permenpan Nomor 88 Tahun 2021 dan PERGUB LAMPUNG NOMOR 39 Tahun 2022	26.05.25	28.05.25	3		3	3	9	18		1 laporan	komputer LCD Printer	Auditor dan PPUPD
4	Evaluasi E-SAKIP Perangkat Daerah	Badan Pendapatan Daerah	Melakukan Evaluasi AKIP Perangkat Daerah Berdasarkan Permenpan Nomor 88 Tahun 2021 dan PERGUB LAMPUNG NOMOR 39 Tahun 2022	14.05.25	26.05.25	3		3	3	9	18		1 laporan	komputer LCD Printer	Auditor dan PPUPD
5	Evaluasi E-SAKIP Perangkat Daerah	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Melakukan Evaluasi AKIP Perangkat Daerah Berdasarkan Permenpan Nomor 88 Tahun 2021 dan PERGUB LAMPUNG NOMOR 39 Tahun 2022	14.05.25	26.05.25	3		3	3	9	18		1 laporan	komputer LCD Printer	Auditor dan PPUPD
6	Evaluasi E-SAKIP Perangkat Daerah	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	Melakukan Evaluasi AKIP Perangkat Daerah Berdasarkan Permenpan Nomor 88 Tahun 2021 dan PERGUB LAMPUNG NOMOR 39 Tahun 2022	14.05.25	26.05.25	3		3	3	9	18		1 laporan	komputer LCD Printer	Auditor dan PPUPD
7	Evaluasi E-SAKIP Perangkat Daerah	Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Melakukan Evaluasi AKIP Perangkat Daerah Berdasarkan Permenpan Nomor 88 Tahun 2021 dan PERGUB LAMPUNG NOMOR 39 Tahun 2022	14.05.25	26.05.25	3		3	3	9	18		1 laporan	komputer LCD Printer	Auditor dan PPUPD
8	Evaluasi E-SAKIP Perangkat Daerah	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	Melakukan Evaluasi AKIP Perangkat Daerah Berdasarkan Permenpan Nomor 88 Tahun 2021 dan PERGUB LAMPUNG NOMOR 39 Tahun 2022	14.05.25	26.05.25	3		3	3	9	18		1 laporan	komputer LCD Printer	Auditor dan PPUPD
9	Evaluasi E-SAKIP Perangkat Daerah	Dinas Perkebunan	Melakukan Evaluasi AKIP Perangkat Daerah Berdasarkan Permenpan Nomor 88 Tahun 2021 dan PERGUB LAMPUNG NOMOR 39 Tahun 2022	14.05.25	26.05.25	3		3	3	9	18		1 laporan	komputer LCD Printer	Auditor dan PPUPD
10	Evaluasi E-SAKIP Perangkat Daerah	Biro Perekonomian	Melakukan Evaluasi AKIP Perangkat Daerah Berdasarkan Permenpan Nomor 88 Tahun 2021 dan PERGUB LAMPUNG NOMOR 39 Tahun 2022	14.05.25	26.05.25	3		3	3	9	18		1 laporan	komputer LCD Printer	Auditor dan PPUPD
11	Evaluasi E-SAKIP Perangkat Daerah	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan	Melakukan Evaluasi AKIP Perangkat Daerah Berdasarkan Permenpan Nomor 88 Tahun 2021 dan PERGUB LAMPUNG NOMOR 39 Tahun 2022	14.05.25	26.05.25	3		3	3	9	18		1 laporan	komputer LCD Printer	Auditor dan PPUPD
12	Evaluasi E-SAKIP Perangkat Daerah	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Melakukan Evaluasi AKIP Perangkat Daerah Berdasarkan Permenpan Nomor 88 Tahun 2021 dan PERGUB LAMPUNG NOMOR 39 Tahun 2022	14.05.25	26.05.25	3		3	3	9	18		1 laporan	komputer LCD Printer	Auditor dan PPUPD

No.	KEGIATAN BINWAS	PERANGKAT DAERAH/KABUPATEN/ KOTA	FOKUS DAN SASARAN	Jadwal (M.B.T)		RPL	Hari Penugasan						Anggaran	Laporan	SARPRAS	KET
				RMP			PJ	WK/ PJ	PT	KT	AT	Jmlh				
13	Evaluasi E-SAKIP Perangkat Daerah	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Melakukan Evaluasi AKIP Perangkat Daerah Berdasarkan Permenpan Nomor 88 Tahun 2021 dan PERGUB LAMPUNG NOMOR 39 Tahun 2022	14.05.25	26.05.25		3		3	3	9	18	450.000	1 laporan	komputer LCD Printer	Auditor dan PPUPD
14	Evaluasi E-SAKIP Perangkat Daerah	Rumah Sakit Jiwa	Melakukan Evaluasi AKIP Perangkat Daerah Berdasarkan Permenpan Nomor 88 Tahun 2021 dan PERGUB LAMPUNG NOMOR 39 Tahun 2022	06.05.25	06.05.25		1		1	1	3	6	900.000	1 laporan	komputer LCD Printer	Auditor dan PPUPD
15	Evaluasi E-SAKIP Perangkat Daerah	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Melakukan Evaluasi AKIP Perangkat Daerah Berdasarkan Permenpan Nomor 88 Tahun 2021 dan PERGUB LAMPUNG NOMOR 39 Tahun 2022	06.05.25	06.05.25		1		1	1	3	6	900.000	1 laporan	komputer LCD Printer	Auditor dan PPUPD
16	Evaluasi E-SAKIP Perangkat Daerah	Biro Administrasi Pimpinan	Melakukan Evaluasi AKIP Perangkat Daerah Berdasarkan Permenpan Nomor 88 Tahun 2021 dan PERGUB LAMPUNG NOMOR 39 Tahun 2022	06.05.25	06.05.25		1		1	1	3	6	900.000	1 laporan	komputer LCD Printer	Auditor dan PPUPD
17	Evaluasi E-SAKIP Perangkat Daerah	Dinas Sosial	Melakukan Evaluasi AKIP Perangkat Daerah Berdasarkan Permenpan Nomor 88 Tahun 2021 dan PERGUB LAMPUNG NOMOR 39 Tahun 2022	06.05.25	06.05.25		1		1	1	3	6	900.000	1 laporan	komputer LCD Printer	Auditor dan PPUPD
18	Evaluasi E-SAKIP Perangkat Daerah	Dinas Kesehatan	Melakukan Evaluasi AKIP Perangkat Daerah Berdasarkan Permenpan Nomor 88 Tahun 2021 dan PERGUB LAMPUNG NOMOR 39 Tahun 2022	06.05.25	06.05.25		1		1	1	3	6	900.000	1 laporan	komputer LCD Printer	Auditor dan PPUPD
19	Evaluasi E-SAKIP Perangkat Daerah	Dinas Tenaga Kerja	Melakukan Evaluasi AKIP Perangkat Daerah Berdasarkan Permenpan Nomor 88 Tahun 2021 dan PERGUB LAMPUNG NOMOR 39 Tahun 2022	06.05.25	06.05.25		1		1	1	3	6	900.000	1 laporan	komputer LCD Printer	Auditor dan PPUPD
20	Evaluasi E-SAKIP Perangkat Daerah	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdul Moelock	Melakukan Evaluasi AKIP Perangkat Daerah Berdasarkan Permenpan Nomor 88 Tahun 2021 dan PERGUB LAMPUNG NOMOR 39 Tahun 2022	12.05.25	12.05.25		1		1	1	3	6	900.000	1 laporan	komputer LCD Printer	Auditor dan PPUPD
21	Evaluasi E-SAKIP Perangkat Daerah	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Melakukan Evaluasi AKIP Perangkat Daerah Berdasarkan Permenpan Nomor 88 Tahun 2021 dan PERGUB LAMPUNG NOMOR 39 Tahun 2022	12.05.25	12.05.25		1		1	1	3	6	900.000	1 laporan	komputer LCD Printer	Auditor dan PPUPD
22	Evaluasi E-SAKIP Perangkat Daerah	Biro Umum	Melakukan Evaluasi AKIP Perangkat Daerah Berdasarkan Permenpan Nomor 88 Tahun 2021 dan PERGUB LAMPUNG NOMOR 39 Tahun 2022	12.05.25	12.05.25		1		1	1	3	6	900.000	1 laporan	komputer LCD Printer	Auditor dan PPUPD

No.	KEGIATAN BINWAS	PERANGKAT DAERAH/KABUPATEN/ KOTA	FOKUS DAN SASARAN	Jadwal (M.B.T)		Hari Penugasan						Anggaran	Laporan	SARPRAS	KET
				RMP	RPL	PJ	WK/ PJ	PT	KT	AT	Jmlh				
23	Evaluasi E-SAKIP Perangkat Daerah	Dinas Pemuda dan Olahraga	Melakukan Evaluasi AKIP Perangkat Daerah Berdasarkan Permenpan Nomor 88 Tahun 2021 dan PERGUB LAMPUNG NOMOR 39 Tahun 2022	06.05.25	06.05.25		1	1	1	3	6	900.000	1 laporan	komputer LCD Printer	Auditor dan PPUPD
24	Evaluasi E-SAKIP Perangkat Daerah	Badan Penghubung	Melakukan Evaluasi AKIP Perangkat Daerah Berdasarkan Permenpan Nomor 88 Tahun 2021 dan PERGUB LAMPUNG NOMOR 39 Tahun 2022	06.05.25	06.05.25		1	1	1	3	6	900.000	1 laporan	komputer LCD Printer	Auditor dan PPUPD
25	Evaluasi E-SAKIP Perangkat Daerah	Biro Kesra	Melakukan Evaluasi AKIP Perangkat Daerah Berdasarkan Permenpan Nomor 88 Tahun 2021 dan PERGUB LAMPUNG NOMOR 39 Tahun 2022	06.05.25	06.05.25		1	1	1	3	6	900.000	1 laporan	komputer LCD Printer	Auditor dan PPUPD
26	Evaluasi E-SAKIP Perangkat Daerah	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	Melakukan Evaluasi AKIP Perangkat Daerah Berdasarkan Permenpan Nomor 88 Tahun 2021 dan PERGUB LAMPUNG NOMOR 39 Tahun 2022	21.04.25	16.05.25			3	3	6	12	1.350.000	1 Laporan	komputer LCD Printer	Auditor dan PPUPD
27	Evaluasi E-SAKIP Perangkat Daerah	Dinas Kehutanan	Melakukan Evaluasi AKIP Perangkat Daerah Berdasarkan Permenpan Nomor 88 Tahun 2021 dan PERGUB LAMPUNG NOMOR 39 Tahun 2022	21.04.25	16.05.25			3	3	3	9	1.350.000	1 Laporan	komputer LCD Printer	Auditor dan PPUPD
28	Evaluasi E-SAKIP Perangkat Daerah	Dinas Lingkungan Hidup	Melakukan Evaluasi AKIP Perangkat Daerah Berdasarkan Permenpan Nomor 88 Tahun 2021 dan PERGUB LAMPUNG NOMOR 39 Tahun 2022	15.04.25	9.05.25			3	3	6	12	1.350.000	1 Laporan	komputer LCD Printer	Auditor dan PPUPD
29	Evaluasi E-SAKIP Perangkat Daerah	Biro Adbang	Melakukan Evaluasi AKIP Perangkat Daerah Berdasarkan Permenpan Nomor 88 Tahun 2021 dan PERGUB LAMPUNG NOMOR 39 Tahun 2022	15.04.25	09.05.25			3	3	3	9	900.000	1 Laporan	komputer LCD Printer	Auditor dan PPUPD
30	Evaluasi E-SAKIP Perangkat Daerah	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	Melakukan Evaluasi AKIP Perangkat Daerah Berdasarkan Permenpan Nomor 88 Tahun 2021 dan PERGUB LAMPUNG NOMOR 39 Tahun 2022	21.04.25	30.04.25			1	1	4	6	900.000	1 Laporan	komputer LCD Printer	Auditor dan PPUPD
31	Evaluasi E-SAKIP Perangkat Daerah	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Melakukan Evaluasi AKIP Perangkat Daerah Berdasarkan Permenpan Nomor 88 Tahun 2021 dan PERGUB LAMPUNG NOMOR 39 Tahun 2022	21.04.25	30.04.25			1	1	4	6	900.000	1 Laporan	komputer LCD Printer	Auditor dan PPUPD
32	Evaluasi E-SAKIP Perangkat Daerah	Dinas Perhubungan	Melakukan Evaluasi AKIP Perangkat Daerah Berdasarkan Permenpan Nomor 88 Tahun 2021 dan PERGUB LAMPUNG NOMOR 39 Tahun 2022	21.04.25	30.04.25			1	1	4	6	900.000	1 Laporan	komputer LCD Printer	Auditor dan PPUPD

No.	KEGIATAN BINWAS	PERANGKAT DAERAH/KABUPATEN/KOTA	FOKUS DAN SASARAN	Jadwal (M.B.T)		Hari Penugasan						Anggaran	Laporan	SARPRAS	KET
				RMP	RPL	PJ	WK/PJ	PT	KT	AT	Jmlh				
33	Evaluasi E-SAKIP Perangkat Daerah	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi	Melakukan Evaluasi AKIP Perangkat Daerah Berdasarkan Permenpan Nomor 88 Tahun 2021 dan PERGUB LAMPUNG NOMOR 39 Tahun 2022	19.05.25	23.05.25	1	1	1	1	3	3	450.000	1 laporan	komputer LCD Printer	Auditor dan PPUPD
34	Evaluasi E-SAKIP Perangkat Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Melakukan Evaluasi AKIP Perangkat Daerah Berdasarkan Permenpan Nomor 88 Tahun 2021 dan PERGUB LAMPUNG NOMOR 39 Tahun 2022	19.05.25	23.05.25	1	1	1	1	3	3	450.000	1 laporan	komputer LCD Printer	Auditor dan PPUPD
35	Evaluasi E-SAKIP Perangkat Daerah	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Melakukan Evaluasi AKIP Perangkat Daerah Berdasarkan Permenpan Nomor 88 Tahun 2021 dan PERGUB LAMPUNG NOMOR 39 Tahun 2022	19.05.25	23.05.25	1	1	1	1	3	3	450.000	1 laporan	komputer LCD Printer	Auditor dan PPUPD
36	Evaluasi E-SAKIP Perangkat Daerah	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	Melakukan Evaluasi AKIP Perangkat Daerah Berdasarkan Permenpan Nomor 88 Tahun 2021 dan PERGUB LAMPUNG NOMOR 39 Tahun 2022	21.04.25	05.05.25		3	3	3	9	18	2.700.000	1 Laporan	komputer LCD Printer	Auditor dan PPUPD
37	Evaluasi E-SAKIP Perangkat Daerah	Badan Kepegawaian Daerah	Melakukan Evaluasi AKIP Perangkat Daerah Berdasarkan Permenpan Nomor 88 Tahun 2021 dan PERGUB LAMPUNG NOMOR 39 Tahun 2022	21.04.25	05.05.25								1 Laporan	komputer LCD Printer	Auditor dan PPUPD
38	Evaluasi E-SAKIP Perangkat Daerah	Biro Tata Pemerintahan dan OTDA	Melakukan Evaluasi AKIP Perangkat Daerah Berdasarkan Permenpan Nomor 88 Tahun 2021 dan PERGUB LAMPUNG NOMOR 39 Tahun 2022	21.04.25	05.05.25								1 Laporan	komputer LCD Printer	Auditor dan PPUPD
39	Evaluasi E-SAKIP Perangkat Daerah	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Melakukan Evaluasi AKIP Perangkat Daerah Berdasarkan Permenpan Nomor 88 Tahun 2021 dan PERGUB LAMPUNG NOMOR 39 Tahun 2022	19.04.25	19.05.25		3	3	3	9	18	2.700.000	1 Laporan	komputer LCD Printer	Auditor dan PPUPD
40	Evaluasi E-SAKIP Perangkat Daerah	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Melakukan Evaluasi AKIP Perangkat Daerah Berdasarkan Permenpan Nomor 88 Tahun 2021 dan PERGUB LAMPUNG NOMOR 39 Tahun 2022	19.04.25	19.05.25								1 Laporan	komputer LCD Printer	Auditor dan PPUPD
41	Evaluasi E-SAKIP Perangkat Daerah	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Melakukan Evaluasi AKIP Perangkat Daerah Berdasarkan Permenpan Nomor 88 Tahun 2021 dan PERGUB LAMPUNG NOMOR 39 Tahun 2022	19.04.25	19.05.25								1 Laporan	komputer LCD Printer	Auditor dan PPUPD
42	Evaluasi E-SAKIP Perangkat Daerah	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi	Melakukan Evaluasi AKIP Perangkat Daerah Berdasarkan Permenpan Nomor 88 Tahun 2021 dan PERGUB LAMPUNG NOMOR 39 Tahun 2022	21.04.25	05.05.25		3	3	3	9	18	2.700.000	1 Laporan	komputer LCD Printer	Auditor dan PPUPD

No.	KEGIATAN BINWAS	PERANGKAT DAERAH/KABUPATEN/KOTA	FOKUS DAN SASARAN	Jadwal (M.B.T)		Hari Penugasan					Anggaran	Laporan	SARPRAS	KET	
				RMP	RPL	PJ	WK/PJ	PT	KT	AT					Jmlh
43	Evaluasi E-SAKIP Perangkat Daerah	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah	Melakukan Evaluasi AKIP Perangkat Daerah Berdasarkan Permenpan Nomor 88 Tahun 2021 dan PERGUB LAMPUNG NOMOR 39 Tahun 2022	21.04.25	05.05.25							1 Laporan	komputer LCD Printer	Auditor dan PPUPD	
44	Evaluasi E-SAKIP Perangkat Daerah	Biro Hukum	Melakukan Evaluasi AKIP Perangkat Daerah Berdasarkan Permenpan Nomor 88 Tahun 2021 dan PERGUB LAMPUNG NOMOR 39 Tahun 2022	21.04.25	05.05.25							1 Laporan	komputer LCD Printer	Auditor dan PPUPD	
45	Evaluasi E-SAKIP Perangkat Daerah	Sekretariat DPRD	Melakukan Evaluasi AKIP Perangkat Daerah Berdasarkan Permenpan Nomor 88 Tahun 2021 dan PERGUB LAMPUNG NOMOR 39 Tahun 2022	21.04.25	05.05.25	3	3	3	3	9	18	1 Laporan	komputer LCD Printer	Auditor dan PPUPD	
46	Evaluasi E-SAKIP Perangkat Daerah	Satuan Polisi Pamong Praja	Melakukan Evaluasi AKIP Perangkat Daerah Berdasarkan Permenpan Nomor 88 Tahun 2021 dan PERGUB LAMPUNG NOMOR 39 Tahun 2022	21.04.25	05.05.25							1 Laporan	komputer LCD Printer	Auditor dan PPUPD	
47	Evaluasi E-SAKIP Perangkat Daerah	Biro Organisasi	Melakukan Evaluasi AKIP Perangkat Daerah Berdasarkan Permenpan Nomor 88 Tahun 2021 dan PERGUB LAMPUNG NOMOR 39 Tahun 2022	21.04.25	05.05.25							1 Laporan	komputer LCD Printer	Auditor dan PPUPD	
J	Penjaminan Kualitas MATURITAS SPIP														
1	Penjaminan Kualitas Atas Penilaian Maturitas SPIP Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah	Perangkat Daerah di Pemrov Lampung	Melakukan Penjaminan Kualitas Atas Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Terintegrasi Provinsi Lampung mengacu Kepada peraturan BPKP nomor 5 Tahun 2021	26.05.25	26.05.25	8	9	9	9	24	50	1 laporan	komputer LCD Printer	Auditor dan PPUPD	
K	TELAAH SEJAWAT INTERNAL (ANTAR IRBAN).														
2	TELAAH SEJAWAT INTERNAL	INSPEKTORAT	Melakukan Telaah sejawat internal di Inspektorat Provinsi Lampung sesuai Pedoman Standar Audit Intern pemerintah Indonesia	24.02.25	28.02.25		1	4	4		21	0	1 Laporan	komputer LCD Printer	Auditor dan PPUPD
L	ASISTENSI PENGELOLAAN RISIKO														
1	Asistensi Penerapan Pengelolaan/Manajemen Resiko Indeks	Rumah Sakit Jiwa	Melakukan Asistensi Pengelolaan Resiko Berdasarkan Perdep BPKP NOMOR4 Tahun 2029 dan Pergub Lampung Nomor 36 Tahun 2023	23.06.25	23.06.25		1	1	1	1	3	6	1 Laporan	komputer LCD Printer	Auditor dan PPUPD

No.	KEGIATAN BINWAS	PERANGKAT DAERAH/KABUPATEN/KOTA	FOKUS DAN SASARAN	Jadwal (M.B.T)		Hari Penugasan						Anggaran	Laporan	SARPRAS	KET
				RMP	RPL	PJ	WK/PJ	PT	KT	AT	Jmlh				
2	Asistensi Penerapan Pengelolaan/Manajemen Resiko Indeks	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Melakukan Asistensi Pengelolaan Resiko Berdasarkan Perdep BPKP NOMOR4 Tahun 2029 dan Pergub Lampung Nomor 36 Tahun 2023	23.06.25	23.06.25		1	1	1	3	6	900.000	1 Laporan	komputer LCD Printer	Auditor dan PPUPD
3	Asistensi Penerapan Pengelolaan/Manajemen Resiko Indeks	Biro Administrasi Pimpinan	Melakukan Asistensi Pengelolaan Resiko Berdasarkan Perdep BPKP NOMOR4 Tahun 2029 dan Pergub Lampung Nomor 36 Tahun 2023	23.06.25	23.06.25		1	1	1	3	6	900.000	1 Laporan	komputer LCD Printer	Auditor dan PPUPD
4	Asistensi Penerapan Pengelolaan/Manajemen Resiko Indeks	Dinas Sosial	Melakukan Asistensi Pengelolaan Resiko Berdasarkan Perdep BPKP NOMOR4 Tahun 2029 dan Pergub Lampung Nomor 36 Tahun 2023	23.06.25	23.06.25		1	1	1	3	6	900.000	1 Laporan	komputer LCD Printer	Auditor dan PPUPD
5	Asistensi Penerapan Pengelolaan/Manajemen Resiko Indeks	Dinas Kesehatan	Melakukan Asistensi Pengelolaan Resiko Berdasarkan Perdep BPKP NOMOR4 Tahun 2029 dan Pergub Lampung Nomor 36 Tahun 2023	23.06.25	23.06.25		1	1	1	3	6	900.000	1 Laporan	komputer LCD Printer	Auditor dan PPUPD
6	Asistensi Penerapan Pengelolaan/Manajemen Resiko Indeks	Dinas Tenaga Kerja	Melakukan Asistensi Pengelolaan Resiko Berdasarkan Perdep BPKP NOMOR4 Tahun 2029 dan Pergub Lampung Nomor 36 Tahun 2023	23.06.25	23.06.25		1	1	1	3	6	900.000	1 Laporan	komputer LCD Printer	Auditor dan PPUPD
7	Asistensi Penerapan Pengelolaan/Manajemen Resiko Indeks	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdul Moelock	Melakukan Asistensi Pengelolaan Resiko Berdasarkan Perdep BPKP NOMOR4 Tahun 2029 dan Pergub Lampung Nomor 36 Tahun 2023	23.06.25	23.06.25		1	1	1	3	6	900.000	1 Laporan	komputer LCD Printer	Auditor dan PPUPD
8	Asistensi Penerapan Pengelolaan/Manajemen Resiko Indeks	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Melakukan Asistensi Pengelolaan Resiko Berdasarkan Perdep BPKP NOMOR4 Tahun 2029 dan Pergub Lampung Nomor 36 Tahun 2023	23.06.25	23.06.25		1	1	1	3	6	900.000	1 Laporan	komputer LCD Printer	Auditor dan PPUPD
9	Asistensi Penerapan Pengelolaan/Manajemen Resiko Indeks	Biro Umum	Melakukan Asistensi Pengelolaan Resiko Berdasarkan Perdep BPKP NOMOR4 Tahun 2029 dan Pergub Lampung Nomor 36 Tahun 2023	23.06.25	23.06.25		1	1	1	3	6	900.000	1 Laporan	komputer LCD Printer	Auditor dan PPUPD

No.	KEGIATAN BINWAS	PERANGKAT DAERAH/KABUPATEN/KOTA	FOKUS DAN SASARAN	Jadwal (M.B.T)		Hari Penugasan						Anggaran	Laporan	SARPRAS	KET
				RMP	RPL	PJ	WK/PJ	PT	KT	AT	Jmlh				
10	Asistensi Penerapan Pengelolaan/Manajemen Resiko Indeks	Dinas Pemuda dan Olahraga	Melakukan Asistensi Pengelolaan Resiko Berdasarkan Perdep BPKP NOMOR4 Tahun 2029 dan Pergub Lampung Nomor 36 Tahun 2023	23.06.25	23.06.25		1	1	1	3	6	900.000	1 Laporan	komputer LCD Printer	Auditor dan PPUPD
11	Asistensi Penerapan Pengelolaan/Manajemen Resiko Indeks	Badan Penghubung	Melakukan Asistensi Pengelolaan Resiko Berdasarkan Perdep BPKP NOMOR4 Tahun 2029 dan Pergub Lampung Nomor 36 Tahun 2023	23.06.25	23.06.25		1	1	1	3	6	900.000	1 Laporan	komputer LCD Printer	Auditor dan PPUPD
12	Asistensi Penerapan Pengelolaan/Manajemen Resiko Indeks	Biro Kesra	Melakukan Asistensi Pengelolaan Resiko Berdasarkan Perdep BPKP NOMOR4 Tahun 2029 dan Pergub Lampung Nomor 36 Tahun 2023	23.06.25	23.06.25		1	1	1	3	6	900.000	1 Laporan	komputer LCD Printer	Auditor dan PPUPD
M	PEMERIKSAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PERANGKAT DAERAH.														
1	Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	Melakukan Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah Meliputi Audit Belanja dan PBJ mengacu Kepada Aturan Pertanggungjawaban Administrasi Keuangan dan PBJ sesuai Aturan yang berlaku	01.11.25	30.11.25		3	3	3	9	18	400.000	1 laporan	komputer LCD Printer	Auditor
2	Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Melakukan Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah Meliputi Audit Belanja dan PBJ mengacu Kepada Aturan Pertanggungjawaban Administrasi Keuangan dan PBJ sesuai Aturan yang berlaku	01.11.25	30.11.25		3	3	3	9	18	400.000	1 laporan	komputer LCD Printer	Auditor
3	Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Dinas Kelautan dan Perikanan	Melakukan Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah Meliputi Audit Belanja dan PBJ mengacu Kepada Aturan Pertanggungjawaban Administrasi Keuangan dan PBJ sesuai Aturan yang berlaku	01.11.25	30.11.25		3	3	3	9	18	400.000	1 laporan	komputer LCD Printer	Auditor
4	Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Badan Pendapatan Daerah	Melakukan Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah Meliputi Audit Belanja dan PBJ mengacu Kepada Aturan Pertanggungjawaban Administrasi Keuangan dan PBJ sesuai Aturan yang berlaku	01.11.25	30.11.25		3	3	3	9	18	400.000	1 laporan	komputer LCD Printer	Auditor

No.	KEGIATAN BINWAS	PERANGKAT DAERAH/KABUPATEN/ KOTA	FOKUS DAN SASARAN	Jadwal (M.B.T)		Hari Penugasan						Anggaran	Laporan	SARPRAS	KET
				RMP	RPL	PJ	WK/ PJ	PT	KT	AT	Jmlh				
5	Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Melakukan Pemeriksaan Keuangan Daerah Meliputi Audit Belanja dan PBJ mengacu Kepada Aturan Pertanggungjawaban Administrasi Keuangan dan PBJ sesuai Aturan yang berlaku	01.11.25	30.11.25		3	3	3	9	18	400.000	1 laporan	komputer LCD Printer	Auditor
6	Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	Melakukan Pemeriksaan Keuangan Daerah Meliputi Audit Belanja dan PBJ mengacu Kepada Aturan Pertanggungjawaban Administrasi Keuangan dan PBJ sesuai Aturan yang berlaku	01.11.25	30.11.25		3	3	3	9	18	400.000	1 laporan	komputer LCD Printer	Auditor
7	Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Melakukan Pemeriksaan Keuangan Daerah Meliputi Audit Belanja dan PBJ mengacu Kepada Aturan Pertanggungjawaban Administrasi Keuangan dan PBJ sesuai Aturan yang berlaku	01.11.25	30.11.25		3	3	3	9	18	400.000	1 laporan	komputer LCD Printer	Auditor
8	Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	Melakukan Pemeriksaan Keuangan Daerah Meliputi Audit Belanja dan PBJ mengacu Kepada Aturan Pertanggungjawaban Administrasi Keuangan dan PBJ sesuai Aturan yang berlaku	01.11.25	30.11.25		3	3	3	9	18	400.000	1 laporan	komputer LCD Printer	Auditor
9	Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Dinas Perkebunan	Melakukan Pemeriksaan Keuangan Daerah Meliputi Audit Belanja dan PBJ mengacu Kepada Aturan Pertanggungjawaban Administrasi Keuangan dan PBJ sesuai Aturan yang berlaku	01.11.25	30.11.25		3	3	3	9	18	400.000	1 laporan	komputer LCD Printer	Auditor
10	Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Biro Per-ekonomian	Melakukan Pemeriksaan Keuangan Daerah Meliputi Audit Belanja dan PBJ mengacu Kepada Aturan Pertanggungjawaban Administrasi Keuangan dan PBJ sesuai Aturan yang berlaku	01.11.25	30.11.25		3	3	3	9	18	400.000	1 laporan	komputer LCD Printer	Auditor
11	Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan	Melakukan Pemeriksaan Keuangan Daerah Meliputi Audit Belanja dan PBJ mengacu Kepada Aturan Pertanggungjawaban Administrasi Keuangan dan PBJ sesuai Aturan yang berlaku	01.11.25	30.11.25		3	3	3	9	18	400.000	1 laporan	komputer LCD Printer	Auditor

No.	KEGIATAN BINWAS	PERANGKAT DAERAH/KABUPATEN/KOTA	FOKUS DAN SASARAN	Jadwal (M.B.T)		Hari Penugasan						Anggaran	Laporan	SARPRAS	KET
				RMP	RPL	PJ	WK/PJ	PT	KT	AT	Jmlh				
12	Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Melakukan Pemeriksaan Daerah Pengelolaan Keuangan Daerah Meliputi Audit Belanja dan PBJ mengacu Kepada Aturan Pertanggungjawaban Administrasi Keuangan dan PBJ sesuai Aturan yang berlaku	01.11.25	30.11.25		3	3	3	9	18	400.000	1 laporan	komputer LCD Printer	Auditor
13	Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Melakukan Pemeriksaan Daerah Pengelolaan Keuangan Daerah Meliputi Audit Belanja dan PBJ mengacu Kepada Aturan Pertanggungjawaban Administrasi Keuangan dan PBJ sesuai Aturan yang berlaku	01.11.25	30.11.25		3	3	3	9	18	400.000	1 laporan	komputer LCD Printer	Auditor
14	Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Rumah Sakit Jiwa	Melakukan Pemeriksaan Daerah Pengelolaan Keuangan Daerah Meliputi Audit Belanja dan PBJ mengacu Kepada Aturan Pertanggungjawaban Administrasi Keuangan dan PBJ sesuai Aturan yang berlaku	08.09.25	08.09.25		1	1	1	3	6	900.000	1 laporan	komputer LCD Printer	Auditor
15	Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Dinas Kesehatan	Melakukan Pemeriksaan Daerah Pengelolaan Keuangan Daerah Meliputi Audit Belanja dan PBJ mengacu Kepada Aturan Pertanggungjawaban Administrasi Keuangan dan PBJ sesuai Aturan yang berlaku	08.09.25	08.09.25		1	1	1	3	6	900.000	1 laporan	komputer LCD Printer	Auditor
16	Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdul Moeloe	Melakukan Pemeriksaan Daerah Pengelolaan Keuangan Daerah Meliputi Audit Belanja dan PBJ mengacu Kepada Aturan Pertanggungjawaban Administrasi Keuangan dan PBJ sesuai Aturan yang berlaku	08.09.25	08.09.25		1	1	1	3	6	900.000	1 laporan	komputer LCD Printer	Auditor
17	Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Dinas Pemuda dan Olahraga	Melakukan Pemeriksaan Daerah Pengelolaan Keuangan Daerah Meliputi Audit Belanja dan PBJ mengacu Kepada Aturan Pertanggungjawaban Administrasi Keuangan dan PBJ sesuai Aturan yang berlaku	08.09.25	08.09.25		1	1	1	3	6	900.000	1 laporan	komputer LCD Printer	Auditor
18	Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Badan Penghubung	Melakukan Pemeriksaan Daerah Pengelolaan Keuangan Daerah Meliputi Audit Belanja dan PBJ mengacu Kepada Aturan Pertanggungjawaban Administrasi Keuangan dan PBJ sesuai Aturan yang berlaku	08.09.25	08.09.25		1	1	1	3	6		1 laporan	komputer LCD Printer	Auditor

No.	KEGIATAN EINWAS	PERANGKAT DAERAH/KABUPATEN/ KOTA	FOKUS DAN SASARAN	Jadwal (M.B.T)		Hari Penugasan						Anggaran	Laporan	SARPRAS	KET
				RMP	RPL	PJ	WK/ PJ	PT	KT	AT	Jmlh				
19	Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Dinas ESDM	Melakukan Pemeriksaan Keuangan Daerah Pengelolaan Meliputi Audit Belanja dan PBJ mengacu Kepada Aturan Pertanggungjawaban Administrasi Keuangan dan PBJ sesuai Aturan yang berlaku	23.06.25	30.06.25			2	2	2	6	900.000	1 Laporan	komputer LCD Printer	Auditor
20	Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Dinas Kehutanan	Melakukan Pemeriksaan Keuangan Daerah Pengelolaan Meliputi Audit Belanja dan PBJ mengacu Kepada Aturan Pertanggungjawaban Administrasi Keuangan dan PBJ sesuai Aturan yang berlaku	18.08.25	22.08.25			1	1	2	4	2.400.000	1 Laporan	komputer LCD Printer	Auditor
21	Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi	Melakukan Pemeriksaan Keuangan Daerah Pengelolaan Meliputi Audit Belanja dan PBJ mengacu Kepada Aturan Pertanggungjawaban Administrasi Keuangan dan PBJ sesuai Aturan yang berlaku	11.08.25	04.09.25		5	5	5	10	25	3.750.000	1 Laporan	komputer LCD Printer	Auditor
22	Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Dinas Lingkungan Hidup	Melakukan Pemeriksaan Keuangan Daerah Pengelolaan Meliputi Audit Belanja dan PBJ mengacu Kepada Aturan Pertanggungjawaban Administrasi Keuangan dan PBJ sesuai Aturan yang berlaku	08.09.25	12.09.25			1	1	2	4	2.400.000	1 laporan	komputer LCD Printer	Auditor
23	Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	Melakukan Pemeriksaan Keuangan Daerah Pengelolaan Meliputi Audit Belanja dan PBJ mengacu Kepada Aturan Pertanggungjawaban Administrasi Keuangan dan PBJ sesuai Aturan yang berlaku	02.09.25	08.09.25			2	2	2	6	900.000	1 laporan	komputer LCD Printer	Auditor
24	Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Dinas Perhubungan	Melakukan Pemeriksaan Keuangan Daerah Pengelolaan Meliputi Audit Belanja dan PBJ mengacu Kepada Aturan Pertanggungjawaban Administrasi Keuangan dan PBJ sesuai Aturan yang berlaku	06.10.25	13.10.25			2	2	2	6	900.000	1 laporan	komputer LCD Printer	Auditor
25	Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Dinas BMBK	Melakukan Pemeriksaan Keuangan Daerah Pengelolaan Meliputi Audit Belanja dan PBJ mengacu Kepada Aturan Pertanggungjawaban Administrasi Keuangan dan PBJ sesuai Aturan yang berlaku	27.10.25	21.11.25		5	5	5	10	25	15.500.000	1 laporan	komputer LCD Printer	Auditor (Tentatif)

No.	KEGIATAN BINWAS	PERANGKAT DAERAH/KABUPATEN/KOTA	FOKUS DAN SASARAN	Jadwal (M.B.T)		Hari Penugasan						Anggaran	Laporan	SARPRAS	KET
				RMP	RPL	PJ	WK/PJ	PT	KT	AT	Jmlh				
26	Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	Melakukan Pemeriksaan Keuangan Daerah meliputi Audit Belanja dan PBJ mengacu Kepada Aturan Pertanggungjawaban Administrasi Keuangan dan PBJ sesuai Aturan yang berlaku	10.11.25	14.11.25			1	1	2	4	3.000.000	1 laporan	komputer LCD Printer	Auditor
27	Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Melakukan Pemeriksaan Keuangan Daerah meliputi Audit Belanja dan PBJ mengacu Kepada Aturan Pertanggungjawaban Administrasi Keuangan dan PBJ sesuai Aturan yang berlaku	10.11.25	05.12.25		5	5	5	10	25	7.550.000	1 laporan	komputer LCD Printer	Auditor
N	PEMERIKSAAN KETAATAN NSPK PERANGKAT DAERAH														
1	Pemeriksaan Ketaatan NSPK Perangkat Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	Melakukan Pemeriksaan Ketaatan NSPK mengacu Kepada Pedoman Teknis Pemeriksaan Ketaatan Pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, Kriteria Urusan Pemerintahan Konkuren	01.11.25	30.11.25		3	3	3	9	18	Tentativ APBD -P	1 laporan	komputer LCD Printer	PPUPD
2	Pemeriksaan Ketaatan NSPK Perangkat Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Melakukan Pemeriksaan Ketaatan NSPK mengacu Kepada Pedoman Teknis Pemeriksaan Ketaatan Pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, Kriteria Urusan Pemerintahan Konkuren	01.11.25	30.11.25		3	3	3	9	18	Tentativ APBD -P	1 laporan	komputer LCD Printer	PPUPD
3	Pemeriksaan Ketaatan NSPK Perangkat Daerah	Dinas Kelautan dan Perikanan	Melakukan Pemeriksaan Ketaatan NSPK mengacu Kepada Pedoman Teknis Pemeriksaan Ketaatan Pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, Kriteria Urusan Pemerintahan Konkuren	01.11.25	30.11.25		3	3	3	9	18	Tentativ APBD -P	1 laporan	komputer LCD Printer	PPUPD
4	Pemeriksaan Ketaatan NSPK Perangkat Daerah	Badan Pendapatan Daerah	Melakukan Pemeriksaan Ketaatan NSPK mengacu Kepada Pedoman Teknis Pemeriksaan Ketaatan Pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, Kriteria Urusan Pemerintahan Konkuren	01.11.25	30.11.25		3	3	3	9	18	Tentativ APBD -P	1 laporan	komputer LCD Printer	PPUPD
5	Pemeriksaan Ketaatan NSPK Perangkat Daerah	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Melakukan Pemeriksaan Ketaatan NSPK mengacu Kepada Pedoman Teknis Pemeriksaan Ketaatan Pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, Kriteria Urusan Pemerintahan Konkuren	01.11.25	30.11.25		3	3	3	9	18	Tentativ APBD -P	1 laporan	komputer LCD Printer	PPUPD

No.	KEGIATAN BINWAS	PERANGKAT DAERAH/KABUPATEN/KOTA	FOKUS DAN SASARAN	Jadwal (M.B.T)		Hari Penugasan						Anggaran	Laporan	SARPRAS	KET
				RMP	RPL	PJ	WK/PJ	PT	KT	AT	Jmlh				
6	Pemeriksaan Ketaatan NSPK Perangkat Daerah	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	Melakukan Pemeriksaan NSPK mengacu Kepada Ketaatan Pedoman Ketaatan Standar, Prosedur, Norma, Kriteria Urusan Pemerintahan Konkuren	01.11.25	30.11.25		3	3	3	9	18	Tentativ APBD -P	1 laporan	komputer LCD Printer	PPUPD
7	Pemeriksaan Ketaatan NSPK Perangkat Daerah	Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Melakukan Pemeriksaan NSPK mengacu Kepada Ketaatan Pedoman Ketaatan Standar, Prosedur, Norma, Kriteria Urusan Pemerintahan Konkuren	01.11.25	30.11.25		3	3	3	9	18	Tentativ APBD -P	1 laporan	komputer LCD Printer	PPUPD
8	Pemeriksaan Ketaatan NSPK Perangkat Daerah	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	Melakukan Pemeriksaan NSPK mengacu Kepada Ketaatan Pedoman Ketaatan Standar, Prosedur, Norma, Kriteria Urusan Pemerintahan Konkuren	01.11.25	30.11.25		3	3	3	9	18	Tentativ APBD -P	1 laporan	komputer LCD Printer	PPUPD
9	Pemeriksaan Ketaatan NSPK Perangkat Daerah	Dinas Perkebunan	Melakukan Pemeriksaan NSPK mengacu Kepada Ketaatan Pedoman Ketaatan Standar, Prosedur, Norma, Kriteria Urusan Pemerintahan Konkuren	01.11.25	30.11.25		3	3	3	9	18	Tentativ APBD -P	1 laporan	komputer LCD Printer	PPUPD
10	Pemeriksaan Ketaatan NSPK Perangkat Daerah	Biro Perekonomian	Melakukan Pemeriksaan NSPK mengacu Kepada Ketaatan Pedoman Ketaatan Standar, Prosedur, Norma, Kriteria Urusan Pemerintahan Konkuren	01.11.25	30.11.25	0	3	3	3	9	18	Tentativ APBD -P	1 laporan	komputer LCD Printer	PPUPD
11	Pemeriksaan Ketaatan NSPK Perangkat Daerah	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan	Melakukan Pemeriksaan NSPK mengacu Kepada Ketaatan Pedoman Ketaatan Standar, Prosedur, Norma, Kriteria Urusan Pemerintahan Konkuren	01.11.25	30.11.25		3	3	3	9	18	Tentativ APBD -P	1 laporan	komputer LCD Printer	PPUPD
12	Pemeriksaan Ketaatan NSPK Perangkat Daerah	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Melakukan Pemeriksaan NSPK mengacu Kepada Ketaatan Pedoman Ketaatan Standar, Prosedur, Norma, Kriteria Urusan Pemerintahan Konkuren	01.11.25	30.11.25		3	3	3	9	18	Tentativ APBD -P	1 laporan	komputer LCD Printer	PPUPD

No.	KEGIATAN BINWAS	PERANGKAT DAERAH/KABUPATEN/KOTA	FOKUS DAN SASARAN	Jadwal (M.B.T)		Hari Penugasan						Anggaran	Laporan	SARPRAS	KET
				RMP	RPL	PJ	WK/PJ	PT	KT	AT	Jmlh				
13	Pemeriksaan Ketaatan NSPK Perangkat Daerah	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Melakukan Pemeriksaan NSPK mengacu Kepada Ketaatan Pedoman Ketaatan Teknis Pemeriksaan Pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, Kriteria Urusan Pemerintahan Konkuren	01.11.25	30.11.25		3	3	3	9	18	Tentativ APBD -P	1 laporan	komputer LCD Printer	
14	Pemeriksaan Ketaatan NSPK Perangkat Daerah	Dinas Perkebunan	Melakukan Pemeriksaan NSPK mengacu Kepada Ketaatan Pedoman Ketaatan Teknis Pemeriksaan Pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, Kriteria Urusan Pemerintahan Konkuren	08.09.25	10.09.25		2	2	2	6	12	1.800.000	1 laporan	komputer LCD Printer	PPUPD
15	Pemeriksaan Ketaatan NSPK Perangkat Daerah	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan	Melakukan Pemeriksaan NSPK mengacu Kepada Ketaatan Pedoman Ketaatan Teknis Pemeriksaan Pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, Kriteria Urusan Pemerintahan Konkuren	10.09.25	12.09.25		2	2	2	6	12	1.800.000	1 laporan	komputer LCD Printer	PPUPD
16	Pemeriksaan Ketaatan NSPK Perangkat Daerah	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Melakukan Pemeriksaan NSPK mengacu Kepada Ketaatan Pedoman Ketaatan Teknis Pemeriksaan Pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, Kriteria Urusan Pemerintahan Konkuren	08.09.25	10.09.25		2	2	2	6	12		1 laporan	komputer LCD Printer	PPUPD
17	Pemeriksaan Ketaatan NSPK Perangkat Daerah	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Melakukan Pemeriksaan NSPK mengacu Kepada Ketaatan Pedoman Ketaatan Teknis Pemeriksaan Pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, Kriteria Urusan Pemerintahan Konkuren	08.09.25	10.09.25		2	2	2	6	12	1.800.000	1 laporan	komputer LCD Printer	PPUPD
18	Pemeriksaan Ketaatan NSPK Perangkat Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Melakukan Pemeriksaan NSPK mengacu Kepada Ketaatan Pedoman Ketaatan Teknis Pemeriksaan Pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, Kriteria Urusan Pemerintahan Konkuren	09.06.25	13.06.25	1	1	1	1	1	3	1.850.000	1 laporan	komputer LCD Printer	PPUPD
19	Pemeriksaan Ketaatan NSPK Perangkat Daerah	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Melakukan Pemeriksaan NSPK mengacu Kepada Ketaatan Pedoman Ketaatan Teknis Pemeriksaan Pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, Kriteria Urusan Pemerintahan Konkuren	23.06.25	30.06.25		2	2	2	4	8	1.200.000	1 laporan	komputer LCD Printer	PPUPD

No.	KEGIATAN BINWAS	PERANGKAT DAERAH/KABUPATEN/KOTA	FOKUS DAN SASARAN	Jadwal (M.B.T)		PJ	WK/PJ	Hari Penugasan				Anggaran	Laporan	SARPRAS	KET
				RMP	RPL			PT	KT	AT	Jmlh				
20	Pemeriksaan Ketaatan NSPK Perangkat Daerah	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	Melakukan Pemeriksaan NSPK mengacu Kepada Pedoman Ketaatan Ketaatan Standar, Prosedur, Norma, Kriteria Urusan Pemerintahan Konkuren	14.07.25	18.07.25			1	1	1	3	3.000.000	1 Laporan	komputer LCD Printer	PPUPD
21	Pemeriksaan Ketaatan NSPK Perangkat Daerah	Dinas Kehutanan	Melakukan Pemeriksaan NSPK mengacu Kepada Pedoman Ketaatan Ketaatan Standar, Prosedur, Norma, Kriteria Urusan Pemerintahan Konkuren	18.07.25	22.07.25			1	1	1	3	2.400.000	1 Laporan	komputer LCD Printer	PPUPD
22	Pemeriksaan Ketaatan NSPK Perangkat Daerah	Dinas Lingkungan Hidup	Melakukan Pemeriksaan NSPK mengacu Kepada Pedoman Ketaatan Ketaatan Standar, Prosedur, Norma, Kriteria Urusan Pemerintahan Konkuren	08.09.25	12.09.25			1	1	1	3	2.400.000	1 laporan	komputer LCD Printer	PPUPD
23	Pemeriksaan Ketaatan NSPK Perangkat Daerah	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	Melakukan Pemeriksaan NSPK mengacu Kepada Pedoman Ketaatan Ketaatan Standar, Prosedur, Norma, Kriteria Urusan Pemerintahan Konkuren	02.09.25	08.09.25			2	2	4	8	1.200.000	1 laporan	komputer LCD Printer	PPUPD
24	Pemeriksaan Ketaatan NSPK Perangkat Daerah	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi	Melakukan Pemeriksaan NSPK mengacu Kepada Pedoman Ketaatan Ketaatan Standar, Prosedur, Norma, Kriteria Urusan Pemerintahan Konkuren	01.09.25	08.09.25	1	1	1	1	1	3	1.850.000	1 laporan	komputer LCD Printer	PPUPD
25	Pemeriksaan Ketaatan NSPK Perangkat Daerah	Dinas Perhubungan	Melakukan Pemeriksaan NSPK mengacu Kepada Pedoman Ketaatan Ketaatan Standar, Prosedur, Norma, Kriteria Urusan Pemerintahan Konkuren	06.10.25	13.10.25			2	2	4	8	1.200.000	1 laporan	komputer LCD Printer	PPUPD
26	Pemeriksaan Ketaatan NSPK Perangkat Daerah	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	Melakukan Pemeriksaan NSPK mengacu Kepada Pedoman Ketaatan Ketaatan Standar, Prosedur, Norma, Kriteria Urusan Pemerintahan Konkuren	06.10.25	24.10.25			3	3	9	18	2.700.000	1 laporan	komputer LCD Printer	PPUPD

No.	KEGIATAN BINWAS	PERANGKAT DAERAH/KABUPATEN/KOTA	FOKUS DAN SASARAN	Jadwal (M.B.T)		Hari Penugasan					Anggaran	Laporan	SARPRAS	KET
				RMP	RPL	PJ	WK/PJ	PT	KT	AT	Jmlh			
27	Pemeriksaan Ketaatan NSPK Perangkat Daerah	Badan Kepegawaian Daerah	Melakukan Pemeriksaan NSPK mengacu Kepada Teknis Pemeriksaan Ketaatan Pelaksanaan Norma, Prosedur, Kriteria Urusan Pemerintahan Konkuren	06.10.25	24.10.25							1 laporan	komputer LCD Printer	PPUPD
28	Pemeriksaan Ketaatan NSPK Perangkat Daerah	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Melakukan Pemeriksaan NSPK mengacu Kepada Teknis Pemeriksaan Ketaatan Pelaksanaan Norma, Prosedur, Kriteria Urusan Pemerintahan Konkuren	06.10.25	24.10.25		3	3	3	9	18	2.700.000	komputer LCD Printer	PPUPD
29	Pemeriksaan Ketaatan NSPK Perangkat Daerah	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Melakukan Pemeriksaan NSPK mengacu Kepada Teknis Pemeriksaan Ketaatan Pelaksanaan Norma, Prosedur, Kriteria Urusan Pemerintahan Konkuren	06.10.25	24.10.25							1 laporan	komputer LCD Printer	PPUPD
30	Pemeriksaan Ketaatan NSPK Perangkat Daerah	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi	Melakukan Pemeriksaan NSPK mengacu Kepada Teknis Pemeriksaan Ketaatan Pelaksanaan Norma, Prosedur, Kriteria Urusan Pemerintahan Konkuren	06.10.25	24.10.25		3	3	3	9	18	2.700.000	komputer LCD Printer	PPUPD
31	Pemeriksaan Ketaatan NSPK Perangkat Daerah	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah	Melakukan Pemeriksaan NSPK mengacu Kepada Teknis Pemeriksaan Ketaatan Pelaksanaan Norma, Prosedur, Kriteria Urusan Pemerintahan Konkuren	06.10.25	24.10.25							1 laporan	komputer LCD Printer	PPUPD
32	Pemeriksaan Ketaatan NSPK Perangkat Daerah	Sekretariat DPRD	Melakukan Pemeriksaan NSPK mengacu Kepada Teknis Pemeriksaan Ketaatan Pelaksanaan Norma, Prosedur, Kriteria Urusan Pemerintahan Konkuren	06.10.25	24.10.25		3	3	3	9	18	2.700.000	komputer LCD Printer	PPUPD
33	Pemeriksaan Ketaatan NSPK Perangkat Daerah	Satuan Polisi Pamong Praja	Melakukan Pemeriksaan NSPK mengacu Kepada Teknis Pemeriksaan Ketaatan Pelaksanaan Norma, Prosedur, Kriteria Urusan Pemerintahan Konkuren	06.10.25	24.10.25							1 laporan	komputer LCD Printer	PPUPD

No.	KEGIATAN BINWAS	PERANGKAT DAERAH/KABUPATEN/ KOTA	FOKUS DAN SASARAN	Jadwal (M.B.T)		Hari Penugasan						Anggaran	Laporan	SARPRAS	KET
				RMP	RPL	PJ	WK/ PJ	PT	KT	AT	Jmlh				
O	ASISTENSI DAN PENILAIAN MANDIRI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS														
1	ASISTENSI Pembangunan Zona Integritas	Rumah Sakit Jiwa	Melakukan Asistensi Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) mengacu Kepada PERMENPAN nomor 90 Tahun 2021	25.08.25	28.08.25		2	2	2	6	12	1.800.000	1 laporan	komputer LCD Printer	Auditor dan PPUPD
2	ASISTENSI Pembangunan Zona Integritas	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdul Moeleok	Melakukan Asistensi Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) mengacu Kepada PERMENPAN nomor 90 Tahun 2021	25.08.25	28.08.25		2	2	2	6	12	1.800.000	1 laporan	komputer LCD Printer	Auditor dan PPUPD
3	Penilaian Mandiri Zona Integritas	Rumah Sakit Jiwa	Melakukan Penilaian Mandiri Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) mengacu Kepada PERMENPAN nomor 90 Tahun 2021	25.08.25	28.08.25		2	2	2	6	12	1.800.000	1 laporan	komputer LCD Printer	Auditor dan PPUPD
4	Penilaian Mandiri Zona Integritas	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdul Moeleok	Melakukan Penilaian Mandiri Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) mengacu Kepada PERMENPAN nomor 90 Tahun 2021	25.08.25	28.08.25		2	2	2	6	12	1.800.000	1 laporan	komputer LCD Printer	Auditor dan PPUPD
P	EVALUASI RB PERANGKAT DAERAH.														
1	Evaluasi Internal RB Pemerintah Provinsi Lampung	Perangkat Daerah Pegampu Reformasi Birokrasi	Melakukan Evaluasi Reformasi Birokrasi lingkup Pemerintah Provinsi Lampung Mengacu kepada Permenpan Nomor 9 Tahun 2023	22.04.25	10.05.25	3	3	3	3	18	30	4.500.000	1 Laporan	komputer LCD Printer	Auditor dan PPUPD
2	Evaluasi Internal RB Pemerintah Provinsi Lampung	Perangkat Daerah Pegampu Reformasi Birokrasi	Melakukan Evaluasi Reformasi Birokrasi lingkup Pemerintah Provinsi Lampung Mengacu kepada Permenpan Nomor 9 Tahun 2023	10.07.25	22.07.25	3	3	3	3	18	30	4.500.000	1 Laporan	komputer LCD Printer	Auditor dan PPUPD
3	Evaluasi Internal RB Pemerintah Provinsi Lampung	Perangkat Daerah Pegampu Reformasi Birokrasi	Melakukan Evaluasi Reformasi Birokrasi lingkup Pemerintah Provinsi Lampung Mengacu kepada Permenpan Nomor 9 Tahun 2023	13.10.25	22.10.25	3	3	3	3	18	30	4.500.000	1 Laporan	komputer LCD Printer	Auditor dan PPUPD
4	Evaluasi Internal RB Pemerintah Provinsi Lampung	Perangkat Daerah Pegampu Reformasi Birokrasi	Melakukan Evaluasi Reformasi Birokrasi lingkup Pemerintah Provinsi Lampung Mengacu kepada Permenpan Nomor 9 Tahun 2023	20.12.25	29.12.25	3	3	3	3	18	30	4.500.000	1 Laporan	komputer LCD Printer	Auditor dan PPUPD
Q	PEMERIKSAAN KAS OPNAME DAN STOCK OPNAME (IRBAN I- IV)														

No.	KEGIATAN BINWAS	PERANGKAT DAERAH/KABUPATEN/ KOTA	FOKUS DAN SASARAN	Jadwal (M.B.T)		Hari Penugasan						Anggaran	Laporan	SARPRAS	KET
				RMP	RPL	PJ	WK/ PJ	PT	KT	AT	Jmlh				
1	Pemeriksaan KAS Opname dan Stock Opname	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern yang handal dalam rangka realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah, pengelolaan deposito, pengelolaan persediaan; dan administrasi pencatatan kas.	22.12.25	31.12.25		3	3	3	9	18	TENTATIVE (APBD-P)	1 laporan	komputer LCD Printer	Auditor dan PPUPD
2	Pemeriksaan KAS Opname dan Stock Opname	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern yang handal dalam rangka realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah, pengelolaan deposito, pengelolaan persediaan; dan administrasi pencatatan kas.	22.12.25	31.12.25		3	3	3	9	18	TENTATIVE (APBD-P)	1 laporan	komputer LCD Printer	Auditor dan PPUPD
3	Pemeriksaan KAS Opname dan Stock Opname	Dinas Kelautan dan Perikanan	pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern yang handal dalam rangka realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah, pengelolaan deposito, pengelolaan persediaan; dan administrasi pencatatan kas.	22.12.25	31.12.25		3	3	3	9	18	TENTATIVE (APBD-P)	1 laporan	komputer LCD Printer	Auditor dan PPUPD
4	Pemeriksaan KAS Opname dan Stock Opname	Badan Pendapatan Daerah	pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern yang handal dalam rangka realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah, pengelolaan deposito, pengelolaan persediaan; dan administrasi pencatatan kas.	22.12.25	31.12.25		3	3	3	9	18	TENTATIVE (APBD-P)	1 laporan	komputer LCD Printer	Auditor dan PPUPD
5	Pemeriksaan KAS Opname dan Stock Opname	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern yang handal dalam rangka realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah, pengelolaan deposito, pengelolaan persediaan; dan administrasi pencatatan kas.	22.12.25	31.12.25		3	3	3	9	18	TENTATIVE (APBD-P)	1 laporan	komputer LCD Printer	Auditor dan PPUPD
6	Pemeriksaan KAS Opname dan Stock Opname	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern yang handal dalam rangka realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah, pengelolaan deposito, pengelolaan persediaan; dan administrasi pencatatan kas.	22.12.25	31.12.25		3	3	3	9	18	TENTATIVE (APBD-P)	1 laporan	komputer LCD Printer	Auditor dan PPUPD

No.	KEGIATAN BINWAS	PERANGKAT DAERAH/KABUPATEN/ KOTA	FOKUS DAN SASARAN	Jadwal (M.B.T)		Hari Penugasan						Anggaran	Laporan	SARPRAS	KET
				RMP	RPL	PJ	WK/ PJ	PT	KT	AT	Jmlh				
7	Pemeriksaan KAS Opname dan Stock Opname	Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern yang handal dalam rangka realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah, pengelolaan deposito, pengelolaan persediaan; dan administrasi pencatatan kas.	22.12.25	31.12.25		3	3	3	9	18	TENTATIVE (APBD-P)	1 laporan	komputer LCD Printer	Auditor dan PPUPD
8	Pemeriksaan KAS Opname dan Stock Opname	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern yang handal dalam rangka realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah, pengelolaan deposito, pengelolaan persediaan; dan administrasi pencatatan kas.	22.12.25	31.12.25		3	3	3	9	18	TENTATIVE (APBD-P)	1 laporan	komputer LCD Printer	Auditor dan PPUPD
9	Pemeriksaan KAS Opname dan Stock Opname	Dinas Perkebunan	pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern yang handal dalam rangka realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah, pengelolaan deposito, pengelolaan persediaan; dan administrasi pencatatan kas.	22.12.25	31.12.25		3	3	3	9	18	TENTATIVE (APBD-P)	1 laporan	komputer LCD Printer	Auditor dan PPUPD
10	Pemeriksaan KAS Opname dan Stock Opname	Biro Perkonomian	pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern yang handal dalam rangka realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah, pengelolaan deposito, pengelolaan persediaan; dan administrasi pencatatan kas.	22.12.25	31.12.25		3	3	3	9	18	TENTATIVE (APBD-P)	1 laporan	komputer LCD Printer	Auditor dan PPUPD
11	Pemeriksaan KAS Opname dan Stock Opname	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan	pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern yang handal dalam rangka realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah, pengelolaan deposito, pengelolaan persediaan; dan administrasi pencatatan kas.	22.12.25	31.12.25		3	3	3	9	18	TENTATIVE (APBD-P)	1 laporan	komputer LCD Printer	Auditor dan PPUPD
12	Pemeriksaan KAS Opname dan Stock Opname	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern yang handal dalam rangka realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah, pengelolaan deposito, pengelolaan persediaan; dan administrasi pencatatan kas.	22.12.25	31.12.25		3	3	3	9	18	TENTATIVE (APBD-P)	1 laporan	komputer LCD Printer	Auditor dan PPUPD

No.	KEGIATAN BINWAS	PERANGKAT DAERAH/KABUPATEN/KOTA	FOKUS DAN SASARAN	Jadwal (M.B.T)		Hari Penugasan						Anggaran	Laporan	SARPRAS	KET
				RMP	RPL	PJ	WK/ PJ	PT	KT	AT	Jmlh				
13	Pemeriksaan KAS Opname dan Stock Opname	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern yang handal dalam rangka realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah, pengelolaan deposito, pengelolaan persediaan; dan administrasi pencatatan kas.	22.12.25	31.12.25		3	3	3	9	18	TENTATIVE (APBD-P)	1 laporan	komputer LCD Printer	Auditor dan PPUPD
14	Pemeriksaan KAS Opname dan Stock Opname	Rumah Sakit Jiwa	pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern yang handal dalam rangka realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah, pengelolaan deposito, pengelolaan persediaan; dan administrasi pencatatan kas.	30.12.25	31.12.25		1	1	1	3	6	900.000,00	1 laporan	komputer LCD Printer	Auditor dan PPUPD
15	Pemeriksaan KAS Opname dan Stock Opname	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern yang handal dalam rangka realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah, pengelolaan deposito, pengelolaan persediaan; dan administrasi pencatatan kas.	30.12.25	31.12.25								1 laporan	komputer LCD Printer	Auditor dan PPUPD
16	Pemeriksaan KAS Opname dan Stock Opname	Biro Administrasi Pimpinan	pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern yang handal dalam rangka realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah, pengelolaan deposito, pengelolaan persediaan; dan administrasi pencatatan kas.	30.12.25	31.12.25								1 laporan	komputer LCD Printer	Auditor dan PPUPD
17	Pemeriksaan KAS Opname dan Stock Opname	Dinas Sosial	pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern yang handal dalam rangka realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah, pengelolaan deposito, pengelolaan persediaan; dan administrasi pencatatan kas.	30.12.25	31.12.25		1	1	1	3	6	900.000,00	1 laporan	komputer LCD Printer	Auditor dan PPUPD
18	Pemeriksaan KAS Opname dan Stock Opname	Dinas Kesehatan	pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern yang handal dalam rangka realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah, pengelolaan deposito, pengelolaan persediaan; dan administrasi pencatatan kas.	30.12.25	31.12.25								1 laporan	komputer LCD Printer	Auditor dan PPUPD

No.	KEGIATAN BINWAS	PERANGKAT DAERAH/KABUPATEN/ KOTA	FOKUS DAN SASARAN	Jadwal (M.B.T)		Hari Penugasan						Anggaran	Laporan	SARPRAS	KET
				RMP	RPL	PJ	WK/ PJ	PT	KT	AT	Jmlh				
19	Pemeriksaan KAS Opname dan Stock Opname	Dinas Tenaga Kerja	pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern yang handal dalam rangka realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah, pengelolaan deposito, pengelolaan persediaan; dan administrasi pencatatan kas.	30.12.25	31.12.25								1 laporan	komputer LCD Printer	Auditor dan PPUPD
20	Pemeriksaan KAS Opname dan Stock Opname	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdul Moeloek	pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern yang handal dalam rangka realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah, pengelolaan deposito, pengelolaan persediaan; dan administrasi pencatatan kas.	30.12.25	31.12.25		1	1	1	3	6		1 laporan	komputer LCD Printer	Auditor dan PPUPD
21	Pemeriksaan KAS Opname dan Stock Opname	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern yang handal dalam rangka realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah, pengelolaan deposito, pengelolaan persediaan; dan administrasi pencatatan kas.	30.12.25	31.12.25							900.000,00	1 laporan	komputer LCD Printer	Auditor dan PPUPD
22	Pemeriksaan KAS Opname dan Stock Opname	Biro Umum	pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern yang handal dalam rangka realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah, pengelolaan deposito, pengelolaan persediaan; dan administrasi pencatatan kas.	30.12.25	31.12.25								1 laporan	komputer LCD Printer	Auditor dan PPUPD
23	Pemeriksaan KAS Opname dan Stock Opname	Dinas Pemuda dan Olahraga	pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern yang handal dalam rangka realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah, pengelolaan deposito, pengelolaan persediaan; dan administrasi pencatatan kas.	30.12.25	31.12.25		1	1	1	3	6		1 laporan	komputer LCD Printer	Auditor dan PPUPD
24	Pemeriksaan KAS Opname dan Stock Opname	Badan Penghubung	pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern yang handal dalam rangka realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah, pengelolaan deposito, pengelolaan persediaan; dan administrasi pencatatan kas.	30.12.25	31.12.25							900.000,00	1 laporan	komputer LCD Printer	Auditor dan PPUPD

No.	KEGIATAN BINWAS	PERANGKAT DAERAH/KABUPATEN/ KOTA	FOKUS DAN SASARAN	Jadwal (M.B.T)		PJ	WK/ PJ	PT	Hari Penugasan			Anggaran	Laporan	SARPRAS	KET
				RMP	RPL				KT	AT	Jmlh				
25	Pemeriksaan KAS Opname dan Stock Opname	Biro Kesra	pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern yang handal dalam rangka realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah, pengelolaan deposito, pengelolaan persediaan; dan administrasi pencatatan kas.	30.12.25	31.12.25								1 laporan	komputer LCD Printer	Auditor dan PPUPD
26	Pemeriksaan KAS Opname dan Stock Opname	PSDA	pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern yang handal dalam rangka realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah, pengelolaan deposito, pengelolaan persediaan; dan administrasi pencatatan kas.	22.12.25	24.12.25			1	1	2	4	1.200.000	1 laporan	komputer LCD Printer	Auditor dan PPUPD
27	Pemeriksaan KAS Opname dan Stock Opname	Dinas Kehutanan	pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern yang handal dalam rangka realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah, pengelolaan deposito, pengelolaan persediaan; dan administrasi pencatatan kas.	12.12.25	16.12.25			1	1	2	4	600.000	1 laporan	komputer LCD Printer	Auditor dan PPUPD
28	Pemeriksaan KAS Opname dan Stock Opname	Dinas Lingkungan Hidup	pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern yang handal dalam rangka realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah, pengelolaan deposito, pengelolaan persediaan; dan administrasi pencatatan kas.	17.12.25	19.12.25			1	1	2	4	600.000	1 laporan	komputer LCD Printer	Auditor dan PPUPD
29	Pemeriksaan KAS Opname dan Stock Opname	Biro Abang	pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern yang handal dalam rangka realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah, pengelolaan deposito, pengelolaan persediaan; dan administrasi pencatatan kas.	29.12.25	31.12.25			1	1	2	4	600.000	1 laporan	komputer LCD Printer	Auditor dan PPUPD
30	Pemeriksaan KAS Opname dan Stock Opname	Dinas KPCK	pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern yang handal dalam rangka realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah, pengelolaan deposito, pengelolaan persediaan; dan administrasi pencatatan kas.	22.12.25	31.12.25			1	1	0	2	300.000	1 laporan	komputer LCD Printer	Auditor dan PPUPD

No.	KEGIATAN BINWAS	PERANGKAT DAERAH/KABUPATEN/KOTA	FOKUS DAN SASARAN	Jadwal (M.B.T)		PJ	WK/PJ	Hari Penugasan				Anggaran	Laporan	SARPRAS	KET
				RMP	RPL			PT	KT	AT	Jmlh				
31	Pemeriksaan KAS Opname dan Stock Opname	Dinas ESDM	pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern yang handal dalam rangka realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah, pengelolaan deposito, pengelolaan persediaan; dan administrasi pencatatan kas.	23.12.25	31.12.25			1	1	0	2	300.000	1 laporan	komputer LCD Printer	Auditor dan PPUPD
32	Pemeriksaan KAS Opname dan Stock Opname	Dinas Perhubungan	pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern yang handal dalam rangka realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah, pengelolaan deposito, pengelolaan persediaan; dan administrasi pencatatan kas.	24.12.25	31.12.25			1	1	0	2	300.000	1 laporan	komputer LCD Printer	Auditor dan PPUPD
33	Pemeriksaan KAS Opname dan Stock Opname	Dinas BMBK	pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern yang handal dalam rangka realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah, pengelolaan deposito, pengelolaan persediaan; dan administrasi pencatatan kas.	22.12.25	31.12.25			1	1	2	4	600.000	1 laporan	komputer LCD Printer	Auditor dan PPUPD
34	Pemeriksaan KAS Opname dan Stock Opname	BPBD	pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern yang handal dalam rangka realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah, pengelolaan deposito, pengelolaan persediaan; dan administrasi pencatatan kas.	22.12.25	31.12.25			1	1	2	4	600.000	1 laporan	komputer LCD Printer	Auditor dan PPUPD
35	Pemeriksaan KAS Opname dan Stock Opname	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern yang handal dalam rangka realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah, pengelolaan deposito, pengelolaan persediaan; dan administrasi pencatatan kas.	15.12.25	31.12.25		1	1	1	3	6			komputer LCD Printer	Auditor dan PPUPD
36	Pemeriksaan KAS Opname dan Stock Opname	Badan Kepegawaian Daerah	pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern yang handal dalam rangka realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah, pengelolaan deposito, pengelolaan persediaan; dan administrasi pencatatan kas.	15.12.25	31.12.25							900.000	1 laporan	komputer LCD Printer	Auditor dan PPUPD

No.	KEGIATAN BINWAS	PERANGKAT DAERAH/KABUPATEN/KOTA	FOKUS DAN SASARAN	Jadwal (M.B.T)		PJ	WK/PJ	Hari Penugasan				Anggaran	Laporan	SARPRAS	KET
				RMP	RPL			PT	KT	AT	Jmlh				
37	Pemeriksaan KAS Opname dan Stock Opname	Biro Tata Pemerintahan dan OTDA	pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern yang handal dalam rangka realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah, pengelolaan deposito, pengelolaan persediaan; dan administrasi pencatatan kas.	15.12.25	31.12.25								1 laporan	komputer LCD Printer	Auditor dan PPUPD
38	Pemeriksaan KAS Opname dan Stock Opname	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern yang handal dalam rangka realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah, pengelolaan deposito, pengelolaan persediaan; dan administrasi pencatatan kas.	15.12.25	31.12.25		1	1	1	3	6		1 laporan	komputer LCD Printer	Auditor dan PPUPD
39	Pemeriksaan KAS Opname dan Stock Opname	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern yang handal dalam rangka realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah, pengelolaan deposito, pengelolaan persediaan; dan administrasi pencatatan kas.	15.12.25	31.12.25							900.000	1 laporan	komputer LCD Printer	Auditor dan PPUPD
40	Pemeriksaan KAS Opname dan Stock Opname	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern yang handal dalam rangka realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah, pengelolaan deposito, pengelolaan persediaan; dan administrasi pencatatan kas.	15.12.25	31.12.25								1 laporan	komputer LCD Printer	Auditor dan PPUPD
41	Pemeriksaan KAS Opname dan Stock Opname	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi	pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern yang handal dalam rangka realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah, pengelolaan deposito, pengelolaan persediaan; dan administrasi pencatatan kas.	15.12.25	31.12.25		1	1	1	3	6		1 laporan	komputer LCD Printer	Auditor dan PPUPD
42	Pemeriksaan KAS Opname dan Stock Opname	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah	pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern yang handal dalam rangka realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah, pengelolaan deposito, pengelolaan persediaan; dan administrasi pencatatan kas.	15.12.25	31.12.25							900.000	1 laporan	komputer LCD Printer	Auditor dan PPUPD

No.	KEGIATAN BINWAS	PERANGKAT DAERAH/KABUPATEN/KOTA	FOKUS DAN SASARAN	Jadwal (M.B.T)		PJ	WK/PJ	Hari Penugasan				Anggaran	Laporan	SARPRAS	KET
				RMP	RPL			PT	KT	AT	Jmlh				
43	Pemeriksaan KAS Opname dan Stock Opname	Biro Hukum	pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern yang handal dalam rangka realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah, pengelolaan deposito, pengelolaan persediaan; dan administrasi pencatatan kas.	15.12.25	31.12.25								1 laporan	komputer LCD Printer	Auditor dan PPUPD
44	Pemeriksaan KAS Opname dan Stock Opname	Sekretariat DPRD	pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern yang handal dalam rangka realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah, pengelolaan deposito, pengelolaan persediaan; dan administrasi pencatatan kas.	15.12.25	31.12.25		1	1	1	3	6		1 laporan	komputer LCD Printer	Auditor dan PPUPD
45	Pemeriksaan KAS Opname dan Stock Opname	Satuan Polisi Pamong Praja	pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern yang handal dalam rangka realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah, pengelolaan deposito, pengelolaan persediaan; dan administrasi pencatatan kas.	15.12.25	31.12.25							900.000	1 laporan	komputer LCD Printer	Auditor dan PPUPD
46	Pemeriksaan KAS Opname dan Stock Opname	Biro Organisasi	pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern yang handal dalam rangka realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah, pengelolaan deposito, pengelolaan persediaan; dan administrasi pencatatan kas.	15.12.25	31.12.25								1 laporan	komputer LCD Printer	Auditor dan PPUPD
R	Reviu Tunda Bayar terhadap PBJ Tahun Anggaran 2024														
1	Reviu Tunda Bayar terhadap PBJ Tahun Anggaran 2024	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	Melakukan Reviu Tunda Bayar terhadap pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2024	03.03.25	05.03.25			3	3	6	12	600.000	1 laporan	komputer LCD Printer	Auditor dan PPUPD
2	Reviu Tunda Bayar terhadap PBJ Tahun Anggaran 2024	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi	Melakukan Reviu Tunda Bayar terhadap pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2024	03.03.25	07.03.25								1 laporan	komputer LCD Printer	Auditor dan PPUPD
3	Reviu Tunda Bayar terhadap PBJ Tahun Anggaran 2024	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Melakukan Reviu Tunda Bayar terhadap pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2024	03.03.25	07.03.25								1 laporan	komputer LCD Printer	Auditor dan PPUPD
4	Reviu Tunda Bayar terhadap PBJ Tahun Anggaran 2024	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	Melakukan Reviu Tunda Bayar terhadap pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2024	03.03.25	05.03.25		3	3	3	3	12	1.800.000	1 laporan	komputer LCD Printer	Auditor dan PPUPD

No.	KEGIATAN BINWAS	PERANGKAT DAERAH/KABUPATEN/KOTA	FOKUS DAN SASARAN	Jadwal (M.B.T)		Hari Penugasan						Anggaran	Laporan	SARPRAS	KET
				RMP	RPL	PJ	WK/PJ	PT	KT	AT	Jmlh				
S	Reviu Atas Kecukupan Anggaran dan SDM Sekretariat dan IRBAN SUS Inspektorat Kabupaten/Kota														
1	Reviu Kecukupan Anggaran dan SDM Sekretariat. (mandatory MCSP).	Kabupaten Tanggamus	Melakukan Reviu atas Kucukupan Anggaran dan Sekretariat SDM Inspektorat.	05.05.25	07.05.25			1	1	1	3	1.270.000.00	1 laporan	komputer LCD Printer	Auditor dan PPUPD
T.	Pembinaan dan Pengawasan Lingkup Inspektur Pembantu Wilayah V.														
1	a. Tindak Lanjut Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) Merugikan keuangan daerah	Kabupaten/Kota/Perangkat Daerah	melakukan PDTT Kerugian Keuangan Negara	Jan-Des	Jan-Des	1	1	1	2	2	7	9.600.000	sesuai penugasan	komputer LCD Printer	Auditor dan PPUPD
2	b. Tindak Lanjut Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) Penyalahgunaan kewenangan	Kabupaten/Kota/Perangkat Daerah	melakukan PDTT Penyalahgunaan kewenangan	Jan-Des	Jan-Des	1	1	1	2	2	7		sesuai penugasan	komputer LCD Printer	Auditor dan PPUPD
3	c. Tindak Lanjut Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) Adanya praktik korupsi termasuk penyuapan/gratifikasi/pemerasan.	Kabupaten/Kota/Perangkat Daerah	melakukan PDTT Praktek Korupsi, Penyuapan, Gratifikasi, Pemerasan	Jan-Des	Jan-Des	1	1	1	2	2	7		sesuai penugasan	komputer LCD Printer	Auditor dan PPUPD
4	Pengaduan Masyarakat dan / atau pemeriksaan Khusus lainnya	Kabupaten/Kota/Perangkat Daerah	melakukan Pemeriksaan atas Pengaduan Masyarakat/ Pemeriksaan Khusus.	Jan-Des	Jan-Des	1	1	1	2	2	7	276.150.000	sesuai penugasan	komputer LCD Printer	Auditor dan PPUPD
5	Operasional Sapu Bersih Pungutan Liar dan SPAN Lapor	Kabupaten/Kota/Perangkat Daerah	melakukan kegiatan Pencegahan melalui satgas Saber Pungli & SPAN Lapor	Jan-Des	Jan-Des	1	1	1	2	2	7	395.221.000	sesuai penugasan	komputer LCD Printer	Auditor dan PPUPD
6	Pemeriksaan Investigatif	Kabupaten/Kota/Perangkat Daerah	Pemeriksaan Investigatif	Jan-Des	Jan-Des							276.150.000	sesuai penugasan	komputer LCD Printer	Auditor dan PPUPD
7	Monev dan / atau Sosialisasi WBS KPK	Kabupaten/Kota/Perangkat Daerah	melakukan kegiatan Monev/Sosialisasi WBS KPK	Jan-Des	Jan-Des	1	1	1	1	1	5	180.000.000	sesuai penugasan	komputer LCD Printer	Auditor dan PPUPD
8	Tindak Lanjut dari Pelimpahan Perjanjian Kerjasama APIP dan APH dalam penanganan laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi dan WBS	Kabupaten/Kota/Perangkat Daerah	Pelimpahan dalam penanganan Laporan/Dumas berindikasi Korupsi dan WBS	Jan-Des	Jan-Des	1	1	1	2	2	7	276.150.000	sesuai penugasan	komputer LCD Printer	
9	Penanganan Disiplin PNS	Kabupaten/Kota/Perangkat Daerah	Penanganan Disiplin PNS	Jan-Des	Jan-Des	1	1	1	1	1	5	276.150.000	sesuai penugasan	komputer LCD Printer	
10	Penanganan Ijin Pernikahan/Perceraian	Kabupaten/Kota/Perangkat Daerah	Penanganan Ijin Perceraian	Jan-Des	Jan-Des	1	1	1	1	1	5	120.000.000	sesuai penugasan	komputer LCD Printer	

No.	KEGIATAN BINWAS	PERANGKAT DAERAH/KABUPATEN/KOTA	FOKUS DAN SASARAN	Jadwal (M.B.T)		Hari Penugasan						Anggaran	Laporan	SARPRAS	KET
				RMP	RPL	PJ	WK/PJ	PT	KT	AT	Jmlh				
1	Reviu Pengadaan Barang dan Jasa Perangkat Daerah	Badan Pendapatan Daerah	Melakukan Reviu Pengadaan Barang dan Jasa Mengacu Kepada Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengawasan Intern Atas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	22.12.25	31.12.25		3	3	3	9	18	TENTATIVE (APBD-P)	1 laporan	komputer LCD Printer	Auditor dan PPUPD
2	Reviu Pengadaan Barang dan Jasa Perangkat Daerah	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Melakukan Reviu Pengadaan Barang dan Jasa Mengacu Kepada Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengawasan Intern Atas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	22.12.25	31.12.25		3	3	3	9	18	TENTATIVE (APBD-P)	1 laporan	komputer LCD Printer	Auditor dan PPUPD
3	Reviu Pengadaan Barang dan Jasa Perangkat Daerah	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	Melakukan Reviu Pengadaan Barang dan Jasa Mengacu Kepada Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengawasan Intern Atas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	22.12.25	31.12.25		3	3	3	9	18	TENTATIVE (APBD-P)	1 laporan	komputer LCD Printer	Auditor dan PPUPD
4	Reviu Pengadaan Barang dan Jasa Perangkat Daerah	Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Melakukan Reviu Pengadaan Barang dan Jasa Mengacu Kepada Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengawasan Intern Atas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	22.12.25	31.12.25		3	3	3	9	18	TENTATIVE (APBD-P)	1 laporan	komputer LCD Printer	Auditor dan PPUPD
5	Reviu Pengadaan Barang dan Jasa Perangkat Daerah	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	Melakukan Reviu Pengadaan Barang dan Jasa Mengacu Kepada Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengawasan Intern Atas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	22.12.25	31.12.25		3	3	3	9	18	TENTATIVE (APBD-P)	1 laporan	komputer LCD Printer	Auditor dan PPUPD

No.	KEGIATAN BINWAS	PERANGKAT DAERAH/KABUPATEN/KOTA	FOKUS DAN SASARAN	Jadwal (M.B.T)		Hari Penugasan					Anggaran	Laporan	SARPRAS	KET	
				RMP	RPL	PJ	WK/PJ	PT	KT	AT					Jmlh
6	Reviu Pengadaan Barang dan Jasa Perangkat Daerah	Dinas Perkebunan	Melakukan Reviu Pengadaan Barang dan Jasa Mengacu Kepada Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengawasan Intern Atas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	22.12.25	31.12.25		3	3	3	9	18	TENTATIVE (APBD-P)	1 laporan	komputer LCD Printer	Auditor dan PPUPD
7	Reviu Pengadaan Barang dan Jasa Perangkat Daerah	Biro Perekonomian	Melakukan Reviu Pengadaan Barang dan Jasa Mengacu Kepada Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengawasan Intern Atas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	22.12.25	31.12.25		3	3	3	9	18	TENTATIVE (APBD-P)	1 laporan	komputer LCD Printer	Auditor dan PPUPD
8	Reviu Pengadaan Barang dan Jasa Perangkat Daerah	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan	Melakukan Reviu Pengadaan Barang dan Jasa Mengacu Kepada Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengawasan Intern Atas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	22.12.25	31.12.25		3	3	3	9	18	TENTATIVE (APBD-P)	1 laporan	komputer LCD Printer	Auditor dan PPUPD
9	Reviu Pengadaan Barang dan Jasa Perangkat Daerah	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Melakukan Reviu Pengadaan Barang dan Jasa Mengacu Kepada Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengawasan Intern Atas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	22.12.25	31.12.25		3	3	3	9	18	TENTATIVE (APBD-P)	1 laporan	komputer LCD Printer	Auditor dan PPUPD
10	Reviu Pengadaan Barang dan Jasa Perangkat Daerah	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Melakukan Reviu Pengadaan Barang dan Jasa Mengacu Kepada Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengawasan Intern Atas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	22.12.25	31.12.25		3	3	3	9	18	TENTATIVE (APBD-P)	1 laporan	komputer LCD Printer	Auditor dan PPUPD

No.	KEGIATAN BINWAS	PERANGKAT DAERAH/KABUPATEN/ KOTA	FOKUS DAN SASARAN	Jadwal (M.B.T)		Hari Penugasan						Anggaran	Laporan	SARPRAS	KET	
				RMP	RPL	PJ	WK/ PJ	PT	KT	AT	Jmlh					
11	Reviu Pengadaan Barang dan Jasa	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	Melakukan Reviu Pengadaan Barang dan Jasa Mengacu kepada Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan & Pembangunan RI Nomor 3 Tahun 2019	04.08.25	15.08.25		3	3	3	3	9	18	Tentatif (APBD-P)	1 laporan	komputer LCD Printer	Auditor dan PPUPD
12	Reviu Pengadaan Barang dan Jasa	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Melakukan Reviu Pengadaan Barang dan Jasa Mengacu kepada Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan & Pembangunan RI Nomor 3 Tahun 2019	04.08.25	15.08.25		3	3	3	3	9	18	Tentatif (APBD-P)	1 laporan	komputer LCD Printer	Auditor dan PPUPD
13	Reviu Pengadaan Barang dan Jasa	Dinas Kelautan dan Perikanan	Melakukan Reviu Pengadaan Barang dan Jasa Mengacu kepada Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan & Pembangunan RI Nomor 3 Tahun 2019	04.08.25	15.08.25		3	3	3	3	9	18	Tentatif (APBD-P)	1 laporan	komputer LCD Printer	Auditor dan PPUPD
14	Reviu Pengadaan Barang dan Jasa Perangkat Daerah	Rumah Sakit Jiwa	Melakukan Reviu Pengadaan Barang dan Jasa Mengacu Kepada Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengawasan Intern Atas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	08.12.25	09.12.25		1	1	1	3	3	6	900.000,00	1 laporan	komputer LCD Printer	Auditor dan PPUPD
	Reviu Pengadaan Barang dan Jasa Perangkat Daerah	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Melakukan Reviu Pengadaan Barang dan Jasa Mengacu Kepada Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengawasan Intern Atas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	08.12.25	09.12.25										komputer LCD Printer	Auditor dan PPUPD
15	Reviu Pengadaan Barang dan Jasa Perangkat Daerah	Dinas Sosial	Melakukan Reviu Pengadaan Barang dan Jasa Mengacu Kepada Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengawasan Intern Atas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	08.12.25	09.12.25		1	1	1	3	3	6		1 laporan	komputer LCD Printer	Auditor dan PPUPD
16	Reviu Pengadaan Barang dan Jasa Perangkat Daerah	Dinas Sosial	Melakukan Reviu Pengadaan Barang dan Jasa Mengacu Kepada Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengawasan Intern Atas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	08.12.25	09.12.25		1	1	1	3	3	6		1 laporan	komputer LCD Printer	Auditor dan PPUPD

No.	KEGIATAN BINWAS	PERANGKAT DAERAH/KABUPATEN/KOTA	FOKUS DAN SASARAN	Jadwal (M.B.T)		Hari Penugasan						Anggaran	Laporan	SARPRAS	KET
				RMP	RPL	PJ	WK/PJ	PT	KT	AT	Jmlh				
17	Reviu Pengadaan Barang dan Jasa Perangkat Daerah	Dinas Kesehatan	Melakukan Reviu Pengadaan Barang dan Jasa Mengacu Kepada Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengawasan Intern Atas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	08.12.25	09.12.25							900.000,00	1 laporan	komputer LCD Printer	Auditor dan PPUPD
18	Reviu Pengadaan Barang dan Jasa Perangkat Daerah	Dinas Tenaga Kerja	Melakukan Reviu Pengadaan Barang dan Jasa Mengacu Kepada Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengawasan Intern Atas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	08.12.25	09.12.25								1 laporan	komputer LCD Printer	Auditor dan PPUPD
19	Reviu Pengadaan Barang dan Jasa Perangkat Daerah	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdul Moelock	Melakukan Reviu Pengadaan Barang dan Jasa Mengacu Kepada Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengawasan Intern Atas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	08.12.25	09.12.25		1	1	1	3	6		1 laporan	komputer LCD Printer	Auditor dan PPUPD
20	Reviu Pengadaan Barang dan Jasa Perangkat Daerah	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Melakukan Reviu Pengadaan Barang dan Jasa Mengacu Kepada Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengawasan Intern Atas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	08.12.25	09.12.25							900.000,00	1 laporan	komputer LCD Printer	Auditor dan PPUPD
21	Reviu Pengadaan Barang dan Jasa Perangkat Daerah	Biro Umum	Melakukan Reviu Pengadaan Barang dan Jasa Mengacu Kepada Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengawasan Intern Atas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	08.12.25	09.12.25								1 laporan	komputer LCD Printer	Auditor dan PPUPD

No.	KEGIATAN BINWAS	PERANGKAT DAERAH/KABUPATEN/KOTA	FOKUS DAN SASARAN	Jadwal (M.B.T)		Hari Penugasan					Anggaran	Laporan	SARPRAS	KET
				RMP	RPL	PJ	WK/PJ	PT	KT	AT				
22	Reviu Pengadaan Barang dan Jasa Perangkat Daerah	Dinas Pemuda dan Olahraga	Melakukan Reviu Pengadaan Barang dan Jasa Mengacu Kepada Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengawasan Intern Atas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	08.12.25	09.12.25		1	1	1	3		1 laporan	komputer LCD Printer	Auditor dan PPUPD
23	Reviu Pengadaan Barang dan Jasa Perangkat Daerah	Badan Penghubung	Melakukan Reviu Pengadaan Barang dan Jasa Mengacu Kepada Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengawasan Intern Atas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	08.12.25	09.12.25						900.000,00	1 laporan	komputer LCD Printer	Auditor dan PPUPD
24	Reviu Pengadaan Barang dan Jasa Perangkat Daerah	Biro Kesra	Melakukan Reviu Pengadaan Barang dan Jasa Mengacu Kepada Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengawasan Intern Atas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	08.12.25	09.12.25							1 laporan	komputer LCD Printer	Auditor dan PPUPD

GUBERNUR LAMPUNG,



RAHMAT MIRZANI DJAUSAL